



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202015392, 15 Mei 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Agussani, M. AP.**
Alamat : **JL. JERMAL III GG. SETIA KAWAN 3 DESA DENAI KEC. MEDAN
DENAI, Medan, Sumatera Utara, 20227**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
Alamat : **JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238, Medan, Sumatera Utara,
20238**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS KECAKAPAN
HIDUP**

Tangga dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **2 Maret 2020, di Medan**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000187654**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

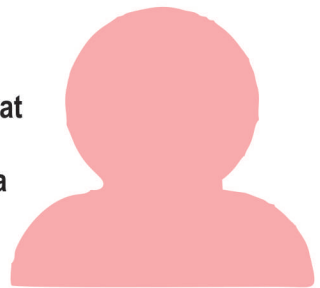
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Dr. Agussani, M.AP

PROGRAM PENDIDIKAN
KEAKSARAAN
BERBASIS KECAKAPAN HIDUP



Penerbit
Departemen Pendidikan Masyarakat
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia



**PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN
BERBASIS KECAKAPAN HIDUP**

Dr. Agussani, M.AP



Penerbit
Departemen Pendidikan Masyarakat
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia
2020

**PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN
BERBASIS KECAKAPAN HIDUP**

ISBN : 978-623-91369-6-3

Penulis:

Dr. Agussani, M.AP

Reviewer:

Dr. Asep Saepudin, M.Pd.

Setting & Layout:

Muhammad Hadi Ali Mutamam, S.Pd.

Penerbit:

Departemen Pendidikan Masyarakat
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia.

Redaksi:

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Tlp. 022-2001197, Fax: 022-2001197
Email: penmas_fip@upi.edu. Homepage: penmas.upi.edu

Cetakan Pertama, Maret 2020

Hal cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan monograf ini sesuai harapan.

Monograf yang ada dihadapan pembaca dengan judul program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup, merupakan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan profil masyarakat sasaran, desain program pendidikan keaksaraan, dan proses pembelajaran keaksaraan yang dilaksanakan pada masyarakat nelayan, termasuk keberhasilan yang dicapai berupa peningkatan keberaksaraan masyarakat setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan dimaksud.

Harapan penulis dengan diterbitkannya monograf ini adalah dapat terpublikasikannya hasil penelitian yang penulis lakukan, sekaligus dapat menjadi contoh baik (*best practices*) yang juga dapat diterapkan di wilayah lain, sehingga terjadi peningkatan keberaksaraan khususnya bagi masyarakat yang dianggap angka melek huruf nya masih rendah.

Penulis sangat menyadari bahwa sesungguhnya semua apa yang tergores dalam monograf ini adalah sebuah karya yang sangat terbatas dari ilmu Allah SWT yang maha luas dan maha sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan koreksi untuk penyempurnaan monograf ini.

Diakhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penerbitan monograf ini. Semoga bermanfaat. Aaamiiin.

Medan, 2 Maret 2020

Penulis

Dr. Agussani, M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ 3

DAFTAR ISI ~ 5

BAB I PENDAHULUAN ~ 7

- A. Latar Belakang Masalah ~ 7
- B. Tujuan Penelitian ~ 18
- C. Metode Penelitian ~ 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Konsep Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Keaksaraan ~ 24
 - 1. Konsep Pendidikan Nonformal ~ 24
 - 2. Batasan Konsep Keaksaraan ~ 30
 - 3. Landasan Pendidikan keaksaraan ~ 32
 - 4. Tujuan Pendidikan Keaksaraan ~ 33
 - 5. Prinsip Pendidikan Keaksaraan ~ 34
 - 6. Karakteristik Pendidikan Keaksaraan ~ 35
- B. Model Pembelajaran Keaksaraan ~ 37
 - 1. Konsep Model Pendidikan Keaksaraan ~ 37
 - 2. Jenis-jenis Model Pendidikan Keaksaraan ~ 39
 - 3. Strategi Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan ~ 43
 - 4. Jenis-Jenis Strategi dan Metode Pembelajaran Keaksaraan ~ 46
 - 5. Kurikulum Pendidikan Keaksaraan ~ 52
 - 6. Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran Keaksaraan ~ 54
- C. Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup ~ 55
 - 1. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup ~ 55
 - 2. Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup ~ 58
 - 3. Kriteria, Sasaran, dan Bidang Pendidikan Keaksaraan ~ 59
 - 4. Ciri-ciri Pendidikan Kecakapan Hidup ~ 61
 - 5. Indikator Pendidikan Kecakapan Hidup ~ 61
 - 6. Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Perspektif PNFI ~ 64
 - 7. Program Pendidikan Kecakapan Hidup dalam PNFI ~ 67
 - 8. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup ~ 68

- D. Konsep Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan bagi Kesejahteraan Masyarakat ~ **72**
 - 1. Konsep Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan ~ **72**
 - 2. Konsep Kesejahteraan Sosial ~ **75**
- E. Hasil Penelitian Relevan ~ **84**
- F. Kerangka Pemikiran ~ **89**

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian ~ **92**
- B. Deskripsi Hasil Penelitian ~ **94**
 - 1. Tingkat Keberaksaraan Masyarakat ~ **94**
 - 2. Pengelolaan Program Pendidikan Keaksaraan ~ **118**
 - 3. Proses Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan ~ **118**
 - 4. Tingkat Keberaksaraan Masyarakat setelah Mengikuti Program Pendidikan Keaksaraan ~ **131**
 - 5. Kemampuan Mengelola Pendapatan pada Masyarakat ~ **138**
 - 6. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan ~ **146**
- C. Pembahasan Hasil Penelitian ~ **153**
 - 1. Pembahasan Umum ~ **153**
 - 2. Pembahasan Khusus ~ **164**

BAB IV PENUTUP ~ 176

- A. Kesimpulan ~ **176**
- B. Saran ~ **182**

DAFTAR PUSTAKA ~ 185

RIWAYAT HIDUP ~ 191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan utama dan hak asasi setiap manusia, sehingga peluang setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan adalah hak yang harus diupayakan dan diusahakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tujuan pendidikan secara eksplisit dicantumkan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dalam skala nasional pendidikan berada dalam posisi yang sangat strategis

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa jalur pendidikan dibagi tiga bagian yakni pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pada bagian kelima pasal 26, disebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Konsekuensinya, seluruh kelompok usia, jenis kelamin, harus memperoleh layanan pendidikan yang merata. Namun pendidikan formal memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari warga masyarakat. Pada beberapa daerah seringkali ditemukan kasus rendahnya melek aksara masyarakat yang berdampak terhadap rendahnya kualitas hidup mereka, sebagai akibat tidak terlayannya pendidikan keaksaraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Umumnya masyarakat yang tidak melek aksara menghadapi banyak kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk kegiatan ekonomi keluarga. Perilaku spekulatif, kurang hati-hati dan boros dalam menggunakan uang adalah beberapa indikator perilaku dari umumnya masyarakat yang terbelakang dan belum terlayani bidang pendidikan keaksaraan. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan yang

representatif dalam menanggulangi persoalan pendidikan keaksaraan bagi masyarakat yang ada di daerah.

Lahirnya konsep pendidikan non formal (PNF) yang dibidani melalui pemikiran para ahli pendidikan dunia adalah jawaban strategis dalam upaya mengatasi persoalan pendidikan yang tidak terlayani melalui jalur pendidikan formal. Salah satu program pendidikan non formal adalah program keaksaraan fungsional yang telah lama dikenal yakni sejak pertengahan tahun 1960 an, dan merupakan konsep yang sangat berpengaruh dalam membangun pendidikan melalui program keaksaraan. Pesona ide tersebut sangat kuat dan tersebar luas. Banyak pihak sangat peduli terhadap ide tersebut antara lain: pendidik orang dewasa, para ahli pembangunan ekonomi, pekerja pembangunan desa, lembaga-lembaga penyebar inovasi, para perencana dan pelaksana pada lembaga-lembaga internasional tampaknya semuanya sangat peduli dengan keaksaraan fungsional. Ide dibalik itu sepertinya adalah bahwa keaksaraan dapat mempunyai fungsi atau peran membangkitkan pembangunan sosial ekonomi suatu masyarakat. Sementara itu para pekerja keaksaraan fungsional terutama yang bekerja di proyek-proyek yang disponsori UNESCO melakukan eksperimentasi, dan telah mempublikasikan konsep tersebut beserta temuan-temuannya.

Munculnya konsep keaksaraan fungsional sangat mengesankan, tetapi tidak berjalan mulus untuk gerakan keaksaraan di Negara sedang berkembang. Konsep keaksaraan fungsional ini memakan waktu panjang untuk bangkit dari frustasi dan kegagalan para pekerja keaksaraan yang seringkali menghadapi sasaran didik orang dewasa yang memimpikan sesuatu kehidupan yang indah, yang terang benderang tetapi tidak terwujud dan mereka tidak ingin menjadi bagian dari mimpi indah tersebut. Mereka tidak lagi secara sukarela untuk belajar membaca dan menulis. Mereka tidak lagi mikir apakah keaksaraan itu Hak Asasi Manusia atau bukan. Bagi mereka yang sudah pernah belajar membaca dan menulis, mereka juga tidak tahu mau melakukan apa dengan kecakapan barunya tersebut atau setelah memperoleh skill keaksaraan, mau apa?. Konsep baru yang disebut keaksaraan fungsional menjanjikan akan memecahkan masalah klasik dan masalah yang sulit yaitu motivasi

peserta didik dan secara bersamaan menghubungkan keaksaraan dengan ekonomi, sosial dan aspirasi politik di negara sedang berkembang.

Buta huruf secara sederhana biasa diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mengenal huruf latin (membaca) dan angka (menghitung). Buta huruf selalu diasosiasikan dengan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan simbol-simbol ketakberdayaan lainnya, bahkan angka buta huruf menjadi salah satu indikator dalam mengukur Human Development Index (HDI) suatu negara. Oleh karena itu, fenomena buta huruf ini menjadi salah satu isu utama dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Bahkan salah satu butir pokok Kesepakatan Dakar (The Dakar Framework for Action) yang sudah menjadi kesepakatan dunia dalam hal pengembangan sumber daya manusia adalah “mencapai perbaikan 50% pada tingkat keaksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa”.

Masih tingginya angka buta huruf ini tentunya merupakan sesuatu yang perlu dikaji, karena kegiatan ini sudah dimulai sejak awal kemerdekaan dengan berbagai model pendekatan, tahun 1995 diuji cobakan model Keaksaraan Fungsional yang digunakan sampai saat ini. Pemberantasan buta huruf ini didukung oleh ketersediaan ketenagaan pendidikan nonformal sebagai agen percepatan penuntasan pemberantasan buta huruf.

Sebagai bentuk keprihatinan akan masih tingginya angka buta huruf, pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan program Pemberantasan Buta Aksara Intensif dengan berusaha melibatkan sebanyak mungkin komponen bangsa. Targetnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis Depdiknas yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu menurunkan angka buta huruf usia 15 tahun ke atas hingga 5% pada tahun 2009. Untuk menunjang pencapaian tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun dan

Pemberantasan Buta Aksara (GN-PWB/PBA), dan pada tahun yang sama yakni tahun 2006 pemerintah menyiapkan dana sekitar 1 triliun rupiah untuk merealisasikan Instruksi Presiden tersebut (Direktorat Dikmas, 2012:4).

Upaya pemberantasan buta aksara yang diselenggarakan di Indonesia sangat dinamis dan tidak terlepas dari dinamika penyelenggaraan pendidikan keaksaraan pada tingkat internasional yang terus mengalami perubahan strategi dan pendekatan kearah yang inovatif. Dalam perkembangannya para praktisi, pakar dan promotor keaksaraan memusatkan perhatian mereka pada berbagai macam alasan untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan. Dalam studinya Ade Kusmiadi (2009:11) memamparkan bahwa salah satu badan dunia yang menaruh perhatian terhadap masalah pendidikan keaksaraan, UNESCO memberikan penekanan pada “keaksaraan fungsional”. Pada awalnya ide mengenai keaksaraan fungsional bertujuan membuat peserta didik buta aksara mampu berfungsi sesuai dengan budayanya sendiri, tetapi sejak konferensi UNESCO di Teheran-Iran tahun 1965, terjadi peralihan pemikiran dan keaksaraan fungsional jadi lebih terkait dengan ekonomi. Sedangkan menurut Hunter dalam Ade Kusmiadi (2009:12), menyatakan bahwa kemampuan keaksaraan memiliki keterkaitan dengan kemampuan dasar yang sangat bermanfaat untuk berbagai macam aktivitas kehidupan sehari-hari.

UNESCO mendefinisikan kemampuan keaksaraan atau melek aksara sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan seseorang dikatakan mempunyai kemampuan keaksaraan fungsional jika seseorang tersebut dapat terlibat dalam aktivitas di mana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai *effective function* kelompok dan sebagai dasar bagi dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya sendiri. Pada pelaksanaannya keaksaraan fungsional merupakan penyempurnaan pendekatan bagi program pemberantasan buta aksara yang menitikberatkan pada proses dari, oleh dan untuk peserta didik dengan strategi pendidikan melalui diskusi, membaca, menulis, berhitung dan aksi. Keaksaraan fungsional bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis dan berhitung dengan harapan peserta didik dapat menggunakannya untuk pemecahan masalah dalam kehidupannya sehari-hari dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keaksaraan fungsional juga merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar peserta didik.

Keaksaraan fungsional berpusat pada bagaimana cara masyarakat menggunakan keterampilan keaksaraannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya membaca informasi tetapi menerapkannya dan mengambil keuntungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, secara material maupun secara fisik. Bahan-bahan ajar yang didapatkan dari lingkungan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat dipelajari serta dianalisis, selanjutnya menulis rencana dan proposal untuk memperbaiki situasi setempat.

Selanjutnya perubahan orientasi pendidikan keaksaraan dilanjutkan saat Deklarasi global pendidikan untuk semua di Jomtien, Thailand, tahun 1990, yang salah satu butirnya merumuskan 'keaksaraan, komunikasi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah menjadi bagian penting pendidikan yang memperkaya pemenuhan kebutuhan belajar mendasar setiap orang.

Sejalan dengan paparan di atas, Indonesia memasuki tahapan baru dalam keaksaraan sesuai dengan arahan dari UNESCO melalui LIFE (*Literacy Initiative For Empowering*). LIFE merupakan hasil pertemuan di New York bulan Pebruari tahun 2003. Pertemuan mengakui bahwa keaksaraan merupakan faktor yang tidak bisa digantikan dalam upaya meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang akan berkontribusi pada sosial dan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan

Dalam platform Internasional LIFE merupakan strategi global yang mengintegrasikan semua kekuatan yaitu pemerintah, masyarakat sivil, agen bilateral dan multilateral untuk merevitalisasi dan mengakselerasi kegiatan keaksaraan dalam menghadapi proses

pendidikan keaksaraan sebagai tantangan yang kritis. LIFE juga digagas dalam upaya mendukung pendidikan dasar dimana membaca, menulis dan berhitung merupakan bagian utama dan integral pendidikan untuk semua, sehingga belajar menjadi bagian yang berkelanjutan dan merupakan peluang untuk mencapai kesetaraan untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak seorangpun ditinggalkan.

LIFE yang diterjemahkan menjadi AKRAB (aksara agar berdaya), merupakan lanjutan dari kesepakatan sebelumnya tentang pendidikan untuk semua atau EFA (*Education For All*), yang ditetapkan di Dakar (2000) pada awal abad ini, yang salah satu butir kesimpulannya adalah meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin program yang sempurna sehingga kualitas pembelajaran dikenal dan dapat diukur dari segi keluarannya bagi semua, terutama yang berhubungan dengan kemelekhurufan, kemampuan menghitung dan *life skill*. Penetapan kebijakan keaksaraan ini tidak terlepas dari pembangunan untuk milenium (MDGs) yang secara simultan salah satu aspeknya menetapkan tujuan pendidikan keaksaraan untuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan ekstrim.

Tujuan Dakar dan Milenium, sangat berkaitan dengan keberdayaan dalam wujud penguasaan *life skill* yang sekali lagi berkaitan dengan kualitas dan keterukuran pendidikan. Kualitas pendidikan bergeser dari pendekatan hasil pada proses, seperti ditetapkan UNESCO diarahkan pada penciptaan generasi baru yang lebih mandiri dan peserta belajar yang kritis yang mampu untuk menetapkan dan melaksanakan pendidikan yang berkelanjutan yang diperlukan untuk setiap tahapan dalam kehidupan mereka.

Gagasan perubahan pendidikan keaksaraan sebagaimana digulirkan dalam LIFE, Dakar dan MDGs telah menjadi inspirasi inovasi pendidikan keaksaraan di berbagai negara berkembang. Indonesia telah banyak menggalas dan melaksanakan program pendidikan keaksaraan secara terstruktur, inovatif dan berkelanjutan, diantaranya adalah program pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan bagi warga belajar yang

telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, melalui pembelajaran keterampilan usaha (kewirausahaan) yang dapat meningkatkan produktivitas warga belajar, baik secara perorangan maupun kelompok sehingga diharapkan dapat memiliki mata pencaharian dan penghasilan dalam rangka peningkatan taraf hidupnya.

Program lain yang secara simultan digulirkan sebagai penguatan pada pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah program pendidikan keaksaraan keluarga (PKK). Pendidikan keaksaraan keluarga merupakan pendekatan keaksaraan dengan mempertimbangkan aspek etnososial, karena proses pembelajarannya tidak lagi didasarkan pada transaksi ekonomi, tetapi lebih pada rasa kemanusiaan dan kasih sayang.

Terlepas dari berbagai gagasan dan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan, dengan kebijakan dan dukungan dana yang relatif besar, pertanyaannya kemudian adalah “apakah kegiatan pemberantasan buta huruf itu akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?”. Hal ini patut menjadi renungan, karena secara anatomi penyandang buta huruf kurang lebih sama dan sebangun dengan masyarakat miskin itu sendiri. “Apakah ia merupakan akar persoalan atau hanya dampak dari sebuah kebijakan?”.

Pertanyaan ini penting diajukan agar kita tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat parsial dan memakai indikator kuantitatif. Dalam menilai keberhasilan program pemberantasan buta huruf, seolah-olah persoalan buta huruf adalah persoalan yang berdiri sendiri, terpisah dari persoalan-persoalan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga pendekatan yang dilakukan sangat teknis (memberi kemampuan calistung) dan sektoral (hanya melibatkan instansi teknis Departemen Pendidikan Nasional). Dengan model ini, tidak mampu secara tuntas menyelesaikan persoalan yang ada, karena yang ditangani hanyalah dampak bukan akar persoalan.

Lalu apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan masih tingginya angka buta huruf?. pertanyaan ini harus dikemukakan dan dikaji sebagai *entry point* penuntasan permasalahan yang ada. Secara tipologi, masyarakat buta huruf adalah masyarakat yang memiliki

keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud sangat jelas pada aspek ekonomi, sosial, aset, akses, politik, budaya, dan lain-lain, tetapi bukan berarti mereka adalah kumpulan masyarakat yang tak memiliki potensi sama sekali. Kalau kita mau menganalisis secara jernih akar persoalan sebenarnya adalah masih terpeliharanya perilaku ketidakadilan baik itu ketidakadilan yang diperlihatkan oleh negara (pemerintah), maupun secara horizontal yang diperankan oleh masyarakat itu sendiri.

Ketidakadilan yang secara nyata diperlihatkan oleh negara sebagai salah satu bentuk represifitas adalah lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan ruang gerak terhadap masyarakat miskin untuk menyelenggarakan hidupnya secara layak dan manusiawi yang dijamin oleh Undang-Undang. Beberapa contoh nyata adalah : kebijakan kenaikan BBM, kebijakan penggusuran pedagang kaki lima dan pemukiman, kapitalisasi pendidikan, yang kesemuanya itu sangat berpotensi untuk memiskinkan masyarakat yang akan berdampak pada tingginya angka anak tak bersekolah dan anak putus sekolah.

Secara empirik dapat dikemukakan bahwa faktor ekonomi (tidak ada biaya/bekerja mencari nafkah) menjadi alasan utama seseorang tidak bersekolah, putus sekolah, dan/atau tidak melanjutkan sekolah. Hal ini sangat terkait dengan tidak terbukanya akses secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan nota bene dijamin oleh undang-undang, yang kemudian juga diikuti oleh tidak memadainya perlindungan/jaminan negara terhadap masyarakat miskin untuk menyelenggarakan hidupnya secara layak, termasuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu perlu sebuah komitmen kuat dalam bentuk kebijakan radikal dan berkeadilan yang *propoor*, yang tidak hanya menempatkan kemiskinan dan buta huruf menjadi isu untuk menaikkan mata anggaran, tetapi menjadikan gerakan pemberantasan buta huruf intensif sebagai sebuah gerakan yang bermakna pembebasan, pembunuhan kapital sosial, dan penghargaan terhadap kemanusiaan dan masa depan masyarakat dunia atau *global citizen*'. (Nancy Cook, 2008:1).

Mengintegrasikan kegiatan pemberantasan buta huruf dengan kegiatan produktifitas ekonomi masyarakat sebenarnya sudah dilakukan, tapi kelemahannya adalah: masih sangat tidak proposional, artinya bahwa kemampuan calistungdasi (membaca, menulis, berhitung dan berdiskusi) masih sangat dominan daripada porsi penumbuhan kecakapan personal, kecakapan sosial, maupun kecakapan vokasional; dan sifatnya pun masih sangat sektoral.

Masalah lain yang dihadapi peserta didik terkait dengan program pendidikan keaksaraan dalam rangka pemberantasan buta aksara dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama, buta aksara adalah masalah aktual yang memerlukan solusi cepat. Para penyandang buta aksara, anak-anak yang putus sekolah atau belum/tak pernah bersekolah, penduduk yang menganggur karena tidak memiliki keterampilan atau narapidana adalah fenomena faktual yang membawa bangsa dalam kemiskinan. Pendidikan Nonformal diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut, asalkan dilakukan dengan strategi yang efektif.

Kedua, program buta aksara yang dilaksanakan saat ini belum sepenuhnya menyentuh berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat marginal yang berada di pedesaan. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat buta aksara menganggap program ini tidak siap pakai untuk modal hidup mereka. Fenomena ini lebih diperparah dengan telah mengakarnya karakter melayu yaitu budaya malu pada sebagian besar masyarakat mayoritas etnis melayu. Malu bila dikatakan memiliki kekurangan (buta aksara) dengan usia yang boleh kita bilang sudah mendekati senja. Konsekuensinya pemberantasan buta aksara yang berkembang menjadi keaksaraan fungsional kurang mendapat respon oleh sebagian masyarakat, sehingga tidak terjadi penurunan angka yang signifikan terhadap jumlahnya.

Ketiga, secara tipologi, masyarakat buta huruf adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud sangat jelas pada aspek ekonomi, sosial, aset, akses, politik, budaya, dll, tetapi bukan berarti mereka adalah kumpulan masyarakat yang tak memiliki potensi sama sekali. Kalau kita mau menganalisis secara jernih akar persoalan sebenarnya adalah masih

terpeliharanya perilaku ketidakadilan baik itu ketidakadilan yang diperlihatkan oleh negara (pemerintah), maupun secara horizontal yang diperankan oleh masyarakat itu sendiri.

Keempat, mengacu kepada strategi Pelaksanaan GNP-PWB/PBA (Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara-Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun/Pemberantasan Buta Aksara) bahwa harus ada perbaikan mutu pendidikan melalui pengembangan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif/inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, aktual, konkret, dan bermakna bagi pengembangan dan kehidupan peserta didik. Selama program ini berjalan, Pemerintah lebih banyak mengejar target pencapaian angka melek akara, sehingga warga belajar buta aksara yang tidak mau mengikuti kegiatan ini diabaikan begitu saja. Padahal jumlah mereka yang tidak minat mengikuti kegiatan ini lebih banyak dari yang mengikuti.

Kelima, rendahnya minat dan motivasi belajar mengikuti program pemberantasan buta aksara dikarenakan adanya anggapan bahwa dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung belum tentu dapat membuat perekonomian mereka menjadi lebih baik.

Keenam, rendahnya pengelolaan baik kematangan dalam perencanaan, konsistensi pelaksanaan maupun minimnya perangkat evaluasi yang disusun atas dasar parameter kemampuan fungsional yang dimiliki warga belajar. SUKMA (Surat Keterangan Melek Akasar) dipandang hanya legalitas pengakuan untuk melek aksara.

Ketujuh, secara ekonomi model pembelajaran yang ada saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang efektif terhadap peningkatan kemampuan warga belajar dalam meningkatkan taraf hidup, termasuk keterampilan pengelolaan pendapatan. Seharusnya model pembelajaran yang dikembangkan menyentuh aspek pembelajaran yang berkontekstual pada pekerjaan, minat, mata pencaharian, potensi sumber daya alam pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, usaha produk kerajinan, pertukangan dan jasa. Melatih dan menyediakan tenaga pengajar/tutor, bahan belajar seperti buku-buku/modul-modul dan

suplemen yang terkait dengan keterampilan untuk dijadikan mata pencaharian yang dapat memberikan penghasilan.

Kedelapan, umumnya pendidikan keaksaraan bersifat idiologis dan netral sehingga dalam penyelenggaraannya tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dikaitkan dengan prioritas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Program pendidikan keaksaraan di Indonesia selama ini berlangsung dengan beragam jenis dan nama program yang terus diperbaharui. Pendidikan keaksaraan semula diarahkan pada kemampuan keaksaraan (*literacy*) murni, yaitu kecakapan membaca, menulis dan berhitung, kemudian meningkat pada fungsi kemampuan keberaksaraan untuk peningkatan pemahaman idiologis, peningkatan sosial budaya, hingga peningkatan kesejahteraan secara ekonomi. Karena begitu banyaknya program pendidikan keaksaraan maka ukuran tingkat keberhasilan program yang bervariasi tersebut perlu dikaji dan dianalisis sehingga diketahui dampak tingkat signifikansi program tersebut dalam memberi makna bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui studi ini secara spesifik akan dikaji peran pendidikan keaksaraan ekonomi (*economic literacy*) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, program pendidikan keaksaraan perlu mendapat perhatian dan pengkajian secara komprehensif baik pada aspek pengelolaan penyelenggaraan program keaksaraan, maupun orientasi pendidikan keaksaraan yang mengantarkan pada suatu kemampuan keterampilan tertentu sehingga memiliki kualitas hidup yang lebih baik, serta upaya mengukur tingkat keberhasilan atau efektifitas program pendidikan keaksaraan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi, termasuk kajian *best practices* pendidikan keaksaraan yang proses pembelajarannya memadukan dengan kegiatan ekonomi, sebagaimana dilakukan warga masyarakat nelayan yang berada di Desa Jaring Halus Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara kualitatif tentang pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup dalam meningkatkan kemampuan mengelola pendapatan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus. Selanjutnya tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus.
2. Mendeskripsikan pengelolaan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus.
3. Mendeskripsikan proses pembelajaran keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus.
4. Mendeskripsikan tingkat keberaksaraan masyarakat setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus .
5. Mendeskripsikan kemampuan mengelola pendapatan pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus.
6. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Subjek penelitian sebanyak 3 (tiga) orang warga belajar, 1 (satu) orang pengelola dan 1 (satu) orang Tutor program pendidikan keaksaraan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi dilakukan untuk mengetahui dari dekat kegiatan atau peristiwa tertentu yang terjadi, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna sesuai fokus penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu, observasi pasif dan observasi

partisipatif. Melalui observasi, data dapat dikumpulkan lebih objektif sesuai setting yang sesungguhnya, yaitu data informasi yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Agar sumber data merasa tidak diamati, maka dalam kegiatan observasi ini, peneliti berusaha mengamati secara cermat tentang berbagai gejala yang ditampakkan, baik perilaku, sikap, reaksi, maupun tanggapan dari responden.

2. Wawancara dalam kegiatan penelitian ini dilakukan secara berstruktur terhadap responden dalam pelaksanaan program pendidikan keaksaraan. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap peserta didik dimulai dari rekrutmen peserta didik, proses perencanaan program pendidikan keaksaraan, pelaksanaan program pembelajaran keaksaraan, serta dampak dari program pembelajaran keaksaraan. Peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, menghindari situasi formal. Untuk memperoleh data yang luas dan mendalam, peneliti mencoba dan memfokuskan pada materi tertentu secara bertahap, sampai diperoleh seluruh data yang diinginkan dan data yang diperoleh cukup memadai dan valid.
3. Studi dokumentasi, dilakukan dengan menelusuri, mempelajari, dan mendalami berbagai dokumen yang bersifat permanen dan tercatat antara lain lain : Gambaran umum lokasi penelitian, meliputi jumlah penduduk, kondisi secara social ekonomi, keadaan warga belajar peserta pendidikan keaksaraan dan karakteristiknya, keadaan penyelenggara, keadaan tutor, administrasi kegiatan program pendidikan keaksaraan, foto-foto tentang kegiatan pendidikan keaksaraan, data lain yang relevan untuk memperkaya informasi dalam penelitian ini.

Pengembangan instrumen dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek yang akan diukur sesuai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 6 (enam) aspek yang akan diukur, yakni (1) tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, (2) kondisi pengelolaan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus., (3) proses pembelajaran keaksaraan yang teradu dengan pembelajaran kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus (4) tingkat keberaksaraan masyarakat

nelayan di Jaring Halus setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan, (5) Kemampuan mengelola pendapatan pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, dan (6) Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus. Masing-masing variabel dijabarkan dalam sub-sub variabel dan setiap sub variabel dijabarkan lagi dalam aspek-aspek kajian sebagai bahan uraian terinci untuk menyusun butir-butir pertanyaan pada instrumen penelitian.

Analisa data hasil penelitian kualitatif adalah analisa naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi, karena penelitian kualitatif maka analisa data tidak selalu harus terkumpul semua, namun dilakukan secara berangsur-angsur. Penafsiran yang diberikan diarahkan pada menemukan esensial atau hal-hal yang mendasar dari kenyataan. Data atau informasi yang diperoleh dari sumber data disusun menurut katagorinya.

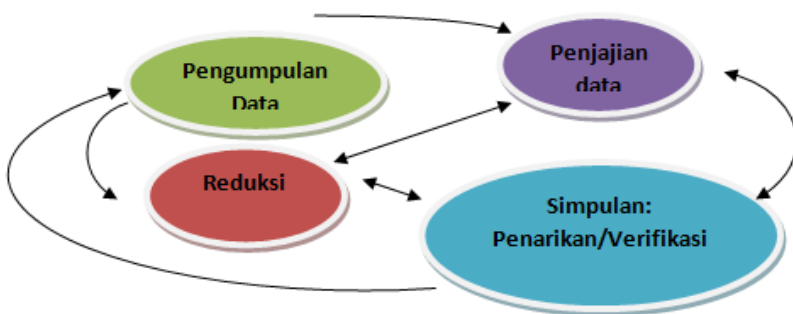
Dalam penelitian ini data hasil tes penilain keaksaraan warga belajar baik hasil tes awal maupun test akhir berkenaan dengan data mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung ditabulasikan, kemudian disusun dalam bentuk skor dan presentase. Selanjutnya dibandingkan dan dihitung peningkatan skornya. Data skor selanjutnya ditafsirkan (penafsiran data) secara kualitatif berdasarkan table standar mutu. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, (Moleong, 1991:188), yaitu:

1. Reduksi Data. Data yang diperoleh di lapangan akan diketik ulang dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal yang pokok, difokuskan kepada hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga data yang direduksi dapat memberikan suatu gambaran yang lebih mendalam (tajam) tentang hasil pengamatan dan wawancara.
2. Display Data. Display data dilakukan mengingat data yang terkumpul demikian banyak, sehingga data yang terkumpul atau tertumpuk akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rincian keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran di atas, dapat diatasi dengan cara

membuat model dan paradigma penelitian. Sehingga keseluruhan data sebagai bagian dari rincian dapat dipetakan dengan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi. Penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan data berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model dan paradigma penelitian, kemudian disimpulkan, sehingga makna data bisa ditemukan. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.
4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data. Untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dan hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Dalam penelitian kualitatif menggunakan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

Secara visual analisis data data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Gb. Model Analisis Data Kualitatif

Sumber: Moleong (1991)

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: teknik perpanjangan keikutsertaan, teknik triangulasi, dan teknik diskusi dengan teman sejawat dan para ahli/pakar. Perpanjangan keikutsertaan digunakan dengan cara menambah jumlah waktu penelitian selama dua bulan. Perpanjangan keikutsertaan peneliti di latar penelitian akan memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Teknik triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan dua cara, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori (Moleong, 1991:178; & Robson, 2005:174-176).

Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek-balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui key informan. Triangulasi dengan teori, berupa mengkonfirmasi data dengan teori. Dengan demikian data yang telah ditemukan dapat terjamin derajat kepercayaannya. Strategi triangulasi dilakukan melalui teknik diskusi dengan teman sejawat dan pakar ini dilakukan dengan cara menemui pengelola program pendidikan keaksaraan dan tim akademisi program keaksaraan untuk berkumpul dan mendiskusikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dari penelitian secara analitik. Dari diskusi inilah peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang kurang cocok atau kurang serasi dengan fokus penelitian. Penggunaan metode ini memungkinkan terhindarnya dari aspek subjektivitas. Dengan rancangan analisis data seperti yang telah dipaparkan di atas, diharapkan penelitian ini menghasilkan kesimpulan akhir yang valid sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pendidikan non formal dan Pendidikan Keaksaraan

1. Konsep Pendidikan non formal

a. Pengertian

Pendidikan merupakan upaya pembelajaran yang dilakukan secara sadar demi mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa. “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dewasa ini, ada 3 (tiga) jenis pendidikan yang berkembang di Indonesia yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, pada pasal 1 diuraikan:

Ayat (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; ayat (12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; ayat (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan non formal dan informal termasuk kedalam satuan pendidikan non formal dikarenakan pendidikan non formal mencakup seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan diluar sistem pendidikan formal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia lebih mengenal pendidikan non formal dengan istilah pendidikan nonformal.

Pendidikan non formal memiliki berbagai pelabelan pendidikan sesuai dengan perkembangan di negara masing-masing. Contohnya di Jepang, pendidikan non formal lebih dikenal dengan

istilah *social education* (pendidikan sosial). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustofa Kamil (2002:13) : “Pendidikan nonformal dengan berbagai atribut dan nama atau istilah lainnya, baik disebut dengan, *mass education, adult education, lifelong education, learning society, out-of-school education, social education*, dan lain-lain”.

Perbedaan pelabelan nama pada pendidikan nonformal disebabkan karena adanya titik pandang yang berbeda mengenai pendidikan nonformal. Perbedaan-perbedaan tersebut pada akhirnya melahirkan beberapa pendapat para ahli. Mengenai Pendidikan Non Formal, Santoso S. Hamijoyo (Mustofa Kamil, 2002: 13) menjelaskan:

Pendidikan non formal diselenggarakan melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan belajar, pengorganisasian kegiatan belajar, pelaksanaan belajar mengajar dan penilaian hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup dibidang materil, sosial dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sedangkan menurut Djudju Sudjana (2010:21) menjelaskan pengertian pendidikan non formal sebagai berikut:

Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem pendidikan persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajar.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan dimana tujuan dan kegiatan, serta programnya dirumuskan berdasarkan kebutuhan serta minat masyarakat yang bersangkutan yang tidak dapat terpenuhi di jalur persekolahan formal dalam rangka memotivasi masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan produktifitasnya untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

b. Tujuan Pendidikan non formal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah bab 1 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah .pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. Sedangkan tujuan pendidikan luar sekolah , antara lain :

- 1) Melayani warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
- 2) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- 3) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dari pendidikan sekolah.

Adapun menurut Djudju Sudjana (2010: 35) mengenai tujuan akhir diselenggarakannya Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal yaitu:

- 1) Perubahan kesejahteraan hidup lulusan yang ditandai dengan perolehan pekerjaan atau berwirausaha, perolehan atau peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan dan penampilan diri.
- 2) Membelajarkan orang lain terhadap hasil belajar yang telah dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh lulusan.
- 3) Peningkatan partisipasinya dalam kegiatan sosial dan atau pembangunan masyarakat, dalam wujud partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, dan dana.

Berdasarkan pendapat diatas, pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan untuk pembinaan masyarakat dengan tujuan memberikan perubahan pada pengetahuan, keterampilan serta sikap masyarakat sehingga masyarakat mampu memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya perubahan taraf hidup ke arah yang lebih baik, serta adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat.

c. Ciri-ciri Pendidikan non formal

Pendidikan non formal memiliki beberapa ciri, salah satunya yaitu pendidikan non formal bersifat lebih luwes daripada pendidikan formal. Selain itu, pendidikan nonformal pun bersifat lebih praktis serta waktu kegiatannya berlangsung lebih cepat dibandingkan pendidikan formal. Karakteristik pendidikan non formal yang dikemukakan oleh Djudju Sudjana (2009) yaitu :

- a) Jangka pendek dan khusus; b) Kurang menekankan pada ijazah; c) Relatif singkat; d) Menekankan masa sekarang; e) Menggunakan waktu tidak terus menerus; f) Kurikulum berpusat pada kepentingan-kepentingan peserta didik; g) Mengutamakan aplikasi; h) Persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik; i) Dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga; j) Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat; k) Struktur program yang luwes; l) Berpusat pada peserta didik; m) Penghematan sumber-sumber yang tersedia; n) Dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik dan; o) Pendekatan demokratis

d. Fungsi Pendidikan non formal

Pendidikan non formal berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan. Menurut Mustofa Kamil (2002:24):

Pendidikan nonformal sebagai *modes of learning*, memberikan akses pendidikan dan belajar lebih luas kepada warga belajar. Oleh karena itu warga belajar berpeluang untuk memiliki daya suai (*adaptability*), daya lentur (*flexibility*), kapasitas inovatif dan "*entepreneurial attitudes and aptitudes*". Sehingga warga belajar tertantang mencari dan memperkuat "*basic knowledge and competences, curiosity and motivations, critical and creative behaviors*" untuk menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan dirinya lebih mapan "*to know how to learn, how to be, and know how to become*: (a) belajar berahlak mulia; (b) Belajar untuk memahami; (c) Belajar berbuat; (d) Belajar hidup dalam kebersamaan; dan (e) Belajar mewujudkan jati dirinya.

Sedangkan fungsi pendidikan non formal untuk pendidikan formal adalah sebagai pelengkap, penambah dan pengganti pendidikan formal. Djudju Sudjana (2010: 67-73) mengemukakan:

- 1) Pendidikan nonformal sebagai pelengkap pendidikan formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam kurikulum pendidikan formal.
- 2) Pendidikan nonformal sebagai penambah pendidikan formal bertujuan menyediakan kesempatan belajar kepada tiga kategori peserta didik. Pertama, para siswa suatu jenjang pendidikan formal yang membutuhkan kesempatan belajar guna memperdalam pemahaman dan penguasaan materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mereka mengikuti program pendidikan tersebut. Kedua mereka yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan formal dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas pemahaman dan penggunaan materi pelajaran yang telah diperoleh. Ketiga mereka yang putus sekolah dan mempunyai kebutuhan belajar untuk memperoleh pengetahuan baru dan keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat.
- 3) Pendidikan nonformal sebagai pengganti pendidikan formal menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa, yang karena berbagai alasan, tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki pendidikan formal.

Dari beberapa paparan diatas, pendidikan non formal memiliki fungsi memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat dengan berbagai latar belakang yang mereka miliki untuk memperoleh pendidikan sebagai salah satu upaya meningkatkan taraf hidupnya.

e. Pendidikan Non Formal dalam Menanggulangi Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan masalah global, yang tidak dapat diselesaikan dalam kajian yang bersifat lokal saja. Namun harus ada kajian secara menyeluruh dan meliputi aspek-aspek yang berkaitan. Penyelesaian masalah kemiskinan berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Hal ini sangat erat dipengaruhi

oleh adanya kondisi geografis, demografis, politis dan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Dua pandangan teoritis tentang penanggulangan kemiskinan adalah teori neo-liberalis dan demokrasi-sosial.

Dalam studinya Eriek Triputro H (2012: 2) menjelaskan bahwa kaum neo-liberal memandang strategi penangan kemiskinan yang melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan. Sebaliknya pendukung demokrasi-sosial meyakini bahwa penanganan kemiskinan yang bersifat “residual” berorientasi proyek jangka pendek, justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya juga singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila kaum neo-liberalis melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat “kebebasan”, kaum demokrasi-sosial justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan” karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya.

Dalam konteks Indonesia, peran-peran utama tidaklah berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Namun partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial serta kepedulian individu untuk memulai diri menjadi peduli terhadap kondisi sesama di sekitar lingkungan merupakan upaya minimal yang dapat dilakukan. Sehingga kebiasaan yang muncul untuk menggantungkan diri pada penyelesaian yang berasal dari kebijakan pemerintah dapat dikurangi. Maka dari itu upaya untuk menyejahterakan sosial secara kelembagaan maupun individu adalah bermatra pada kesadaran untuk berdaya merubah kondisi yang ada. Utamanya adalah mengenai masalah kemiskinan yang selalu meingkat di negara tercinta ini.

Pendidikan non formal sebagai salah satu jalur pendidikan memiliki kepentingan dalam pemberantasan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan. Konsep Pemberdayaan kaitannya dengan aspek kemiskinan, lebih dimaknai sebagai suatu proses yang mengangkat berubah individu dan kelompok sosial, yang mencakup (1) perubahan sikap, masyarakat miskin didorong, dibimbing dan

dibantu kearah perilaku prososial yang normatif, (2) peningkatan partisipasi sosial, (3) peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat, melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga, khususnya warga miskin (Eriek Triputro H, 2012:4).

Melalui program-program Pendidikan Non Formal, diharapkan upaya pemberantasan kemiskinan mealui kegiatan pemberdayaan dapat merubah sifat warga miskin yang apatis, malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan.

2. Batasan Konsep Keaksaraan

Program pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Non Formal bagi masyarakat yang belum dan ingin memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) yang bersifat fungsional bagi kehidupannya. Coombs mengatakan bahwa pendidikan keaksaraan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki daya ungkit bagi pembangunan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang.

Menurut John Hunter (Kusnadi, 2005:78) ada tiga kategori dasar tentang definisi keaksaraan, dimana setiap kategori didasari oleh asumsi yang sangat berbeda dari peran keaksaraan dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. *Literacy as set basic skill, abilities or competencies* (keaksaraan merupakan seperangkat keterampilan dan kemampuan atau kompetensi dasar);
- b. *Literacy as the necessary foundation for higher quality of life* (Keaksaraan sebagai dasar yang penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik);
- c. *Literacy as reflection of political and structural realities* (Keaksaraan merupakan refleksi dari kebijakan dan kenyataan struktural).

UNESCO mendefinisikan keaksaraan atau melek aksara sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana yang dibutuhkan atau dikenal dalam kehidupan sehari-

hari. Seseorang memiliki kemampuan keaksaraan fungsional jika seseorang tersebut dapat terlibat dalam aktivitas dimana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai fungsi yang efektif, sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Pada pelaksanaannya bahwa keaksaraan fungsional adalah sebuah pendekatan dalam menerampilkkan warga belajar membaca, menulis dan berhitung (calistung) yang diintegrasikan dengan kegiatan ekstra yang dibutuhkan, sehingga pada akhirnya warga belajar bukan hanya cakap calistung tetapi dengan hasil belajarnya dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.

Untuk menjamin agar pengetahuan yang diajarkan dalam suatu pembelajaran keaksaraan benar-benar fungsional sesuai dengan kebutuhan perorangan warga belajar atau masyarakat, maka kriteria atau ukuran pembelajaran keaksaraan berikut perlu diperhatikan:

- a. Kesadaran, warga belajar baik perseorangan atau kelompok hendaklah didasarkan terhadap keadaan dimana mereka hidup dan bekerja. Mereka perlu dimotivasi untuk membuat suatu analisis tentang faktor-faktor yang berperan pada masalah yang mereka hadapi dan didorong untuk memikirkan cara-cara yang mungkin digunakan sehingga mereka terbantu untuk mengubah situasi mereka ke arah yang lebih baik;
- b. Fungsionalitas, program keaksaraan hendaklah berkaitan secara praktis dengan lingkungan hidup, pekerjaan dan situasi keluarga warga belajar;
- c. Fleksibilitas, program keaksaraan hendaklah memungkinkan untuk dimodifikasi, ditambah dan dikurangi sehingga menjadi responsive terhadap kebutuhan warga belajar dan persyaratan lingkungan hidup;
- d. Keanekaragaman, hendaknya program keaksaraan cukup beragam untuk dapat menampung minat dan kebutuhan kelompok tertentu;
- e. Ketetapan hubungan belajar, pengalaman dan kemampuan potensi dari warga belajar orang dewasa dan kebutuhannya

hendaklah mempengaruhi hubungan tutor dan warga belajar, dibangun pada hal-hal yang telah diketahui dan dapat dilakukan oleh warga belajar; Berorientasi tindakan, program keaksaraan hendaklah bertujuan untuk memobilisasi warga belajar melakukan tindakan atau berbuat untuk memperbaiki kehidupan mereka.

3. Landasan Pendidikan Keaksaraan

Aksara adalah jendela dunia, pintu bagi sebuah pendidikan. Namun Indonesia masih saja bersibuk-sibuk dengan pemberantasan buta aksara. Padahal upaya pemberantasannya sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Tapi kenapa buta aksara tak kunjung terberantas. Apa sesungguhnya masalah yang terjadi? Peran aksara sangat krusial dan sangat besar pula sumbangannya bagi Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) tak terbantahkan.

Berdasarkan data pada badan pusat statistik nasional kecantumkan bahwa, mayoritas penduduk Indonesia atau sebanyak 90,4 % sudah melek huruf. Artinya, masih tersisa 9,6 % penduduk yang masih buta aksara dan itu berjumlah sekitar 14,8 juta orang, tersebar dari usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2005, program pemberantasan buta aksara hanya berhasil mencapai 800 juta dari 1,7 juta orang yang menjadi target. Sisa target yang belum tercapai sebanyak 900 ribu akan ditambahkan ke target tahun 20011 yakni 1,5 juta orang. (BPS tahun 2010).

Program penurunan buta aksara telah dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, namun perlu adanya penanganan yang lebih sinergis agar dapat diperoleh hasil yang lebih optimal. Kerja sama lintas sektor perlu lebih diintensifkan untuk dapat diperoleh hasil yang maksimal, karena penurunan buta aksara tidak maksimal jika buta aksara baru terus bertambah.

Berbagai kebijakan telah dibuat oleh Pemerintah, salah satunya adalah upaya meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20% dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 45 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi semua

kebijakan akan lebih berhasil jika peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan lebih ditingkatkan termasuk peran dan fungsi Komite Sekolah, Perguruan Tinggi dan Dewan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Paradigma untuk pendidikan keaksaraan secara global saat ini mengalami perluasan makna. Pendidikan keaksaraan saat ini bukan hanya berfokus pada masalah kesenjangan kecakapan membaca, menulis dan berhitung, tetapi hal itu juga menyangkut kecakapan-kecakapan tertentu dan penguasaan keterampilan praktis yang kontekstual dan selaras dengan perubahan peradaban manusia yang melahirkan konsekuensi logis tentang adanya tuntutan-tuntutan baru terhadap setiap individu.

Problem seperti ini akan menciptakan kesenjangan yang hanya bisa dijabatani oleh pendidikan, khususnya pendidikan nonformal. Pendidikan keaksaraan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan nonformal inipun tidak terlepas dari tugas dan fungsinya sebagai pelengkap (suplemen), penambah (komplemen), dan pengganti (substitusi) yang tercipta dari suatu sistem pendidikan secara menyeluruh.

4. Tujuan Pendidikan Keaksaraan

Tujuan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dalam pemberantasan buta aksara dipaparkan oleh banyak ahli. Secara spesifik Kusnadi, (2005:93) memaparkan enam tujuan pendidikan keaksaraan yaitu sebagai berikut:

- a. Membelajarkan masyarakat buta aksara (warga belajar) agar mampu membaca, menulis, dan berhitung serta berbahasa indonesia; memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang benar-benar bermanfaat bagi peningkatan mutu dan taraf hidupnya.
- b. Mengembangkan kemampuan warga belajar dalam memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapi oleh mereka.

- c. Melatih warga belajar untuk menggunakan keterampilan dan kompetensi keaksaraan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Memotivasi warga belajar sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri dengan menggunakan kompetensi keaksaraan.
- e. Mengembangkan kemampuan berusaha dan bermatapencaharian sehingga mampu meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.
- f. Mengembangkan kemampuan dan minat baca warga belajar sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat gemar membaca dan masyarakat belajar .

5. Prinsip Pendidikan Keaksaraan

Terdapat empat prinsip utama yang perlu dipahami dalam pembelajaran keaksaraan fungsional (Kusnadi, 2005:23) yaitu sebagai berikut:

a. Konteks Lokal

Agar pembelajaran keaksaraan fungsional (KF) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka bahan belajar harus digali dari konteks lokal. Bahan belajar harus bermanfaat bagi kehidupan warga belajar sehari-hari. Kebutuhan warga belajar untuk mengembangkan program pembelajaran KF yang benar-benar bermutu dan relevan dengan kehidupannya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pembelajaran yang dilaksanakan di kelompok belajar yang diteliti menggunakan prinsip kontek lokal ini dijadikan sebagai dasar untuk menyusun bahan belajar warga belajar yang di sepakati dalam identifikasi kebutuhan warga belajar.

b. Desain Lokal

Unsur-unsur yang berkaitan dengan pembelajaran KF seperti: tujuan, kelompok sasaran, bahan belajar, sarana belajar, kegiatan belajar, waktu belajar, tempat belajar dan unsur penting lainnya harus dirancang sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi lokal

dimana kelompok belajar berada. Perlu juga dibuat kesepakatan belajar, rencana pembelajaran dan pemilihan kegiatan belajar atas dasar minat, kebutuhan, dan harapan kelompok belajar serta dirancang sesuai dengan karakteristik warga belajar.

c. Proses Partisipatif

Program pendidikan keaksaraan harus mampu memobilisasi warga belajar untuk melakukan beragam tindakan atau perbuatan sehingga dapat mengembangkan ragam keterampilan yang bermanfaat untuk memperbaiki mutu kehidupan dan taraf hidup warga belajar. Pendidikan keaksaraan fungsional harus berorientasi pada tindakan, dan semua unsur yang terlibat di dalamnya harus secara aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam keseluruhan kegiatan.

d. Fungsionalisasi Hasil Belajar

Program pendidikan keaksaraan seyogyanya dimulai dari hal-hal yang telah diketahui dan dapat dilakukan oleh warga belajar, sehingga pengalaman, kemampuan, minat dan kebutuhan belajar mereka hendaknya menjadi dasar dalam menjalin hubungan yang harmonis dan dinamis antara tutor dengan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran.

6. Karakteristik Pendidikan Keaksaraan

Karakteristik pendidikan keaksaraan dari berbagai tingkatan merupakan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bila dilihat dalam tiga tahapan pembelajaran yaitu tingkat aksara dasar, aksara lanjutan dan aksara mandiri. Dari tiga tingkatan tersebut pada hakikatnya memiliki karakteristik yang cukup berbeda mulai dari sasaran, materi belajar dan waktu pembelajaran. Ketiga karakteristik pendidikan keaksaraan sebagai berikut:

a. Tingkat Dasar, Indikator dari keaksaraan tingkat dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Buta huruf murni, kelompok ini dapat dikategorikan pada masyarakat yang tidak beruntung, karena sama sekali

mereka tidak pernah menerima layanan pendidikan sekolah;

- 2) Penduduk yang pernah menikmati pendidikan sekolah, namun drop out yang disebabkan oleh berbagai alasan seperti lemah kemampuan ekonominya atau tidak puas dengan layanan pendidikan;
- 3) Kelompok masyarakat yang sebenarnya telah bisa membaca, namun kemampuan menulisnya lemah, hal ini disebabkan minimnya latihan dan atau kemampuan membaca dan menulis yang telah dimilikinya itu tidak biasa dipergunakan kembali;
- 4) Kelompok masyarakat yang telah mengenal huruf dan juga bilangan, namun tidak bisa merangkainya. Hal ini disebabkan oleh minimnya latihan dan tidak ada rangsangan untuk mau dan mampu membelajarkan diri;
- 5) Penduduk yang telah mengenal huruf, namun apabila dihadapkan pada huruf-huruf ganda seperti ng, ny dan kh mengalami kesulitan untuk membacanya.

b. Tingkat Lanjutan

Indikator dari pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan sebagai berikut:

- 1) Lulusan pendidikan keaksaraan tingkat dasar yang masih rawan dan memungkinkan buta aksara kembali jika tidak ditingkatkan lagi kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi;
- 2) Warga masyarakat lain yang sudah mengenal huruf, bisa membaca, menulis dan berhitung akan tetapi masih perlu bantuan dan bimbingan seorang tutor;
- 3) Penekanan pembelajaran pada fungsionalisasi hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan warga belajar, seperti mulai dikenalkan nya kecakapan vokasional sesuai dengan minat dan potensi lingkungan warga belajar

c. **Tingkat Mandiri**

Indikator dari pendidikan keaksaraan tingkat mandiri sebagai berikut:

- 1) Lulusan pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan yang masih perlu ditingkatkan lagi kemampuan calistungkom-nya agar mampu mandiri dan secara berkelanjutan memelihara dan memanfaatkan kemampuannya secara fungsional agar dapat memahami dunia dan berhasil mengangkat derajat hidupnya;
- 2) Warga masyarakat yang sudah memiliki kemampuan calistungkom dan berbahasa indonesia akan tetapi perlu bantuan dalam pengayaan dan penyediaan bahan belajar yang sesuai kebutuhan nya;
- 3) Penekanan pembelajaran pada fungsionalisasi hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan warga belajar melalui pendidikan keterampilan tertentu sesuai dengan minat dan potensi lingkungan warga belajar.

B. Model Pembelajaran Keaksaraan

1. Konsep Model Pembelajaran Keaksaraan

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi model pembelajaran cenderung preskriptif, yang relatif sulit dibedakan dengan strategi pembelajaran. Dalam pemikiran Burden & Byrd, (1999 :85) dijelaskan “..... *An instructional strategy is method of delivering instruction that is intended to help students achieve a learning objective*”.

Selain memperhatikan rasional teoretik, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai, model pembelajaran memiliki lima unsur dasar sebagaimana diungkapkan Joyce & Weil (1980), yaitu (1) syntak, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran, (2) social system, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran, (3) principles of reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa, (4) support

system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran, dan (5) instructional dan nurturant effects-hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar (*instructional effects*) dan hasil belajar di luar yang disasar (*nurturanteffects*).

Di dalam pembelajaran keaksaraan fungsional, peranan tutor sangat menunjang kelancaran pembelajaran untuk warga belajar. Pada umumnya sasaran dari program keaksaraan fungsional terdiri dari masyarakat, orang dewasa yang belum melek aksara. Selama ini program pembelajaran keaksaraan fungsional tersebut telah berjalan, tetapi hasilnya kurang maksimal. Hal itu terjadi akibat pemilihan metode pembelajaran yang masih konvensional seperti halnya persekolahan.

Strategi pembelajaran pada pendidikan keaksaraan fungsional lebih tepat menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, yang diselenggarakan melalui belajar dari pengalaman sendiri (*Self learning experiences*) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menganalisis dan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan setempat dan sumber daya masyarakat. Sasaran melek aksara biasanya terdapat di daerah pedalaman yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sering melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya pengajian. Oleh karena itu, dari kegiatan tersebut mereka sudah dapat membaca tulisan dengan huruf arab dan huruf pegon, tetapi belum dapat membaca huruf latin.

Aspek metode pembelajaran sangat penting mendapat perhatian karena tiga alasan. Pertama, metode pembelajaran merupakan variable manipulative, artinya setiap tutor memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan berbagai metode pengajaran sesuai dengan karakteristik materi pembelajarannya. lagi pula, struktur isi pelajaran sesuai merupakan variable pembelajaran di luar control tutor karena merupakan wewenang pemerintah. kedua, metode pembelajaran memiliki fungsi sebagai instrument yang membantu atau memudahkan warga belajar dalam memperoleh sejumlah pengalaman belajar.

Materi pembelajaran yang memiliki tingkat kesulitan akan terasa mudah jika tutor mampu meramu dan menyajikan dengan menerapkan metode pembelajaranyang menarik bagi warga belajar. Ketiga, pengembangan metode pembelajaran dalam konteks peningkatan mutu perolehan hasil belajar perlu diupayakan secara terus-menerus dan bersifat komprehensif karena proses pembelajaran merupakan faktor determinan terhadap mutu hasil belajar. Hal ini makin menarik untuk diperhatikan seiring dengan kuatnya tuntutan terhadap mutu pendidikan nonformal.

2. Jenis-Jenis Model Pembelajaran Keaksaraan

a. Model Pemrosesan

Model-model yang berorientasi pada kemampuan pemrosesan informasi dari siswa dan cara memperbaiki kemampuannya dalam menguasai informasi, merujuk pada cara orang menangani stimulus dari lingkungannya, mengorganisasikan data, menginderaai masalah, melahirkan konsep dan pemecahan masalah, dan menggunakan symbol verbal dan non-verbal. Sungguhpun model-model yang termasuk kedalam rumpun ini berkesan akademik namun tetap akan hubungan sosial dan pengembangan diri.

Model-model yang termasuk dalam rumpun ini antara lain adalah; Model Berpikir (*Inquiry Training Model*), Inquiri ilmiah (*Scientific Inquiry*), Perolehan Konsep (*Concept*), Model Advance Organizer (*Advance Organizer Model*), dan Ingatan (*Memory*). Model berpikir yang dikembangkan Hilda Karli (2002:3-5), dirancang terutama untuk pengembangan proses mental induktif dan penalaran akademik atau pembentukan teori, namun kapasitasnya berguna pula untuk pengembangan personal dan sosial.

b. Model Personal

Model-model yang termasuk kedalam rumpun personal berorientasi pada pengembangan diri individu, model-model ini menekankan proses pembentukan individu dalam mengorganisasikan realitasnya yang unik. Fokus pengembangan diri berkesan menekankan pada pembinaan emosional antara individu dalam

hubungan produktif dengan lingkungannya hingga diharapkan menghasilkan hubungan produktif dengan lingkungannya hingga diharapkan menghasilkan hubungan interpersonal yang lebih kaya dan kemampuan pemrosesan yang lebih efektif lagi.

Terliput kedalam rumpun ini adalah; Pengajaran Non-Direktif (*Non-directive Teaching*), Pelatihan Kesadaran (*Awareness Training*), Sinektic (*Synectics*), Sistem Konseptual (*Conceptual System*) dan Pertemuan Kelas (*Classroom Meeting*).

c. Model Interaksi Sosial

Model-model Pembelajaran yang termasuk rumpun Interaksi Sosial, menekankan hubungan antara individu dengan masyarakat dan dengan individu lainnya. Fokus model ini terletak pada proses dimana dengan proses ini realistis dinegosiasi memberikan prioritas pada perbaikan kemampuan individu untuk berhubungan dengan yang lainnya, bergelut dengan proses demokratik dan bekerja secara produktif dalam masyarakat.

Termasuk ke dalam rumpun model ini, antara lain : Investigasi Kelompok (*Group Investigation*), Inkuiri Sosial (*Social Inquiry*), Metode Laboratorium (*Laboratory Method*), Yudisprudensial (*Yyurisprudential*), Bermain Peran (*Role Playing*) dan Simulasi Sosial (*Social Simulation*).

d. Model Behavioral

Model-model yang termasuk ke dalam rumpun behavioral berpijak pada landasan teoritis yang sama, yakni teori tingkah laku (*Behavioral Theory*). Dalam penerapannya, model ini banyak menggunakan istilah lain seperti teori belajar, teori belajar sosial, modifikasi tingkah laku, dan terapi tingkah laku.

Ciri pokoknya menekankan pada usaha mengubah tingkah laku teramati ketimbang struktur psikologis yang mendasarinya dan tingkah laku yang tidak teramatinya. Model ini mendasarkan pada prinsip control stimulus dan penguatan (*Stimulus Control and Reinforcement*). Lebih dari model lainnya model behavioral memiliki ketepakaian yang luas dan teruji keefektifannya pada aneka tujuan seperti pendidikan, pelatihan, tingkah laku interpersonal dan

pengobatan. Tercakup kedalam model ini, antar lain; Manajemen Kontingensi (*Contingency Management*), Kontrol Diri (*Self Control*), Relaksasi (*Relaxation*), Reduksi Stress (*Stress Reducation*), Pelatihan Asertif (*Assertive Training*), Desentisasi (*Desensitization*) dan Pelatihan Langsung (*Direct Training*).

e. Model Inkuiri

Model Inkuiri adalah salah satu model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir reflektif kritis, dan kreatif, Inkuiri adalah salah satu model pembelajaran yang dipandang modern yang dapat dipergunakan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai tingkat pendidikan dasar hingga menengah.

Pelaksanaan inkuiri didalam pembelajaran pengetahuan Sosial dirasionalkan pada pandangan dasar bahwa dalam model pembelajaran tersebut, siswa didorong untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui kegiatan belajar mandiri.

Model inkuiri pada hakekatnya merupakan penerapan metode ilmiah khususnya dilapangan Sains, namun dapat dilakukan terhadap berbagai pemecahan problem sosial. Savage Amstrong mengemukakan bahwa model tersebut secara luas dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran dengan model inkuiri dipandang sangat sesuai dengan karakteristik materi pendidikan Pengetahuan Sosial yang bertujuan mengembangkan tanggungjawab individu dan kemampuan berpartisipasi aktif baik sebagai anggota masyarakat dan warga Negara.

f. Model Pembelajaran VCT

VCT (*Value Clarification Technique*) adalah salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Model Pembelajaran VCT merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali/mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena itu, pada prosesnya VCT berfungsi untuk a) mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu

nilai; *b)* membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik yang positif maupun yang negative untuk kemudian dibina kearah peningkatan atau pembetulannya *c)* menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya. Model pembelajaran VCT dimaksudkan untuk melatih dan membina siswa tentang bagaimana cara menilai, mengambil keputusan terhadap suatu nilai umum untuk kemudian dilaksanakannya sebagai warga masyarakat.

g. Model Bermain Peta

Keterampilan menggunakan dan menafsirkan peta dan globe merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran Pengetahuan Sosial. Keterampilan menginterpretasi peta maupun globe perlu dilakukan peserta didik secara fungsional.

Peta dan globe memberikan manfaat , yaitu ; *a)* siswa dapat memperoleh gambaran mengenai bentuk, besar, batas-batas suatu daerah; *b)* memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai istilah-istilah geografi seperti: pulau, selat, semenanjung, samudera, benua dan sebagainya; *c)* memahami peta dan globe, dipelukan bebrapa syarat yaitu : (a) arah, siswa mengerti tentang cara menentukan tempat di bumi seperti arah mata angin, meridian, paralel, belahan timur dan barat; (b) skala, merupakan model atau gambar yang lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya; (c) lambing-lambang, merupakan symbol-simbol yang mudah dibaca tanpa ada keterangan lain; (d) warna, menggunakan berbagai warna untuk menyatakan hal-hal tertentu misalnya: laut, beda tinggi daratan, daerah, Negara tertentu dsb.

h. Model Role Playing

Role Playing adalah salah satu model pembelajaran yang perlu menjadi pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran Pengetahuan Sosial dan Kewarganegaraan didalamnya. Sebagai langkah teknis, *role playing* sendiri tidak jarang menjadi pelengkap kegiatan pembelajaran yang dikembangkan

dengan *stressing* model pendekatan lainnya, seperti onkuiri, ITM, Portopolio, dan lainnya.

Secara komprehensif makna penggunaan *role playing* antara lain: 1) untuk menghayati sesuatu/hal/kejadian sebenarnya dalam realitas kehidupan; 2) agar memahami apa yang menjadi sebab dari sesuatu serta bagaimana akibatnya; 3) untuk mempertajam indera dan perasaan siswa terhadap sesuatu; 4) sebagai penyaluran/pelepasan tensi (*kelebihan energy psykhis*) dan perasaan-perasaan; 5) sebagai alat diagnose keadaan; 6) ke arah pembentukan konsep secara mandiri; 7) menggali peran-peran dari pada dalam suatu kehidupan/kejadian/keadaan; 8) menggali dan meneliti nilai-nilai (norma) dan peranan budaya dalam kehidupan; 9) membantu siswa dalam mengklarifikasikan (memperinci) pola pikir, berbuat dan keterampilannya dalam membuat/ mengambil keputusan menurut caranya sendiri; 10) membina siswa dalam kemampuan memecahkan masalah.

3. Strategi Pembelajaran Pendidikan Keakasaraan

Secara sempit strategi dalam pembelajaran mempunyai kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara luas, strategi dalam pembelajaran diartikan dengan cara "Penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan belajar, termasuk dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil belajar" (Ishak Abdulhak 2000:49).

Walaupun kedua pendekatan tersebut berbeda, namun pada hakekatnya mempunyai kesamaan bahwa strategi ditujukan kepada cara atau usaha yang digunakan dalam pencapaian tujuan belajar.

Menurut Djudju Sudjana (2005:5) "strategi berasal dari kata benda, *strategos* merupakan gabungan kata *stratos* (militer) dengan *ago* (memimpin)". Sebagai kata kerja, *stratego* berarti merencanakan (*to plan*). Senada dengan pendapat tersebut, Kusnadi (2005:151) menjelaskan pengertian strategi adalah pola umum tentang keputusan dan tindakan. Berbagai strategi pembelajaran kiranya

dapat dipahami sebagai suatu cara yang dipilih dan ditetapkan oleh tutor untuk mempermudah proses pembelajaran

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu pola rancangan kegiatan yang telah direncanakan dan disusun sedemikian rupa dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, strategi ini mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan.

Strategi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan belajar harus dirancang dan direncanakan sesuai dengan karakteristik peserta, yaitu bagaimana latar belakang pendidikan, prinsip nilai yang dianut, apa kebutuhan dan harapan peserta pada saat ini, serta pengalaman apa yang dimilikinya, sehingga akan memberikan alternatif solusi dari kebutuhan dan masalah yang dimilikinya.

Adapun penetapan keseluruhan aspek dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil belajar merupakan tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pembelajaran keaksaraan, adalah suatu penentuan urutan tindakan, perkiraan kegiatan, serta penggunaan waktu untuk suatu kegiatan pembelajaran keaksaraan yang didasarkan atas data tentang kebutuhan, potensi dan sumberdaya di sekitar warga belajar, dengan memperhatikan prioritas yang wajar dan efisien untuk tercapainya tujuan pembelajaran.
- b. Proses pembelajaran, adalah interaksi edukatif antara peserta dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Komponen – komponen yang terlibat dalam pembelajaran ini terdiri dari :
 - 1) Keluaran (*output*)
 - 2) Proses pembelajaran (*learning proses*)
 - 3) Masukan mentah (*raw input*)
 - 4) Masukan sarana (*instrumental input*)
 - 5) Masukan lingkungan (*enviromental input*)

- c. Evaluasi atau penilaian pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui kemajuan warga belajar (WB) selama mengikuti program pendidikan keaksaraan. Mengacu pada tujuan program pendidikan keaksaraan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baca-tulis-hitung dan kemampuan fungsional warga belajar, maka dalam rangka mengetahui sejauh mana kemampuan tersebut perlu dilaksanakan penilaian secara bertahap, berkala, rutin dan teratur.

Dalam menetapkan strategi dan metode perlu memperhatikan 5 kriteria, yaitu :

- a. Pemilihan dan penetapan strategi dan metode harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai;
- b. Memperhatikan materi (bahan ajar) yang akan disampaikan kepada warga belajar dengan berbagai karakteristiknya sebagai orang dewasa;
- c. Media belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran;
- d. Tingkat kemampuan dan kemudahan warga belajar dalam menyerap dan memahami materi pembelajaran; dan
- e. Memperhatikan efektifitas, efisiensi, daya tarik media, dan iklim/suasana pembelajaran di kelompok belajar.

Sehingga kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung bukan semata-mata tergantung pada tutor, tetapi juga sangat tergantung pada kebutuhan belajar WB dalam mempelajari materi belajar, serta strategi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut.

4. Jenis – jenis Strategi dan Metode Pembelajaran Keaksaraan

Jenis dan strategi pembelajaran dalam pendidikan keaksaraan menjadi sangat penting mengingat sasaran pendidikan adalah masyarakat yang relatif sudah dewasa dan memiliki keterbatasan waktu belajar. Untuk itu diperlukan berbagai macam strategi dan metode yang dapat dijadikan pendekatan dalam pembelajaran

pendidikan keaksaraan. Susan Yulianti (2009:36-41) menjabarkan strategi dan metode pembelajaran keaksaraan sebagai berikut:

a. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

PRA merupakan suatu strategi dan metode pengkajian pedesaan secara partisipatif yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan (Chambers:1992:5).

Metode ini dikembangkan pada pendidikan keaksaraan sejak tahun 1995, dengan dasar pemikiran bahwa : Pertama, metode PRA merupakan suatu pendekatan pengembangan masyarakat yang benar-benar mampu melibatkan masyarakat dan terkait erat dengan cara pembelajaran dalam program keaksaraan fungsional; Kedua, dalam metode PRA tercakup cita-cita dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat diupayakan agar memiliki pandangan terbuka terhadap keadaan kehidupannya sendiri dan lingkungannya, serta memiliki kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Ketiga, metode PRA merupakan salah satu pendekatan partisipatif dalam pembelajaran pada program KF yang ternyata sangat cocok digunakan dalam program ini, karena selain adanya pemunculan ide-ide murni yang berasal dari warga belajar sendiri, mempermudah terjadinya proses diskusi antar warga belajar, juga adanya tindakan/aksi bersama di antara mereka. Keempat, Metode PRA sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran di kelompok belajar. Karena warga belajar dapat belajar untuk mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki setiap warga belajar.

Alasan lain digunakan metode PRA adalah karena metode ini mengandung unsur pergerakan individu dalam kelompok atau masyarakat secara keseluruhan dan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (aspek gender), antara warga belajar dan tutor dan adanya interaksi antara teori dan praktek dan antara warga belajar dengan lembaga-lembaga/instansi yang ada di sekitar lingkungan warga belajar.

b. *Reflect*

Reflect merupakan singkatan dari *Regenerated Frerian Literacy Through Empowering Community Techniques* (pengembangan kembali teori keaksaraan Paulo Frerian melalui teknik pemberdayaan masyarakat). Metode ini memperlihatkan adanya proses penyatuan antara kegiatan keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat.

Alasan digunakan metode *reflect*, tercakup cita-cita dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat sasaran, diupayakan agar memiliki pandangan terbuka terhadap keadaan kehidupannya sendiri dan lingkungannya, serta memiliki kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Proses pembelajaran dengan metode ini melalui daur sebagai berikut :

Refleksi $\longrightarrow$ aksi $\longrightarrow$ refleksi kembali.

Prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini adalah masyarakat sendiri yang berfikir dan berbuat (*reflection - action*) terhadap dan di dalam dunia kehidupannya.

c. *Problem Possing* (Pemunculan Masalah)

Problem passing merupakan suatu metode untuk memunculkan masalah baik individu maupun kelompok yang kurang disadari oleh pelakunya. Ada dua hal yang sangat berkaitan dengan metode ini, yaitu : "bagaimana memunculkan masalah" dan "bagaimana membuat pertanyaan kunci". Pemunculan masalah adalah suatu cara menggali dan memunculkan masalah yang bermanfaat secara detail, untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemecahan masalah tersebut.

Sedangkan, "pertanyaan kunci" adalah suatu cara menggunakan pertanyaan-pertanyaan penting untuk "membuka pintu diskusi".

d. *Language Experience Approach (LEA)*

Pendekatan LEA atau Pendekatan Pengalaman Berbahasa (PPB). Metode ini mampu memotivasi warga belajar membuat bahan belajar sendiri sesuai dengan materi yang ingin dipelajarinya. Dalam proses pembelajaran di kelompok belajar keaksaraan ini, warga belajar diminta mengucapkan suatu kalimat kemudian ditulis sendiri atau oleh tutor, selanjutnya mereka "belajar membaca melalui kegiatan menulis sendiri" tersebut.

Alasan penggunaan metode ini adalah untuk menghilangkan ketergantungan terhadap buku atau modul yang diterbitkan oleh pusat (*top-down*), dan meminimalisasi anggapan bahwa program baru akan dilaksanakan jika sudah disediakan buku/modulnya.

e. *Structure – Analytic – Synthesis (SAS)*

Metode SAS menekankan bahwa belajar membaca dan menulis dapat bermanfaat serta menarik minat warga belajar, apabila menggunakan berbagai informasi yang dekat dengan diri mereka. Ketertarikan itu, akan bertambah lagi jika apa yang dipelajarinya memang diperlukan oleh warga belajar dan fungsional bagi kehidupannya. Warga belajar diajak untuk mensintesis kalimat, menganalisis kalimat, untuk kemudian mensintesisnya lagi.

f. *Kata Kunci (Key Words)*

Merupakan metode yang berbasis pada proses penyadaran warga belajar tentang dunia kehidupannya. Salah satu teknik yang digunakan adalah menyajikan gambar-gambar yang melukiskan situasi kehidupan nyata dalam bentuk simbol atau gambar. Alasan penggunaan metode ini adalah berdasarkan pertimbangan pentingnya menghubungkan baca – tulis – hitung dengan kehidupan nyata sehari-hari.

g. *Suku Kata*

Metode suku kata sangat efektif untuk membantu warga belajar dalam mengenal kata. Dalam metode ini adalah mempelajari suku kata yang berasal dari kata-kata tertentu yang sering dilafalkan

dan memiliki makna yang jelas, dengan prinsip mengulangi, menghafal dan melatih tentang semua huruf baik konsonan maupun vokal yang membentuk suku – kata tersebut.

h. Poster Abjad

Pada metode poster abjad, yaitu mengenalkan huruf dengan menggunakan benda-benda nyata yang ditempelkan sesuai huruf pertama pada nama benda tersebut. Warga belajar menyamakan huruf-huruf yang terdapat dalam benda tersebut dengan mencocokkannya pada poster abjad. Kemudian tutor meminta mereka mengulangi, menghafal, dan berlatih tentang semua huruf baik konsonan maupun vokal yang terdapat dalam poster itu.

5. Pola Pembelajaran Keaksaraan Fungsional

Secara garis besar, pola pembelajaran keaksaraan terdiri atas tiga langkah strategi kegiatan yaitu:

a. Pembelajaran Membaca

Untuk meningkatkan keterampilan membaca warga belajar, ada beberapa strategi dan metode, yaitu :

1) Mengeluarkan Perkataan

Metode ini adalah membentuk warga belajar merangkai kata dalam bentuk ucapan menjadi kalimat yang utuh dan memiliki kesatuan makna. Karena bila warga belajar membaca kata demi kata dengan jeda yang lama, biasanya makna/artinya hilang. Warga belajar perlu memahami bahwa kata-kata yang disusun dalam bentuk satu ucapan, maka akan ada makna/artinya, langkahnya :

- a) Membaca contoh bacaan bersama WB dan digarisbawahi perkataan yang terkait.
- b) Praktek membaca perkataan secara bersama-sama sampai setiap warga belajar bisa membaca kalimat dengan lancar.
- c) Membaca contoh baru dan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi perkataan kepada warga belajar, dan meminta

mereka mengidentifikasi perkataan yang terkait dan menggarisbawahinya.

2) Membaca Bersama – sama

Langkah – langkah dalam metode ini adalah membantu agar warga belajar lancar membaca. Tutor membaca seluruh kalimat sendiri dan diskusikan artinya dengan warga belajar. Kemudian, tutor membaca sendiri satu perkataan dan warga belajar mengulangnya. Setelah WB mengulangi dengan lancar, mencoba membaca seluruh kalimat bersama-sama.

3) Membaca Berantai

Warga belajar diminta membaca satu kalimat sendiri. Setelah itu, tutor dapat mendengarkan apakah mereka dapat membaca dengan lancar atau belum. Melalui "membaca berantai" WB dapat belajar konsep kalimat, karena harus berhenti sewaktu melihat tanda baca, langkahnya :

- a) Tutor meminta WB membaca secara bergiliran
- b) Satu demi satu warga belajar membaca kalimatnya (tutor mengatur kegiatan agar WB pemula membaca kalimat yang paling singkat).
- c) Setelah semua WB membaca, tutor meminta WB menyimpulkan informasi dengan kata-katanya sendiri.

4) Membaca diam (dalam hati)

Metode ini membantu WB meningkatkan keterampilan membaca dan mengerti informasi berdasarkan analisisnya sendiri dari sesuatu yang dibacanya, langkahnya :

- a) Membagi contoh bacaan kepada warga belajar
- b) Memberi waktu yang cukup untuk warga belajar membaca diam
- c) Setelah waktu habis, tutor meminta warga belajar menyimpulkan informasi dengan kata-katanya sendiri melalui tanya jawab.

b. Pembelajaran Menulis

Menulis tidak hanya proses membentuk huruf atau membuat kalimat, tetapi merupakan hasil daya/karya cipta seseorang. Langkah-langkah menulis bagi tingkat dasar diantaranya :

1) Tahap pertama : menulis di udara

Tutor meminta WB untuk menulis di udara, untuk melemaskan dan lebih memperkenalkan fungsi-fungsi alat-alat tulis sebagai media menuangkan ide/gagasan.

2) Tahap kedua : Menulis tentang apa saja

Tutor meminta menulis apa saja yang menjadi kesukaannya, mereka dapat menulis garis, lingkaran, atau apa saja.

3) Tahap ketiga : Menulis konkret

Warga Belajar diminta menulis kata-kata nyata, dengan cara menyalin/meniru atau menjiplak tulisan orang lain, seperti nama sendiri, anggota keluarganya, meniru gambar-gambar nyata dan lain sebagainya.

4) Tahap Keempat : Menulis kata/kalimat/pesan pendek

Inti menulis adalah mengkomunikasikan ide/gagasan kepada orang lain. WB diminta dan dilatih untuk menulis kata/kalimat/pesan pendek yang dapat dimengerti oleh orang lain.

c. Pembelajaran Berhitung

Dalam membelajarkan berhitung biasanya WB sudah memiliki kemampuan dalam menghitung nilai nominal uang, jumlah ternak yang dimiliki, anak dan sebagainya, namun belum mampu menuliskan dan menggunakan secara benar simbol-simbol penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dan perbandingan.

Prinsip-prinsip yang harus diingat oleh tutor sebagai langkahnya yaitu:

1) Warga belajar memiliki kemampuan berhitung yang dapat digunakan dalam kehidupannya sehari-hari.

2) Ajarkan keterampilan berhitung yang dibutuhkan WB

- 3) Gunakan dan manfaatkan alat-alat yang berasal dari kehidupan WB dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Ajarkan keterampilan berhitung bersama-sama dengan kegiatan fungsional.
- 5) Gunakan selalu alat-alat yang dapat dikerjakan sendiri oleh WB
- 6) Untuk meningkatkan kemampuan berhitung WB, tutor perlu :
 - a) Mengetahui kebutuhan berhitung WB
 - b) Melaksanakan survey matematika sesuai dengan kebutuhan belajar WB
 - c) Mengumpulkan dan menggunakan alat lokal sebagai alat bantu berhitung
 - d) Menerapkan kegunaan berhitung dalam kehidupan sehari-hari WB.

6. Kurikulum Pendidikan Keaksaraan

Sebagai suatu program layanan pendidikan, pendidikan keaksaraan sudah seharusnya memiliki seperangkat kurikulum yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Pendidikan keaksaraan disusun berdasarkan filosofi dan sifat program, kebutuhan kelompok sasaran, dan dipadukan dengan kebijakan yang diambil secara nasional.

Terdapat tiga butir pokok yang harus diperhatikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum untuk setiap satuan pendidikan, yaitu (1) isi kurikulum harus merupakan kebutuhan belajar peserta didik; (2) merupakan hakikat dan kebutuhan masyarakat dimana peserta didik tinggal dan merupakan bagian masyarakat itu; dan (3) berisi masalah-masalah pokok yang digumuli peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan dengan masyarakatnya (Dewey dalam Kusrini 2005:127). Hal yang perlu diperhatikan untuk warga belajar terkait dengan kurikulum pendidikan keaksaraan yaitu bahwa kompetensi yang diharapkan adalah adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan fungsional sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan jangka panjang yang harus tertuang dalam kurikulum pendidikan keaksaraan yaitu bahwa

program ini adalah menjamin semua warga negara mencapai tingkatan keterampilan tertentu dan mendorong mereka untuk belajar secara berkelanjutan dalam waktu senggangnya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang dibuat secara lokal oleh tutor dan warga belajar, senantiasa harus mengacu pada standar kompetensi keaksaraan sesuai dengan tingkat keaksaraan. Dan kelompok belajar yang menjadi subjek penelitian ini yaitu kelompok belajar keaksaraan tingkat dasar sehingga kurikulum yang dibuat harus mengacu pada standar kompetensi keaksaraan tingkat dasar. Adapun standar kompetensi keaksaraan tingkat dasar sebagai berikut:

Tabel. 2. 1.
Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK) Tingkat Dasar

INDIKATOR KOMPETENSI YANG DICAPAI WARGA BELAJAR			
Membaca	Menulis	Berhitung	Berbahasa Indonesia
Membaca kalimat yang diucapkan warga belajar sendiri dan memilah-milahnya menjadi kata Memilah kata menjadi suku kata Memilah suku kata menjadi huruf Membaca satu resep masakan atau cara	Menggunakan alat tulis dengan benar Menuangkan ide dalam bentuk tulisan Menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital dan sekaligus tanda baca Mengisi formulr atau blangko yang sering	Mengenal konsep bilangan dan lambang bilangan 1 - 100 Mengenal dan memahami konsep operasi bilangan (+, -, x, :) Mengenal dan memahami ukuran-	Memahami bahasa indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan Mengartikan kosakata dari bahasa ibu (daerah) ke dalam bahasa indonesia Mengartikan kalimat sederhana dari bahasa ibu (daerah) ke bahasa indonesia Mencari informasi yang diperlukan dalam penulisan

pembuatan satu jenis keterampilan Membaca teks sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar	dijumpai dalam kehidupan sehari-hari Menulis teks atau bacaan sederhana	ukuran standar Mengenal konsep waktu/jam Memhami konsep nominal mata uang	bahasa indonesia di lingkungan Mengisi data pribadi yang diminta dalam formulir-formulir yang biasa digunakan Berkomunikasi dengan orang lain dalam kegiatan sehari-hari Memahami informasi dari media.
---	---	---	---

(Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Depdiknas, 2008).

6. Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran Keaksaraan

Identifikasi minat kebutuhan belajar merupakan langkah awal dalam kegiatan belajar mengajar pada kelompok belajar keaksaraan fungsional. Fokus kegiatan identifikasi minat kebutuhan tidak hanya terbatas pada kebutuhan belajar warga belajar saja, tetapi juga pada potensi lingkungan dimana warga belajar berada. Identifikasi minat dan kebutuhan belajar warga belajar merupakan kegiatan menggali, mencari, menemukan dan mencatat minat dan kebutuhan WB, menggali lingkungan dengan berbagai permasalahannya, dan potensi masyarakat guna mengembangkan bahan atau materi belajar pendidikan keaksaraan.

Ada beberapa tujuan dari identifikasi minat dan kebutuhan belajar pendidikan keaksaraan yaitu agar tutor dapat :

- a. memahami tujuan perlunya melakukan kegiatan identifikasi minat dan kebutuhan belajar warga belajar;

- b. mengetahui minat dan kebutuhan warga belajar;
- c. mengetahui permasalahan yang dihadapi warga belajar;
- d. mengetahui potensi atau sumber daya yang dapat digunakan sebagai alat atau bahan pemecahan masalah yang dihadapi warga belajar;
- e. mengidentifikasi bahan calistung yang terkait dengan kehidupan sehari-hari warga belajar;
- f. merumuskan dan mengembangkan program perencanaan belajar atau materi pembelajaran bagi warga belajar;
- g. mengembangkan alat dan bahan belajar yang cocok bagi warga belajar;
- h. mengetahui siapa saja yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi; dan
- i. mengetahui tempat-tempat yang dapat dijadikan sumber informasi.

(Sumber: Acuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan, Dikmas:2006)

Identifikasi kebutuhan pembelajaran keaksaraan fungsional dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi seperti, wawancara dengan warga belajar tentang keinginan dan keterampilan yang ingin dikembangkan, observasi melalui jalan-jalan keaksaraan untuk mengetahui potensi dan sumber daya yang dapat dioptimalkan di lingkungan tempat tinggal warga belajar.

C. Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

1. Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup

Kata cakap memiliki beberapa arti. *Pertama* dapat diartikan sebagai pandai atau mahir, *kedua* sebagai sanggup, dapat atau mampu melakukan sesuatu, dan *ketiga* sebagai mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kata kecakapan berarti suatu kepandaian, kemahiran, kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan sesuatu.

Oleh karena itu kecakapan untuk hidup atau *life skills* dapat didefinisikan sebagai suatu kepandaian, kemahiran, kesanggupan atau kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menempuh perjalanan hidup atau untuk menjalani kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak sampai dengan akhir hayatnya. Seperti diuraikan di atas, potensi untuk dapat mengembangkan kecakapan untuk hidup ini telah ada pada setiap orang sejak ia dilahirkan. Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan potensi pada manusia relatif lebih lama dan pada waktu yang diperlukan oleh binatang, karena pada binatang lebih didominasi oleh naluri biologis. Pada manusia di samping pengembangan naluri biologis masih diperlukan waktu persiapan yang lebih panjang untuk mengembangkan daya fisik, daya fikir, daya emosi dan daya spiritual yang terpadu menjadi daya kalbu.

Kemampuan kecakapan untuk menjalani kehidupan ini pada awalnya berkembang secara alamiah melalui pendidikan informal pada keluarga dan masyarakat. Kemudian secara formal upaya untuk mengembangkan dan memperkuat potensi yang telah ada ini dirancang dengan sistematis ke dalam suatu kurikulum untuk diberikan kepada anak didik melalui pendidikan di sekolah dengan alokasi waktu jam pelajaran tertentu pada setiap minggu, mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah, sampai dengan Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil pendidikan informal yang diterima, hasil pengalaman yang diperoleh dan hasil pendidikan formal yang pernah diikuti dengan benar, selama menempuh perjalanan hidup seseorang ternyata, bahwa kemampuan kecakapan untuk hidup ini dapat berkembang terus menjadi semakin kuat dan meningkat dalam kearifannya untuk mengarungi samudera kehidupan.

Kemajuan ini masih dapat diupayakan untuk meningkat lagi dan akan menampakkan wujudnya dengan sesuatu yang disebut dengan mutu. Dan pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh dalam memecahkan berbagai masalah selama mengarungi kehidupan ini akan dapat menempa dan memperkuat kemampuan itu sehingga menjadi suatu mutu kehidupan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang lebih sulit dan semakin rumit.

Mutu kehidupan itu pun masih dapat ditingkatkan lagi sampai ke puncaknya. Tingkat kemampuan kecakapan untuk hidup yang tertinggi adalah apabila dalam menempuh perjalanan hidup itu sendiri selalu dilandasi dengan rasa kasih sayang yang tulus kepada sesama. Lalu dijalani dan dihayati dengan penuh kepasrahan dan tawakkal untuk mengikuti aturan Sang Pencipta, dengan cara yang apa adanya, cara yang santun, cara yang ikhlas dan cara yang indah, sebagai suatu *seni hidup* yang disebut "*The Art of Life*".

Dalam hampir semua kegiatan untuk menjalani kehidupan, persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh seseorang pada urumnya berkisar pada empat persoalan besar yang sangat mendasar sebagai persoalan utama. Keempat persoalan besar itu adalah: *pertama* persoalan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, *kedua* persoalan yang berkaitan dengan keberadaannya bersama-sama dengan orang lain, *ketiga* persoalan yang berkaitan dengan keberadaannya di suatu lingkungan alam tertentu, dan *keempat* persoalan yang berkaitan dengan pekerjaannya, baik yang berkaitan dengan pekerjaan utama yang ditekuni sebagai mata pencaharian maupun pekerjaan yang hanya sekadar sebagai hobi. Agar dapat menghadapi keempat persoalan utama tersebut dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya suatu kecakapan khusus yang minimal harus dapat dikuasai oleh seseorang. Dalam mempersiapkan suatu kecakapan khusus itu secara dini, pada dasarnya perlu diupayakan dengan baik, sekurang-kurangnya empat jenis pendidikan kecakapan untuk hidup atau *Lifeskills Education* yang harus dibekalkan kepada para peserta didik. Menurut Arends (Trianto, 2007:7) ada empat jenis pendidikan kecakapan yang perlu diberikan untuk mempersiapkan anak didik agar dapat memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan atau kemampuan untuk menempuh perjalanan hidup itu, baik melalui pendidikan informal di dalam keluarga dan masyarakat, maupun melalui pendidikan formal di sekolah hendaknya mencakup: '*personal skills education*', '*social skills education*', '*environmental skills education*', dan '*vocational atau occupational skills education*'.

Berdasarkan uraian di atas, Kecakapan hidup (*life skills*) dapat diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar

tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).

Brolin (1989) menjelaskan bahwa *life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid interruptions of employment experience*. Dengan demikian life skills dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Program pendidikan life skills adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat (Anwar, 2004: 20).

Pada dasarnya *life skills* membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar (*learning how to learn*), menghilangkan kebiasaan dan pola pikir yang tidak tepat (*learning how to unlearn*), menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, berani menghadapi problema kehidupan dan memecahkan masalah secara kreatif.

2. Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup

a. Tujuan Umum

Pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan pada jalur pendidikan non formal bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap warga belajar di bidang pekerjaan/usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat perkembangan fisik dan jiwanya serta potensi lingkungannya, sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

b. Tujuan Khusus

Memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup kepada warga belajar agar:

- 1) Memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja, baik bekerja mandiri (wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 2) Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global.
- 3) Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarganya.
- 4) Mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat (*life long education*) dalam rangka mewujudkan keadilan di setiap lapisan masyarakat.

3. Kriteria, Sasaran dan Bidang Program Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Kriteria di dalam penyelenggaraan program *life skills* ini meliputi:

- a. Di gali berdasarkan karakteristik masyarakat dan potensi daerah setempat
- b. Dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan kelompok sasaran
- c. Mendapat dukungan dari pemerintah setempat
- d. Memiliki prospek untuk berkembang dan berkesinambungan
- e. Tersedia cukup nara sumber teknis dan prasarana untuk praktek keterampilan
- f. Memiliki dukungan lingkungan (perusahaan, lembaga pendidikan, dan lain-lain)
- g. Memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai sektor
- h. Berorientasi pada peningkatan kompetensi berusaha.

Adapun sasaran penyelenggaraan program *life skills* adalah sebagai berikut:

- a. Diprioritaskan bagi masyarakat usia 16-44 tahun yang tidak sekolah dan tidak bekerja
- b. Warga belajar binaan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) atau warga masyarakat putus atau tamat SD/SLTP

- c. Berasal dari keluarga miskin/tidak mampu
- d. Memiliki minat dan bakat tertentu

Bidang-bidang yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan program pendidikan *life skills* secara garis besar, antara lain:

- a. Produksi Ekstraktif

Produksi ekstraktif yaitu pembelajaran yang memproduksi/ menghasilkan suatu barang yang langsung diperoleh dari alam, seperti: perikanan, perhutanan, dan pertambangan.

- b. Produksi Agraris

Produksi agraris yaitu pembelajaran yang mengolah tanah bagi kegiatan pertanian, seperti: tanaman pangan, sayuran, bunga dan buah-buahan serta pengembangan berbagai jenis ternak.

- c. Produksi Industri

Produksi industri yaitu pembelajaran mengolah, merakit, memperbaiki, dan merekayasa suatu jenis bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan yang setengah jadi menjadi bahan jadi.

- d. Produksi Perdagangan

Produksi perdagangan yaitu pembelajaran melalui usaha perdagangan seperti: jual-beli, melakukan usaha mandiri, analisis pasar, perhitungan laba-rugi dan pengembangan usaha.

- e. Produksi Jasa

Produksi jasa yaitu pembelajaram yang melakukan kegiatan pelayanan berupa jasa yang diperlukan oleh pengguna jasa berdasarkan kriteria pelayanan yang disepakati, seperti: jasa sopir, tat arias rambut dan wajah, penerjemah bahasa, konsultan teknik, pengajar dan pertukangan.

Berdasarkan bidang-bidang tersebut *life skills* bermaksud memberikan seseorang bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja

dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya. Program *life skills* dirancang untuk membimbing, melatih dan membelajarkan warga belajar agar mempunyai bekal dalam menghadapi masa depannya dengan memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada.

4. Ciri-ciri Pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skills*)

Merujuk kepada panduan *life skills* yang diterbitkan Depdiknas (Anwar, 2004: 21), ciri pembelajaran *life skills* diantaranya adalah: (1) terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar, (2) terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama, (3) terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, usaha bersama, (4) terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, akademik, manajerial, kewirausahaan, (5) terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar, menghasilkan produk bermutu, (6) terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli, (7) terjadi proses penilaian kompetensi, dan (8) terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama.

Apabila dihubungkan dengan pekerjaan tertentu, *life skills* dalam lingkup pendidikan nonformal ditujukan pada penguasaan *vokasional skills* yang intinya terletak pada penguasaan keterampilan secara khusus (spesifik).

5. Indikator Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skills*)

Dalam studi Sri Handayani (2009:6) Washington State University mengeleminir indikator pendidikan kecakapan hidup menjadi delapan indikator *Life Skills* yang terdiri dari:

1. *Decision making* (kemampuan membuat keputusan) – membuat pilihan diantara berbagai alternatif, kemampuan membuat daftar pilihan sebelum membuat keputusan, mampu memikirkan akibat dari putusan yang akan diambil, dan mampu mengevaluasi pilihan yang telah dibuat.

2. *Wise use of resources* (kemampuan memanfaatkan sumber daya)
 - menggunakan referensi, bermanfaat, punya nilai responsibilitas, berdasarkan prioritas
 - a. Mendayagunakan sumber daya yang ada di sekitar dirinya.
 - b. Memanfaatkan sumber daya finansial sendiri secara terencana.
 - c. Memanfaatkan pengaturan waktu dengan baik.
 - d. Berhati-hati dengan personalitas diri.
3. *Communication* (komunikasi) - kemampuan menyampaikan pendapat, informasi, atau pesan dengan berbagai orang melalui pembicaran, penulisan, gerak tubuh, dan ekspresi yang efektif.
 - a. Membuat presentasi
 - b. Mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan orang
 - c. Jelas dalam menyampaikan pendapat, perasaan, atau ide kepada yang lain
 - d. Tidak emosional dalam menjelaskan ketidaksepakatan
4. *Accepting differences* (menerima perbedaan) - kemampuan mengatur dan menerima kesenjangan atau perbedaan dengan pelbagai pihak
 - a. Menghargai orang yang berbeda
 - b. Bekerja sama dengan orang yang berbeda
 - c. Menjalin hubungan dengan orang yang berbeda
5. *Leadership* (kepemimpinan) - mampu mempengaruhi dan menjelaskan sesuatu kepada pelbagai pihak di dalam kelompok
 - a. Mengatur kelompok kepada tujuan yang telah ditetapkan
 - b. Menggunakan gaya kepemimpinan yang variatif
 - c. Saling berbagi dengan yang lain dalam kepemimpinan
6. *Useful/marketable skills* (kemampuan yang *marketable*) - kemampuan menjadi pekerja dan dibutuhkan oleh lapangan kerja.
 - a. Memahami permasalahan
 - b. Mengikuti instruksi

- c. Memberi kontribusi pada kerja tim
 - d. Siap bertanggung jawab pada tiap tugas yang diberikan
 - e. Menghindari kesalahan dan mencatat prestasi
 - f. Siap melamar pekerjaan
7. *Healthy lifestyle choices* (kemampuan memilih gaya hidup sehat); kemampuan memilih gaya hidup sehat bagi tubuh dan pikiran, menghindari penyakit dan luka-luka.
- a. Memilih makanan sehat
 - b. Memilih aktifitas yang sehat bagi tubuh dan mental
 - c. Mengatur stress secara positif di dalam kehidupan pribadi
 - d. Menghindari perilaku beresiko.
8. *Self-responsibility* (bertanggung jawab pada diri sendiri); mampu menjaga diri; menghargai perilaku diri dan dampaknya; mampu memilih posisi diantara salah dan benar
- a. Mengerjakan sesuatu yang benar bagi diri sendiri ketika di dalam kelompok
 - b. Selalu mengingatkan diri akan kesalahan yang bisa dibuat
 - c. Mencoba memahami betul sebelum membuat komitmen
 - d. Mengontrol tindakan diri berdasarkan tujuan/ masa depan
- Menurut WHO (Publikasi IPB, 2012: 29) ada beberapa indikator yang terkandung dalam *life skills* yang secara konseptual dikelompokkan:
- a. Kecakapan mengenal diri (*self awarness*), atau sering juga disebut kemampuan personal (*personal skill*) yang secara praktis dapat diidentifikasi dari sifat-sifat seperti: percaya terhadap diri sendiri; berani dalam mengamil resiko; bersemangat dalam bekerja; murah hati terhadap sesama; penyabar; emphaty; perilakunya dapat diteladani.
 - b. Kecakapan berfikir rasional (*thinking skill*), atau kecakapan akademik (*academic skills*), sering juga disebut kemampuan berfikir ilmiah (*scientific method*) yang secara praktis dapat diidentifikasi, misalnya: keterampilan menggali dan menemukan data; keterampilan mengolah data menjadi informasi; keterampilan merumuskan persoalan; keterampilan

mengidentifikasi dan menganalisis alternatif pemecahan masalah; keterampilan memberikan alasan-alasan pertimbangan yang rasional dan objektif dalam merumuskan; keterampilan memilih alternatif pemecahan masalah.

- c. Kecakapan sosial (*social skill*), secara praktis dapat diidentifikasi misalnya: keterampilan memahami karakteristik orang lain; keterampilan berhubungan pribadi dengan orang lain dengan penuh pengertian; keterampilan berkomunikasi dalam kelompok; keterampilan menemukan dan membina jaringan/ saluran serta media komunikasi; keterampilan bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan (*kooperatif*); keterampilan dalam memberikan tugas dan kepercayaan pada orang lain (*delegatif*); keterampilan dalam mengkoordinir pekerjaan (*koordinatif*).
- d. Kecakapan vokasional (*vocational skill*), sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan, artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*spesifik life skill*) atau keterampilan teknis (*technical skill*).

6. Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Perseptif Pendidikan Non Formal

Secara singkat pendidikan kecakapan hidup adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan memecahkan masalah hidupnya secara mandiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kecakapan hidup atau *lifeskills* pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menanamkan dan meningkatkan kecakapan hidup individu peserta didik sehingga mampu hidup dan

berpenghidupan secara layak dan mandiri. Kecakapan hidup itu sendiri merupakan suatu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mampu mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya problema tersebut dapat diatasinya. Secara operasional, program Kecakapan hidup atau *lifeskills* dalam pendidikan non formal dipilah menjadi empat jenis, yaitu:

- a. '*Personal Skills Education*' adalah pendidikan kecakapan yang perlu diberikan kepada anak didik agar dapat mengembangkan kemampuan berdialog secara baik dengan diri sendiri untuk mengaktualisasikan jati-dirinya sebagai manusia yang menjadi khalifah atau wakil Sang Pencipta di planet bumi ini.
- b. '*Social Skills Education*' adalah pendidikan kecakapan yang perlu diberikan kepada anak didik agar dapat mengembangkan kemampuan berdialog untuk bergaul secara baik dengan sesama manusia.
- c. '*Environmental Skills Education*' adalah pendidikan kecakapan yang perlu diberikan kepada anak didik agar dapat mengembangkan kemampuan berdialog secara baik dengan lingkungan alam sekitarnya, untuk menikmati keindahannya dan menjaganya dari kerusakan-kerusakan karena ulahnya sendiri atau oleh manusia lainnya, serta kemampuan untuk menjaga diri dari pengaruh-pengaruhnya.
- d. '*Vocational* atau *Occupational Skills Education*' adalah pendidikan kecakapan yang perlu diberikan kepada anak didik agar dapat mengembangkan kemampuan untuk menguasai dan menyenangkan jenis pekerjaan tertentu. Jenis pekerjaan tertentu ini bukan hanya merupakan pekerjaan utama yang akan ditekun sebagai mata pencaharian, yaitu menjadi bekal untuk bekerja mencari nafkah yang halal yang merupakan salah satu kewajiban dalam menempuh perjalanan hidupnya di kelak kemudian hari. Jenis pekerjaan tertentu dapat juga merupakan pekerjaan yang hanya sekedar sebagai hobi. (Depdiknas, dalam Publikasi IPB, 2012:29).

Keempat jenis kecakapan hidup di atas, dilandasi oleh

kecakapan spiritual, yakni : keimanan, ketaqwaan, moral, etika dan budi pekerti luhur sebagai salah satu pengamalan dari sila pertama Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Kecakapan hidup atau *lifeskills* diarahkan pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, mandiri, serta memiliki produktivitas dan etos kerja yang tinggi. Pelaksanaan pendidikan Kecakapan hidup atau *lifeskills* pada satuan dan program pendidikan non formal, utamanya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran, yang lebih ditekankan pada upaya pembelajaran yang dapat memberikan penghasilan atau *learning and earning*.

Dalam konsep lain, pendidikan kecakapan hidup dalam perspektif pendidikan Non Formal melingkupi kecakapan personal (terliput di dalamnya kecakapan berpikir dan kecakapan akademik), kecakapan sosial dan kecakapan vokasional. Secara skematik digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.1. Skema Klasifikasi Pendidikan Kecakapan Hidup

Sumber: Kusnadi (2005:4)

Bagan di atas, merupakan batasan lain yang menjelaskan bahwa konsep pendidikan kecakapan hidup terdiri atas tiga ranah yakni, ranah kecakapan personal, yang indikatornya terdiri atas

berpikir rasional dan akademik. Ranah kecakapan sosial yang diindikasikan oleh kemampuan pada aspek interaksi sosial seperti komunikasi, kerjasama dan harmonisasi. Selanjutnya ranah kecakapan vocational, yang mengandung indikator kejujuran, kesiapan kerja dan kemampuan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari.

7. Program Pendidikan Kecakapan Hidup Pada Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Peserta didik berasal dari lapisan masyarakat miskin, tidak/putus sekolah, dan tidak/belum mempunyai keterampilan bekal hidup serta warga masyarakat lainnya yang tertarik meningkatkan kecakapan hidupnya.
- b. Kurikulum pembelajaran bersifat fleksibel tergantung pada kebutuhan peserta didik, potensi pasar dan potensi usaha lainnya, termasuk dukungan masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.
- c. Program berlangsung singkat paling lama satu tahun, tidak harus berjenjang dan berkesinambungan, yang penting peserta didik memperoleh manfaat bagi peningkatan mutu bekerja atau berusahnya.
- d. Nara sumber dan fasilitator terdiri dari orang-orang terampil dan peduli terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dapat berasal dari pengusaha, aktivis sosial, perbankan, manajer perusahaan bisnis, tokoh masyarakat, kalangan pemerintahan dan lain-lain.
- e. Metode pembelajaran bersifat dialogis, partisipatif-andragogis; ketiga bidang kecakapan hidup terintegrasi dalam proses pembelajaran.
- f. Keberhasilan belajar diukur dari peningkatan kemampuan praktis dalam meningkatkan mutu pekerjaannya atau mutu kegiatan berusahnya sebagai akibat dari

peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik terhadap materi belajar kecakapan hidup.

8. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan kecakapan hidup bukanlah sesuatu yang baru dan karenanya juga bukan topik yang orisinal. Yang benar-benar baru adalah bahwa kita mulai sadar dan berpikir bahwa relevansi antara pendidikan dengan kehidupan nyata perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitasnya (Slamet PH, 2002). Hal ini berarti proses pembelajaran yang selama ini dilakukan di sekolah sebenarnya juga telah menumbuhkan kecakapan hidup namun ketercapaiannya masih sebatas sebagai efek pengiring *atau nurturant effect* yang secara otomatis terbentuk seiring terkuasainya substansi mata pelajaran. Sementara itu berdasar konsep pendidikan berorientasi kecakapan hidup bahwa aspek-aspek kecakapan hidup harus sengaja dirancang untuk ditumbuhkan dalam kegiatan belajar. Perancangan dimulai dari penyusunan program pembelajaran, penyusunan satuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan sistem evaluasinya. Hal ini menuntut guru untuk melakukan reorientasi pembelajaran pada mata pelajaran yang diampunya guna mengembangkan kecakapan hidup.

Anwar (2004:23) berpendapat ada beberapa prinsip yang harus dipakai dalam melaksanakan pendidikan kecakapan hidup atau *lifeskills*, yaitu:

- a. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup tidak mengubah system pendidikan yang berlaku saat ini.
- b. Tidak mereduksi pendidikan menjadi hanya suatu pelatihan.
- c. Etika sosio -religius bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dapat diintegrasikan.
- d. Pembelajaran memakai prinsip *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to cooperate*.
- e. Pengembangan potensi wilayah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan

- f. Menerapkan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, kolaborasi semua unsur terkait yang ada dalam masyarakat.
- g. Paradigma *learning for life* dan *school to work* dapat menjadi dasar semua kegiatan pendidikan sehingga lembaga pendidikan secara jelas memiliki pertautan dengan dunia kerja dan pihak lain yang relevan.
- h. Penyelenggaraan pendidikan harus senantiasa membantu peserta didik agar:
 - 1) Membantu mereka menuju hidup sehat dan berkualitas
 - 2) Mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas
 - 3) Memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidup secara layak.

Selanjutnya dalam implementasinya pendidikan kecakapan hidup dapat mempertimbangkan beberapa model, antara lain adalah: (1) model integratif, (2) model komplementatif, dan (3) model diskrit (Anwar, 2004:45).

Dalam model integratif, implemetasi pendidikan kecakapan hidup melekat dan terpadu dalam program-program kurikuler, kurikulum yang ada, dan atau mata pelajaran yang ada. Berbagai program kurikuler dan mata pelajaran yang ada seharusnya bermuatan atau berisi kecakapan hidup.

Model ini memerlukan kesiapan dan kemampuan tinggi dari sekolah, kepala sekolah, dan guru mata pelajaran. Kepala sekolah dan guru harus pandai dan cekatan menyiasati dan menjabarkan kurikulum, mengelola pembelajaran, dan mengembangkan penilaian. Ini berarti, mereka harus kreatif, penuh inisiatif, dan kaya gagasan. Keuntungannya, model ini relatif murah, tidak membutuhkan ongkos mahal, dan tidak menambah beban sekolah terutama kepala sekolah, guru, dan peserta didik.

Dalam model komplementatif, implementasi pendidikan kecakapan hidup dimasukkan dan atau ditambahkan ke dalam program pendidikan kurikuler dan struktur kurikulum yang ada,

bukan. Pelaksanaannya bisa berupa menambahkan mata pelajaran kecakapan hidup dalam struktur kurikulum atau menyelenggarakan program kecakapan hidup dalam kalender pendidikan. Model ini tentu saja membutuhkan waktu tersendiri, guru tersendiri di bidang kecakapan hidup, dan ongkos yang relatif besar.

Selain itu, penggunaan model ini dapat menambah beban tugas siswa dan guru selain beban finansial sekolah. Meskipun demikian, model ini dapat digunakan secara optimal dan intensif untuk membentuk kecakapan hidup pada peserta didik. Dalam model diskrit, implementasi pendidikan kecakapan hidup dipisahkan dan dilepaskan dari program-program kurikuler, kurikulum reguler, dan atau mata pelajaran pembelajaran kurikuler.

Pelaksanaannya dapat berupa pengembangan program kecakapan hidup yang dikemas dan disajikan secara khusus kepada peserta didik. Penyajiannya bisa terkait dengan program kokurikuler atau bisa juga berbentuk program ekstrakurikuler. Model ini membutuhkan persiapan yang matang, ongkos yang relatif besar, dan kesiapan sekolah yang baik. Selain itu, model ini memerlukan perencanaan yang baik agar tidak salah penerapan. Meskipun demikian, model ini dapat digunakan membentuk kecakapan hidup peserta didik secara komprehensif dan luasa.

Berbagai prinsip dan pola pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup tersebut, menjadi dasar untuk penerapan model integratif, karena model ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan penerapannya. Tim BBE (2002:2) mengingatkan bahwa dalam mengintegrasikan aspek kecakapan hidup dalam topik diklat tidak boleh dipaksakan. Artinya jika suatu topik pelajaran hanya dapat mengembangkan satu aspek kecakapan hidup maka hanya satu aspek tersebut yang dikembangkan dan tidak perlu dipaksakan mengkaitkan aspek yang lainnya namun jika ada topik pelajaran yang dapat menumbuhkan beberapa aspek kecakapan hidup maka pengembangan aspek kecakapan hidup perlu dioptimalkan pada topik tersebut. Artinya peran guru dalam mengembangkan kecakapan hidup memiliki porsi yang sangat besar dalam menentukan keberhasilannya terutama kreativitas dalam melakukan reorientasi pembelajaran.

Slamet PH (2002) menyatakan pengembangan pendidikan berbasis kecakapan hidup idealnya ditempuh secara berurutan sebagai berikut: *Pertama*, diidentifikasi masukan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan nilai, dan dugaan para ahli tentang nilai-nilai kehidupan nyata yang berlaku. *Kedua*, masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi kecakapan hidup yang dimaksud harus menunjukkan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya dalam dunia yang sarat perubahan. *Ketiga*, kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi kecakapan hidup yang telah dirumuskan. Artinya, apa yang *harus, seharusnya, dan yang mungkin* diajarkan kepada peserta didik disusun berdasarkan kompetensi yang telah dikembangkan. *Keempat*, penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup perlu dilaksanakan dengan jitu agar kurikulum berbasis kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara cermat. Beberapa hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup seperti misalnya tenaga kependidikan seperti guru, pendekatan-strategi-metode pembelajaran, media pendidikan, fasilitas, tempat belajar dan durasi belajar, harus siap. *Kelima*, evaluasi pendidikan kecakapan hidup perlu dibuat berdasarkan kompetensi kecakapan hidup yang telah dirumuskan pada langkah kedua. Karena evaluasi belajar disusun berdasarkan kompetensi, maka penilaian terhadap prestasi belajar peserta didik tidak hanya dengan *pencil and paper test*, melainkan juga dengan *performance test* dan bahkan dengan evaluasi otentik.

Anwar (2004:96) menyatakan yang perlu diperhatikan adalah kecakapan hidup general merupakan fondasi dari kecakapan hidup lainnya. Oleh sebab itu sesungguhnya semua kecakapan hidup bisa dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan asal diterapkan secara proporsional. Sesuai dengan konsep pengembangan pendidikan kecakapan hidup maka setiap mata diklat perlu mengembangkan setiap aspek kecakapan hidup secara proporsional dan tidak perlu dipaksakan serta aspek-aspek kecakapan hidup harus dirancang secara sengaja untuk ditumbuhkan dalam proses belajar mengajar.

Pendidikan berdasar kompetensi menuntut peran guru yang berbeda dengan penerapan yang berdasarkan *subject matter*. Dalam pemikiran Marselus R. Payong (2011:29) Guru atau Tutor tidak hanya berperan sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan tetapi merupakan pendidik dan pembimbing yang membantu peserta didik untuk mengembangkan segala potensinya terutama terkait dengan potensi akademis maupun non akademis. Guru bukan menjadi sentral atau *teacher centered* dalam perannya, tetapi peran aktif siswa menjadi sentral atau *student centered* dalam penerapan kurikulum berdasar kompetensi. Fungsi dan peran guru adalah menjadi pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran yang memfokuskan pada kegiatan belajar peserta didik.

D. Konsep Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan bagi Kesejahteraan Masyarakat

1. Konsep Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan

Ridwansyah (2009), menyatakan bahwa "pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula". Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Ridwansyah (2009), menyatakan juga bahwa "akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha tertentu". Informasi ini disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas

laporan keuangan. Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, dimana informasi yang tersedia berupa informasi harta, kewajiban serta modal. Perhitungan laba rugi menunjukkan pendapatan yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan serta hasil usaha yang diperoleh dalam suatu periode yang terakhir pada tanggal yang tertera di neraca. Laporan perubahan posisi keuangan menyajikan kegiatan pembiayaan dan investasi perusahaan. Perhatian pada perhitungan laba rugi semakin dirasakan manfaatnya. Dengan adanya informasi mengenai pendapatan, maka dapat membandingkan antara modal yang tertanam dengan penghasilan sebagai alat untuk mengukur kinerja efisiensi perusahaan dan dapat memprediksi distribusi dividen di neraca yang akan datang.

Pendapatan sebagai salah satu elemen penentuan laba rugi suatu perusahaan belum mempunyai pengertian yang seragam. Hal ini disebabkan pendapatan biasanya dibahas dalam hubungannya dengan pengukuran dan waktu pengakuan pendapatan itu sendiri.

Pendapatan sebagai produk perusahaan dalam mengukur dan melaporkan pendapatan masih menghadapi masalah. Suatu alternatif pengakuan pendapatan pada waktu penyelesaian kegiatan utama ekonomi adalah konsep pelaporan pendapatan berdasarkan kejadian kritis atau yang paling menentukan, dengan kata lain sebagian pendapatan diakui kemudian jika fungsi atau kegiatan ekonomi tambahan akan terjadi kemudian.

Sebaliknya bahwa nilai tambahan oleh perusahaan seharusnya dialokasikan beberapa titik waktu, bahkan jika pertambahan nilai oleh perusahaan dilaporkan pada satu titik waktu saja maka jumlah pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor ekonomi lainnya harus dilaporkan pada satu titik waktu saja. Walaupun pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor lainnya sesuai pengakuan utama. Inilah konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu harga penjualan tunai akhir dikurangi biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual.

Salah satu kesulitan utama konsep realisasi adalah bahwa realisasi mempunyai arti berbeda-beda bagi setiap orang. Di dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk

mengartikan pengakuan pendapatan. Tetapi banyak para ahli menggunakan istilah realisasi tersebut dalam arti memandangnya sebagai aturan khusus yang cocok bagi pelaporan transaksi, sedangkan yang lain akan memasukkan semua kenaikan nilai tanpa mempermasalahkan jenis dan sumbernya. Dari berbagai istilah dan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan yang dijelaskan oleh para ahli dan pakar akuntansi terlihat dengan jelas bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli berkaitan dengan masalah pengakuan pendapatan, hal ini mungkin saja disebabkan perbedaan geografis dan keadaan, serta praktek-praktek yang akan dihadapi di masing-masing daerah atau negara. Untuk itu bagi perusahaan dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan memilih salah satunya dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan dan diharapkan diterapkan secara konsisten dalam perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan/ekonomi diantaranya adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam Wikipedia (2013:1) dijelaskan sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas sumber daya manusia adalah faktor produksi yang penting. Sumber daya manusia bisa melakukan dua peran (sebagai tenaga kerja dan sebagai pengusaha) dalam proses produksi untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dalam proses pelaksanaan peningkatan ekonomi, sumber daya manusia senantiasa dituntut untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Kualitas tersebut dapat berupa peningkatan kualitas ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan pola pikir masyarakat.

b. Sumber Daya Alam

Dalam Wikipedia (2013:1) dijelaskan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia,

Berdasarkan pendapat di atas, sumber daya alam merupakan faktor penentu pertumbuhan/peningkatan ekonomi". Hal-hal yang termasuk sumber daya alam yaitu tanah, air, udara, hewan, tumbuh-tumbuhan, mineral, dan segala sesuatu yang ada di alam. Contoh program yang diselenggarakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri yang memanfaatkan sumber daya alam dalam pelaksanaan programnya, yaitu memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar tempat pelaksanaan.

2. Karakteristik Pendapatan

Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan. Pengukuran akuntansi haruslah diarahkan ke penyajian informasi yang relevan untuk penggunaan yang ditetapkan. Pembatasan data yang tersedia dan ciri-ciri tertentu dari lingkungan membatasi keakuratan dan keterandalan pengukuran. Oleh sebab itu keterbatasan ini harus dikemukakan secara eksplisit dan dipertimbangkan dalam pengembangan prinsip serta prosedur akuntansi, karena kendala-kendala ini tidak dapat dibuang oleh lingkungan atau kurangnya alat pengukur memadai.

Nilai tukar produk atau jasa sebagai hasil penjualan perusahaan merupakan ukuran terbaik dan paling objektif bagi pendapatan. Penentuan satuan ukur untuk pendapatan secara umum

dinyatakan dengan jumlah uang atau unit moneter. Penentuan ini menimbulkan masalah, oleh sebab itu adanya penurunan atau kenaikan daya beli umum sepanjang waktu.

Keterbatasan pengukuran pendapatan dapat timbul karena data akuntansi disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan. Meramalkan pada masa yang akan datang pada umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. Namun, ketidakmampuan untuk membuat pengukuran pendapatan yang terandal dan atribut khusus yang dianggap relevan dapat juga disebabkan oleh kurangnya teknik pengukuran yang terandal dan ketidakmampuan untuk menemukan prosedur pengukuran pendapatan yang menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur.

Pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non operasi. Pendapatan non operasi biasanya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan bunga. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses pembandingan sebagai berikut:

a. Sumber pendapatan

Ridwansyah (2009), menyatakan bahwa “jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan”. Hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan.

b. Produk dan kegiatan utama perusahaan

Ridwansyah (2009), menyatakan bahwa “produk perusahaan mungkin berupa barang ataupun dalam bentuk jasa”.

Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk atau baik berupa barang atau jasa atau keduanya yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan. Terkadang, produk yang dihasilkan secara insidental bila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul tidak tetap, sering dipandang sebagai elemen pendapatan non operasi, maka pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu, untuk itu produk perusahaan harus diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan.

c. Jumlah rupiah pendapatan

Ridwansyah (2009), menyatakan bahwa "pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual". Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan maka tampaklah jumlah rupiah laba.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nilai wajar disini dimaksudkan sebagai suatu jumlah dimana kegiatan mungkin ditukarkan atau suatu kewajiban

diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk meakukan transaksi wajar, kemungkinan kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima.

Barang yang dijual atau jasa yang diberikan untuk diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang tidak sama, maka pertukaran dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Tetapi bila barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Pendapatan dari penjualan barang harus segera diakui bila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memudahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli; Perusahaan tidak lagi mengelola atau pengendalian efektif atas barang yang dijual; jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal; besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut; biaya yang akan terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.

Bila salah satu kriteria di atas tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan harus ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui apabila perusahaan tersebut menahan resiko dari kepemilikan, antara lain: bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya; bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan; bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan; dan bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi return.

Pendapatan dan transaksi penjualan jasa dapat diestimasi atas tugas yang disepakati perusahaan. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penjualan jasa dapat diakui dengan metode persentase penyelesaian, bila memenuhi seluruh kondisi berikut: jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal; besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan; tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya tidak menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut dapat dipisah dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut, antara lain: hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum yang berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut; imbalan yang harus dipertukarkan; dan cara dan persyaratan penyelesaian.

Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi: besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan; jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal; pendapatan atas bunga, royalti, dan deviden ini diakui dengan menggunakan dasar tersebut; bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut; royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.

2. Konsep Kesejahteraan Sosial

Yogie (2011), menyatakan bahwa “kesejahteraan rakyat merupakan suatu konsep yang selalu digembar gemborkan oleh banyak orang”. Ketika kita mendengar kata kesejahteraan tentu saja langsung terbayang suatu keadaan yang adil dan tanpa kemiskinan.

Yogie (2011), menyatakan juga bahwa “definisi kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materilialis murni yang menafikan keterkaitan rohaniah”. Akan tetapi, sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek rohaniah. Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan kerohanian, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya.

Gamal (2006), menyatakan bahwa “sesungguhnya aspek materi dan rohaniah bagi kesejahteraan tidak independen satu dengan lainnya, tetapi keduanya sangat berhubungan erat”. Tingkat keharmonisan keluarga yang tinggi akan meningkatkan produktivitas individu dalam pembangunan ekonomi dan dunia usaha, sedangkan keharmonisan kehidupan sosial akan membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi pemerintahan daerah yang lebih efektif serta meningkatkan pembangunan di segala bidang.

Konsep kesejahteraan lahir bathin dapat dikatakan telah direalisasikan apabila unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomi tidak terlalu mencolok, *full employment* (tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi dicapai tanpa beban hutang luar negeri yang berat, tingkat inflasi tidak tinggi, penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui tidak tinggi, dan kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan tidak terjadi.

Di samping hal-hal di atas, harus terpenuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni telah terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit, orang-orang lemah, fakir miskin, keluarga bermasalah, janda-janda, penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka mendiskusikan konsep kesejahteraan lahir bathin tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan juga moral, agama, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah daerah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Untuk mencapai konsep kesejahteraan tersebut, setiap orang baik sebagai anggota masyarakat atau dunia usaha, maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintahan diharuskan mengorbankan kepentingan pribadi demi memenuhi kemaslahatan sosial di lingkungan keluarga, dalam dunia usaha, hidup bermasyarakat, atau di dalam bidang pemerintahan. Selama maksimalisasi kekayaan dan konsumsi adalah satu-satunya tujuan, maka pengorbanan tidak akan ada artinya.

Pemenuhan kepentingan pribadi adalah sebaik-baik kebijaksanaan, namun sebagai konsekuensinya sistem kekeluargaan akan hancur, kualitas generasi mendatang akan menurun, atau bahkan akan berakibat fatal pada kinerja dunia usaha dan pemerintahan itu sendiri. Sebuah kenyataan membuktikan bahwa kemajuan hidup secara materi tidak menjamin tingginya tingkat kebahagiaan dan keharmonisan sosial.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pada Bab I pasal (1) dijelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan uraian tersebut, kesejahteraan sosial diasumsikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga

dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan sistem adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhannya, untuk itu pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu aktifitas yang terorganisasi yang ditujukan untuk membantu tercapainya suatu penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pekerjaan sosial sendiri berada diposisi sebagai profesi yang bertugas menyelenggarakan serta membantu manusia menggunakan program-program/pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis-normatif maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai.

Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Keempat, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranata dan lembaga sosial berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, suatu hal yang perlu dicatat, berbagai bentuk pranat ini belum merata dilakukan oleh umat Islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.

Pendapatan dengan kesejahteraan sosial sangat berkaitan erat, karena apabila seseorang sudah memiliki pendapatan tetap, maka kesejahteraanpun dapat dirasakan, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Apabila pendapatan meningkat maka kesejahteraan pun akan meningkat. Pendapatan yang besar dapat mempengaruhi

kehidupan seseorang di masyarakat, misalnya orang yang pendapatannya besar akan lebih disegani dibandingkan dengan orang yang pendapatannya kecil, oleh karena itu pendapatan dan kesejahteraan sosial sangat berkaitan erat.

E. Hasil Penelitian Relevan

Dalam beberapa hasil penelitian yang berkenaan dengan program pendidikan keaksaran diketahui beberapa temuan yang memiliki relevansi dengan kegiatan penelitian yang dilakukan di Jaring Halus Sumatera Utara. Ada empat kajian hasil penelitian relevan yang akan dipaparkan, yaitu: Pertama, Hasil penelitian yang dilakukan UNESCO (Kusnadi, 2005:35) dipaparkan bahwa beberapa indikator penyebab terjadinya kelompok masyarakat menjadi buta aksara diantaranya: (1) pada kebanyakan kelompok perempuan jumlah buta aksara umumnya lebih besar dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Data menunjukkan dari 15.5 Juta orang penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas, dan 3.9 juta orang berusia 15-44 tahun, dimana 67,07% nya adalah perempuan. (2) Jumlah buta aksara terdapat dikalangan suku-suku terasing atau kelompok-kelompok minoritas, yang kurang memiliki akses terhadap dunia pendidikan, (3) Di daerah perkotaan jumlah buta aksara banyak terkonsentrasi di daerah kawasan kumuh (slum area) yang penghuninya berpenghasilan rendah. Karena rendahnya pendapatan tersebut, mereka lebih mementingkan “perut” daripada “belajar” . Akibat penghasilan rendah itu mereka tidak memiliki kemampuan pembiayaan pendidikan sendiri, apalagi membiayai pendidikan anak-anaknya, minimal amat sekolah dasar (basic education). (4) Begitu pula, di daerah pedesaan jumlah buta aksara banyak terkonsentrasi di daerah terpencil dengan tingkat pendapatan penduduknya yang rendah. (5) Di daerah yang tingkat partisipasi di sekolah dasarnya rendah jumlah buta aksara akan tinggi, (6) Di daerah yang tingkat putus sekolah dasar pada kelas-kelas awal maka jumlah buta aksara akan tinggi pula.

Kedua, Hasil penelitian tentang pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ade Kusmiadi (2009) yang berjudul Model Pengelolaan Pembelajaran Pasca Keaksaraan Melalui Penguatan

Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Upaya Keberdayaan Perempuan Pedesaan (Studi Pemberdayaan Perempuan Pedesaan di Kampung Cibago, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang).

Dalam penelitian tersebut dipaparkan bahwa pendidikan pasca keaksaraan terpadu yang menggunakan bahasa ibu terbukti mampu menjaga dan meningkatkan kecakapan keaksaraan tapi juga memungkinkan peningkatan taraf hidup. Pembelajaran dalam kelompok mendorong peningkatan tingkat keberdayaan masyarakat. Hal lain yang penting diperhatikan adalah adanya dukungan kelembagaan dari dinas/instansi terkait untuk penyelenggaraan pendidikan pasca-keaksaraan.

Pada pelaksanaannya keaksaraan fungsional merupakan penyempurnaan pendekatan bagi program pemberantasan buta aksara yang menitikberatkan pada proses dari, oleh dan untuk peserta didik dengan strategi pendidikan melalui diskusi, membaca, menulis, berhitung dan aksi. Keaksaraan fungsional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis dan berhitung dengan harapan peserta didik dapat menggunakannya untuk pemecahan masalah dalam kehidupannya sehari-hari dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keaksaraan fungsional juga merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar peserta didik.

Indikator keberhasilan program keaksaraan dalam program pembelajaran pasca-keaksaraan yang terkait dengan kecakapan hidup (*life skills*) lebih ditekankan pada vocational skills. Oleh karena itu, keberhasilan program pembelajaran ini yaitu: pertama program pembelajaran ini memiliki tingkat kesesuaian kebutuhan warga belajar (perempuan) pedesaan, baik peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya serta sumber daya lokal; dan kedua, kebermaknaan model program pembelajaran pasca-keaksaraan yang dikembangkan agar warga memiliki motivasi belajar dan berusaha sehingga muncul

keberdayaan mereka yang disebut: “kesadaran berubah dan kemauan diubah” dari diri sendiri dan/atau bersama orang lain.

Penelitian tersebut memaparkan dua asumsi yakni, Asumsi pertama: pendidikan pasca keaksaraan (*post literacy*) merupakan proses pemberdayaan (*empowering*) yang memungkinkan perempuan mampu mengenali faktor-faktor yang menghalangi perubahan atau perkembangan jender. Asumsi kedua : Keaksaraan merupakan instrumen efektif untuk pembangunan sosial dan ekonomi serta integrasi nasional.

Ketiga, Penelitian yang berkenaan dengan pendidikan keaksaraan berorientasi Budaya Lokal yang dilakukan Shantini (2010:42) yang diantara kesimpulannya memaparkan bahwa: pertama, Strategi andragogik dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang ampuh dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran keaksaraan fungsional dalam rangka meningkatkan mutu layanan. Strategi pembelajaran partisipatif dipilih karena strategi ini sangat memungkinkan dapat dipadukan dengan kondisi budaya masyarakat terutama bahasa. Dalam rangka mendukung pengembangan strategi tersebut, beberapa faktor yang perlu diperhatikan meliputi: (1) Strategi pembelajaran berbasis budaya lokal lebih ditekankan pada kebutuhan belajar yang dirasakan warga belajar, (2) Berorientasi pada tujuan kegiatan pembelajaran, (3) Pendekatan pembelajaran berpusat pada warga belajar (*participant centered*), (4) Pembelajaran yang dikembangkan dalam pendekatan partisipatif berdasar pada pengalaman warga belajar (*experiential learning*). Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan strategi pembelajaran meliputi: a) usia warga belajar. 2) pengalaman warga belajar, dan 3) konsep diri warga belajar. Kedua, kriteria evaluasi yang dapat dikembangkan dan dilakukan dalam pembelajaran keaksaraan fungsional meliputi: 1) evaluasi dikembangkan atas dasar kesepakatan antara warga belajar dan tutor, 2) Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara terbuka dan sesuai dengan kriteria serta kemampuan, keterampilan yang telah dimiliki. 3) Evaluasi bersifat memotivasi diri warga belajar atau dikembangkan citra self evaluation.

Keempat, hasil penelitian lain yang dipaparkan Jajat S. Ardiwinata, (2010:92) yang berjudul Model Akselerasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Untuk Mencapai Kemandirian Dan Keberlanjutan Belajar Warga Belajar, dipaparkan bahwa keterlibatan warga belajar dalam pengelolaan pembelajaran diperoleh beberapa keuntungan, yakni: (1) hasil belajar menjadi lebih tinggi, (2) kualitas belajar menjadi lebih baik, (3) motivasi berprestasi tinggi, (4) adanya penerimaan perasaan karena keterlibatan emosi dan mental selama proses pembelajaran, (5) harga diri warga belajar menjadi lebih tinggi, (6) meningkatnya kerja sama di antara warga belajar, (7) keinginan mencapai tujuan sangat besar, (8) tingkat ketidakhadiran (absen) menjadi lebih rendah.

Analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa gerakan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) baru dipahami sebagai komitmen internasional dan kebijakan di tingkat nasional, pada level bawah (grass roots) masih belum secara optimal dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan belum semua elemen aparat di lapangan memiliki apresiasi yang sama, rendahnya pemahaman, dan dukungan masyarakat. Untuk itu, ada beberapa faktor yang dipandang sangat menentukan terhadap dapat terselenggaranya penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan. Beberapa faktor dominan tersebut paling tidak mencakup dua aspek besar, yaitu: (1) Aspek internal karakteristik warga belajar, (2) Aspek lingkungan belajar, terutama karakteristik keluarga, keberadaan dan peran-peran penyelenggara, tutor dan pendamping, keterlibatan tokoh masyarakat serta unsur aparat terkait dengan program, khususnya penilik PLS atau dinas pendidikan setempat, (3) Aspek manajemen, berkenaan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan, terutama terkait dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian atau koordinasi, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan tindak lanjut atau pengembangan.

Kelima, penelitian yang mendeskripsikan tingkat keberaksaraan warga belajar yang dilakukan oleh Tri Widayanti dan Dollar Sihombing (2012) dengan judul penelitian Pengembangan Bahan Belajar Keaksaraan Berbasis Cerita Rakyat Kutai Kalimantan Timur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya pengentasan buta

aksara di Kalimantan Timur telah memberikan hasil yang signifikan. Pada tahun 2009 penduduk buta aksara di Kalimantan Timur berjumlah 51.1889 orang dan pada tahun 2010 telah berkurang menjadi 31.625 orang, artinya terdapat penurunan jumlah buta aksara sampai 60.9%. Salah satu faktor dominan dalam penurunan jumlah buta aksara dimaksud adalah kemampuan tutor dalam pembelajaran, terutama pada aspek tutor dalam membantu kesiapan warga belajar dalam mengikuti pembelajaran dengan pendekatan cerita rakyat, tutor ketika memotivasi warga belajar dalam mengikuti pembelajaran dan tutor dalam mengkonfirmasi tema cerita rakyat yang dipelajari.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan yang telah berjalan cukup lama dan dilakukan oleh berbagai lembaga dengan berbagai pendekatan. Hampir semua hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sangat efektif apabila menggunakan media dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, baik melalui budaya maupun lingkungan sekitar. Umumnya tingkat keberaksaraan perlu dipertahankan keberlanjutannya untuk menghindari kembalinya pada ketidakberaksaraan masyarakat yang sudah melek aksara.

Keenam, Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Vike Margaretna Sunarko Putri (2010) yang berjudul Pengaruh tingkat kemampuan keaksaraan, status sosial ekonomi, lingkungan keluarga terhadap gairah melestarikan kemampuan keaksaraan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kemampuan keaksaraan terhadap gairah melestarikan kemampuan keaksaraan. Dengan sumbangan efektif tingkat kemampuan keaksaraan 15, 2%, (2) ada pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap gairah melestarikan kemampuan keaksaraan. Dengan sumbangan efektif status sosial ekonomi 16, 8%, (3) ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga terhadap gairah melestarikan kemampuan keaksaraan. Dengan sumbangan efektif lingkungan keluarga 27,8%, (4) ada pengaruh yang signifikan antara tingkat

kemampuan keaksaraan, status sosial ekonomi, lingkungan keluarga terhadap gairah melestarikan kemampuan keaksaraan. Dengan koefisien determinasi 59,8%, artinya besarnya sumbangan variabel kemampuan keaksaraan, status sosial ekonomi, lingkungan keluarga sangat tinggi terhadap gairah melestarikan kemampuan keaksaraan. Dengan demikian tingkat kemampuan keaksaraan, status sosial ekonomi, dan lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat tinggi (kuat) terhadap gairah melestarikan kemampuan keaksaraan.

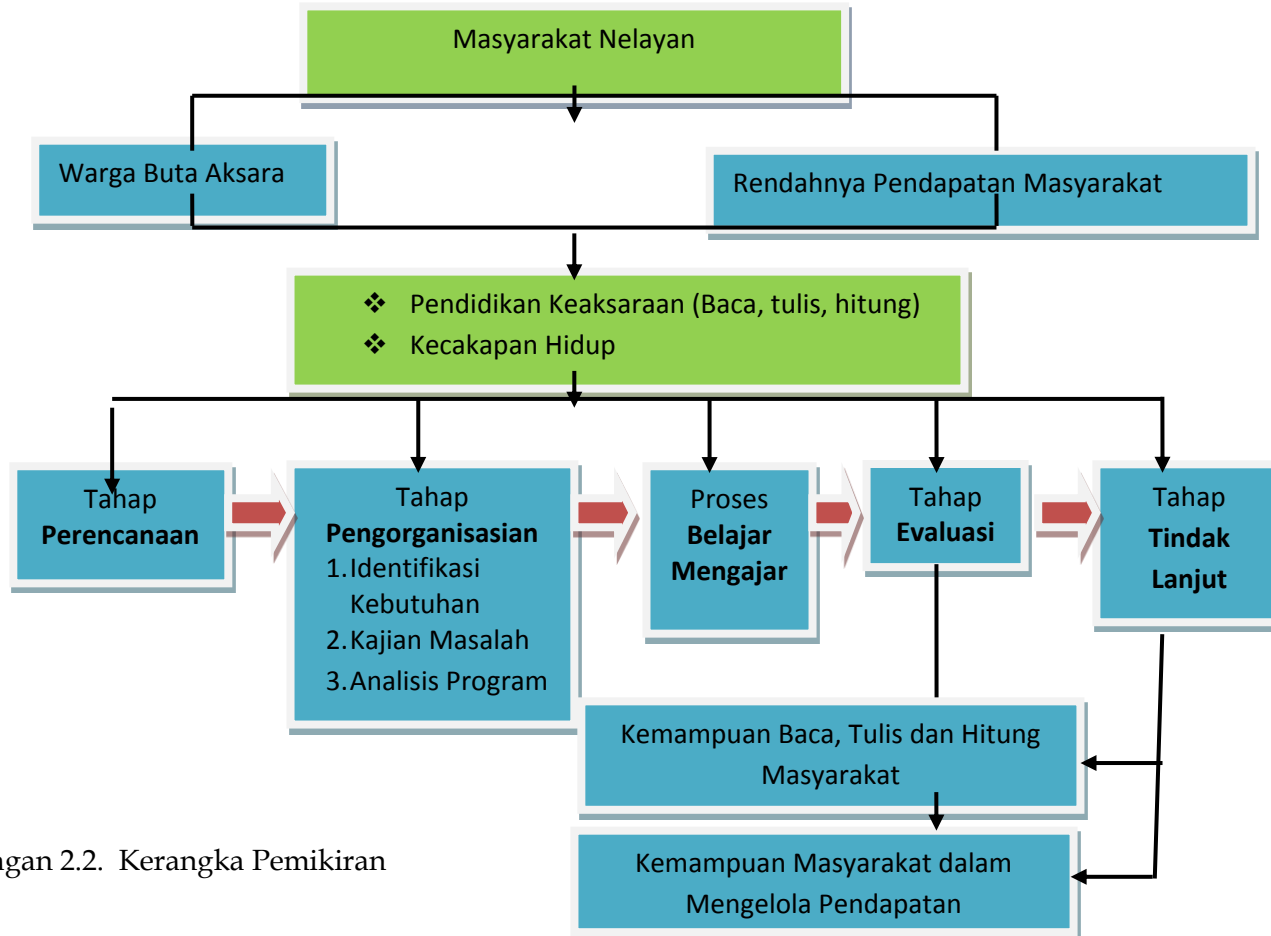
F. Kerangka Pemikiran

Pemikiran yang mengantarkan perlunya pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup diawali oleh analisis terhadap pemaknaan pendidikan keaksaraan secara global yang mengalami perluasan makna. Pendidikan keaksaraan saat ini bukan hanya berfokus pada masalah kesenjangan kecakapan membaca, menulis dan berhitung, tetapi hal itu juga menyangkut kecakapan hidup (penguasaan keterampilan praktis) yang kontekstual dan selaras dengan perubahan dan kebutuhan pelakunya. Oleh karena itu, dalam pendidikan keaksaraan, pendekatan mutu diwujudkan melalui muatan kecakapan hidup (*lifeskill*) yang dapat mengantarkan para lulusannya memperoleh mata pencaharian melalui pembukaan usaha baru atau keterampilan dunia usaha.

Hasil analisis awal terhadap pendidikan keaksaraan, diketahui pendidikan keaksaraan belum mengintegrasikan kegiatan pemberantasan buta huruf dengan kegiatan produktifitas ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Pendidikan keaksaraan masih sangat tidak proposional, artinya bahwa kemampuan calistungdasi (membaca, menulis, berhitung dan berdiskusi) masih sangat dominan daripada porsi penumbuhan kecakapan personal, kecakapan sosial, maupun kecakapan vokasional; dan sifatnya pun masih sangat sektoral. Warga belajar sebagai sasaran pendidikan keaksaraan yang melek huruf belum signifikan dengan peningkatan pendapatan yang seharusnya mereka peroleh setelah mampu membaca, menulis dan berhitung. Atau dalam bahasa lain, kemampuan calistung yang dimiliki warga belajar belum dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan pendapatannya.

Dalam kajian lebih spesifik, tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus masih perlu peningkatan. Rendahnya keberaksaraan masyarakat telah mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu pendidikan keaksaraan bagi masyarakat sehingga kemampuan membaca, menulis dan berhitung mereka meningkat. Supaya tujuan tercapai maka penyelenggaraan pendidikan keaksaraan selayaknya dilakukan melalui tahap-tahap penyelenggaraan pendidikan keaksaraan secara berjenjang yakni melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, proses pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.

Penelitian ini mendeskripsikan sisi lain dari kegiatan pendidikan keaksaraan yang berbasis pendidikan kecakapan hidup yang dilakukan masyarakat nelayan, sekaligus mengukur tingkat keberhasilan atau efektifitas program pendidikan keaksaraan tersebut pada tahap perencanaan, tahap penyelenggaraan, tahap evaluasi dan tahap tindak lanjut, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Kerangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.2. Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Umum Wilayah Desa Jaring Halus

Kegiatan penelitian dilakukan pada masyarakat nelayan yang berada di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Wilayah Kabupaten Langkat berada di provinsi Sumatera Utara, secara astronomis Kabupaten Langkat terletak pada koordinat $3^{\circ}14' - 4^{\circ}13' \text{ LU}$ dan $97^{\circ}52' - 98^{\circ}45' \text{ BT}$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, Sebelah barat berbatasan dengan Prop. NAD dan Tanah Ala Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Luas keseluruhan Kabupaten Langkat adalah 6,263.29 km² atau 626.329 Ha.

Secara topografi wilayah Kabupaten Langkat dapat digolongkan atas tiga bagian, yaitu: (a) Wilayah pesisir pantai dengan ketinggian 0 – 4 m di atas permukaan laut, (b) Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 4 – 30 m di atas permukaan laut, (c) Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 30 – 1.200 m di atas permukaan laut.

Keadaan kelerengan di daerah ini didominasi kelerengan 0 – 2 % sebesar 59,40 % dari luas Kabupaten Langkat. Kelerengan terkecil adalah kelerengan 15 – 40 % sebesar 6,8 % dari luas lahan. Daerah ini dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil, melalui kecamatan dan desa-desa, diantara sungai-sungai tersebut adalah Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lapan, Sungai Besitang dan lain-lain. Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk pengairan, perhubungan dan lain-lain. (Data Statistik Kantor BPS Kab. Langkat, 2012)

Salah satu kecamatan di wilayah kabupaen Langkat yang dijadikan sasaran penelitian adalah Kecamatan Secanggang. Berdasarkan peta demografis Kecamatan secanggang memiliki luas

223,27 km, dengan jumlah penduduk 63.820 jiwa, dengan 14 desa dan 3 kelurahan, perjalanan darat dari kota medan ke desa jaring halus ditempuh jalur darat selama 3 jam dengan jarak tempuh 65 km, lalu dari desa tanjung ibus ke desa jaring halus hanya melalui jalur air atau muara dengan memakai perahu nelayan sebagai satu-satunya jalur transportasi yang ditempuh selama 55 menit, atau jarak sekitar 7 km. (Data Monografi Kec. Secanggang, Tahun 2012)

Desa Kepulauan Jaring Halus sebagai daerah potensial di Kecamatan Secanggang yang masyarakatnya dijadikan sasaran penelitian tentang pendidikan keaksaraan. Desa Jaring Halus memiliki luas wilayah 21, 25 km persegi, dengan batas desa bagian utara berbatasan dengan selat malaka, selatan dengan desa secanggang, timur dengan desa silotong, bagian barat tanjung pura. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3135 jiwa dengan 731 KK, 1558 laki-laki, 1577 perempuan, dengan mata pencaharian 64 KK petani, pedagang 32 orang, PNS 3 orang, nelayan sebanyak 1350 orang. (Data Monografi Desa Jaring Halus Tahun 2012)

2. Analisis Masalah Masyarakat Desa Jaring Halus

Berdasarkan hasil observasi terhadap masyarakat di Desa Kepulauan Jaring halus, diketahui bahwa secara objektif kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Kepulauan Jaring Halus, umumnya terfokus pada aspek rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Kondisi sosial ekonomi tersebut sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dan hal tersebut tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah atau usia produktif karena ketidakmampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit keluarga, serta tingginya tingkat penyandang buta aksara di kalangan masyarakat terutama usia produktif.

Persoalan tingginya jumlah buta aksara pada masyarakat Desa Kepulauan Jaring Halus merupakan problem tersendiri bagi pemerintah setempat, terutama pada masyarakat dipesisir pantai yang mata pencahariannya adalah nelayan. Mereka umumnya kurang memahami pentingnya pendidikan, dan selama ini mereka

lebih banyak mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek pendidikan. Sebagian besar penduduk di daerah pantai ini tidak menamatkan pendidikan dasar dan proses pendidikan pada anak-anaknya dilakukan melalui pendidikan tradisional yang secara alamiah bersumber dari pengalaman orang tuanya terutama tentang menangkap ikan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini difokuskan untuk melihat 6 (enam) hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, (2) Pengelolaan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, (3) Proses pembelajaran keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, (4) Tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Jaring Halus, (5) Kemampuan mengelola pendapatan pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, (6) Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus.

1. Tingkat Keberaksaraan Masyarakat Nelayan di Desa Jaring Halus.

Tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan sebagai warga belajar program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus diukur berdasarkan lima aspek keberaksaraan. Kelima aspek tingkat keberaksaraan tersebut, yaitu: (1) tingkat keberaksaraan mendengarkan, (2) tingkat keberaksaraan berbicara, (3) tingkat keberaksaraan membaca, (4) tingkat keberaksaraan menulis, dan (5) tingkat keberaksaraan berhitung.

Data tentang tingkat keberaksaraan dilakukan terhadap responden penelitian sebagai warga belajar program pendidikan keaksaraan sebanyak tiga orang yang dipilih secara *purposive*. Alasan penentuan tiga orang responden didasari oleh argumentasi bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan warga belajar selaku responden penelitian relatif homogen (sama).

Ketiga responden penelitian yaitu Bapak JF salah seorang warga belajar yang dilahirkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 20 April 1973. Bapak JF berjenis kelamin laki-laki beralamat di Desa Jaring Halus yang saat ini berprofesi sebagai nelayan. Responden yang kedua adalah Bapak JH juga warga belajar pendidikan keaksaraan di desa Jaring Halus yang dilahirkan di Langkat pada tanggal 18 Mei 1980. Saat ini Bapak JH berprofesi sebagai nelayan. Responden yang berikutnya adalah Ibu RS yang dilahirkan di Langkat pada tanggal 13 Juli 1973. Saat ini Ibu RS tinggal di Desa Jaring Halus dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi yang memuat tingkat keberaksaraan tentang aspek mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung. Masing-masing aspek memiliki indikator dan pada setiap indikator ditetapkan interval skornya. Dengan demikian akan terukur secara tepat kompetensi atau tingkat keberaksaraan ketiga warga belajar yang dijadikan sampel penelitian.

Kegiatan observasi pada aspek keberaksaraan mendengarkan dilakukan dengan cara membuat wacana keberaksaraan, melalui tahap sebagai berikut: (1) Tutor membuat/ menyiapkan wacana/bacaan (misalnya undangan pertemuan rutin dasa wisma, aturan penggunaan obat/kosmetik), (2) Tutor membacakan wacana yang telah disiapkan, (3) warga belajar mendengarkan/menyimak wacana yang dibacakan oleh Tutor, (4) Tutor bertanya kepada warga belajar tentang isi bacaan, (5) warga belajar menceritakan kembali isi bacaan, (6) Tutor menilai kemampuan mendengarkan (pemahaman) berdasarkan kemampuan menceritakan kembali isi wacana yang dibacakan oleh Tutor.

Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan berbicara warga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor menunjukkan sebuah gambar (poster) keadaan hutan yang rusak kepada warga belajar, (2) Tutor bertanya kepada warga belajar mengenai gambar/poster yang ditunjukkan, (3) Tutor meminta WB menceritakan isi pesan yang terdapat di dalam gambar/ poster yang ditunjukkan, (4) Warga belajar menceritakan isi pesan yang terdapat di dalam gambar/ poster yang ditunjukkan sebagaimana yang

diminta Tutor, (5) Tutor menilai kemampuan berbicara Warga Belajar melalui kemampuannya bercerita.

Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan membaca, warga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor menyediakan sebuah wacana/ cerita yang sesuai dengan karakteristik warga belajar (kegiatan pertanian, kehidupan rumah tangga, pemilihan umum, dll), (2) Warga belajar membaca wacana/ cerita, (3) Tutor menilai kemampuan warga belajar dalam membaca khususnya penggunaan tanda baca, intonasi.

Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan menulis, warga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor meminta warga belajar menulis sebuah surat, misalnya surat izin untuk tidak mengikuti kegiatan belajar karena akan mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, (2) Tutor menilai kemampuan menulis warga belajar melalui penilaian hasil tulisannya.

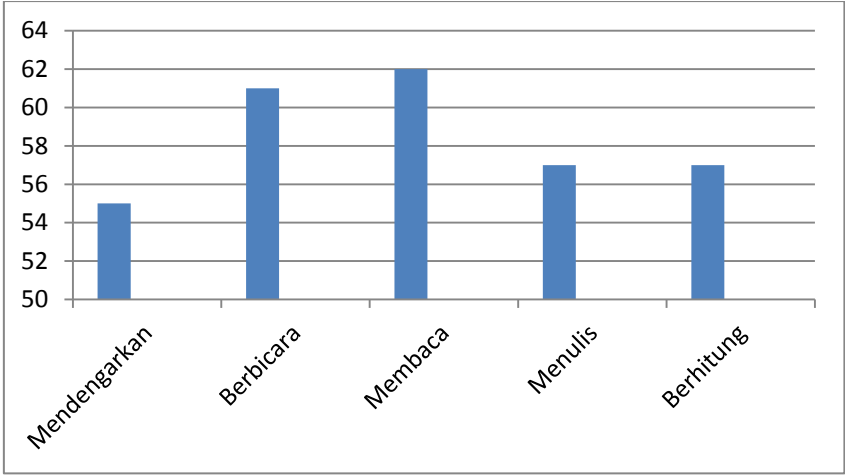
Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan berhitung, warga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor membuat/menyiapkan soal berhitung dengan menggunakan empat simbol hitung (pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian), (2) Soal dibuat dalam bentuk soal cerita, (3) Tutor meminta warga belajar mengerjakan, (4) Tutor menilai kemampuan berhitung warga belajar. Data skor hasil tes penilain keaksaraan warga belajar berkenaan dengan data mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung selanjutnya ditafsirkan (penafsiran data) secara kualitatif berdasarkan tabel standar mutu, yaitu rentang skor 50-60 artinya kurang, 61-70 artinya sedang, 71-80 artinya cukup, 91-90 artinya baik, 91-100 artinya sangat baik.

Berdasarkan jumlah skor hasil penelitian dan memperhatikan standar konversi tentang mutu keberaksaraan yang digunakan pengelola pendidikan keaksaraan, maka tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus dapat dianalisis pada dua hal yakni, pertama tingkat keberaksaraan seluruh responden penelitian pada setiap aspek, kedua tingkat keberaksaraan setiap responden berdasarkan seluruh aspek-aspek keaksaraan.

Tingkat keberaksaraan seluruh responden penelitian pada setiap aspek keaksaraan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)

kompetensi mendengarkan seluruh responden, skor total sebesar 166 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 55 atau termasuk kategori kurang. (2) kompetensi berbicara seluruh responden, skor total sebesar 184 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 61 atau termasuk kategori sedang, (3) kompetensi membaca seluruh responden, skor total sebesar 185 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 62 atau termasuk kategori sedang, (4) kompetensi menulis seluruh responden, skor total sebesar 170, dengan skor rata-ratanya mencapai angka 57 atau termasuk kategori kurang, dan (5) kompetensi berhitung seluruh respnden, smkor total sebesar 172, dengan skor rata-ratanya mencapai angka 57 atau termasuk kategori kurang. Data tersebut dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik. 4.1
Tingkat Keberaksaraan Seluruh Responden Pada Setiap Aspek
Keaksaraan Sebelum Mengikuti Pendidikan Kekasaran

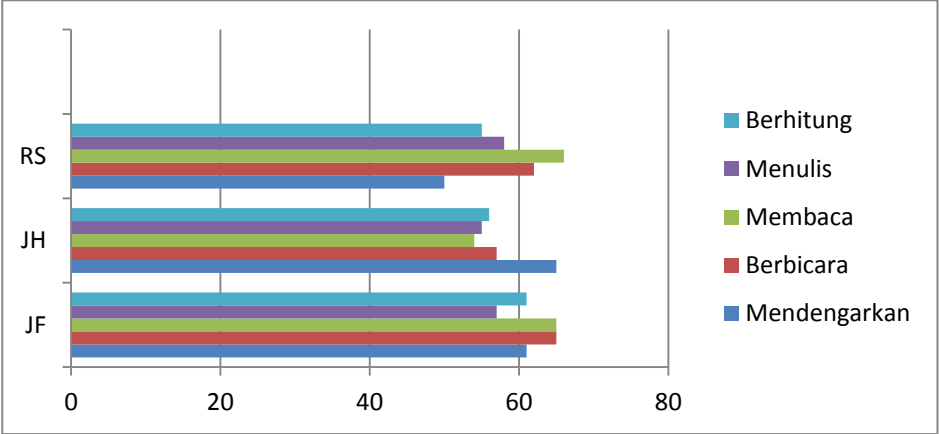


Sumber: Data Hasil Analisis Penelitian (2012)

Tingkat keberaksaraan setiap responden berdasarkan aspek-aspek keaksaraan, diketahui data sebagai berikut: pertama, kemampuan keberaksaraan Bapak JF untuk aspek mendengarkan

mencapai skor 61, aspek berbicara mencapai skor 65, aspek membaca mencapai skor 65, aspek menulis mencapai skor 57, dan aspek berhitung mencapai skor 961. Dengan demikian skor totalnya mencapai 309 dengan skor rata-rata mencapai angka 61,8 atau termasuk kategori sangat sedang. Kedua, kemampuan keberaksaaan Bapak JH untuk aspek mendengarkan mencapai skor 55, aspek berbicara mencapai skor 57, aspek membaca mencapai skor 54, aspek menulis mencapai skor 55, dan aspek berhitung mencapai skor 56. Dengan demikian skor totalnya mencapai 277 dengan skor rata-rata 55,4 atau termasuk kategri sangat kurang. Ketiga, kemampuan keberaksaraan Ibu RS untuk aspek mendengarkan mencapai skor 50, aspek berbicara mencapai skor 62, aspek membaca mencapai skor 66, aspek menulis mencapai skor 58, dan aspek berhitung mencapai skor 55. Dengan demikian skor totalnya mencapai 291 dengan skor rata-rata 58,2 atau termasuk kategori kurang. Data tersebut dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik.4.2
Tingkat keberaksaraan Setiap Responden Berdasarkan Seluruh Aspek Keaksaraan Sebelum Mengikuti Pendidikan Keaksaraan



Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian (2012)

Berdasarkan uraian di atas, maka tingkat keberaksaraan responden baik tingkat kemampuan keaksaraan keseluruhan responden maupun kemampuan setiap individu warga belajar responden penelitian tentang aspek-aspek keaksaraan rata-rata termasuk dalam kategori kurang.

2. Pengelolaan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup Pada Masyarakat Nelayan Di Jaring Halus.

Pengelolaan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Jaring Halus, dideskripsikan dalam dua bagian yaitu, *pertama* memaparkan tentang kondisi kelembagaan dan *kedua* tentang kegiatan pengelolaan program pendidikan keaksaraan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen berkenaan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan program.

a. Kondisi Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Jaring Halus yaitu, Bapak Syahrul yang sehari-harinya selain mengelola program pendidikan keaksaraan juga bekerja sebagai Sekretaris Desa. Menurutny, kondisi kelembagaan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus dapat dianalisis dalam beberapa aspek.

Pertama, berkenaan dengan aspek kondisi warga belajar program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup. Rata-rata usia warga belajar pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup antara usia 20 tahun sampai 50 tahun (PW.P.1). Jumlah peserta yang awalnya hanya 50 orang dengan jumlah perempuan adalah 35 orang dan laki-laki berjumlah 15 orang, selanjutnya bertambah sehingga menjadi 210 orang warga belajar. (PW.P.2). Hal ini nampak dari bertambahnya kebutuhan ruang belajar, dimana jumlah ruang belajar yang disediakan pada awalnya hanya sebanyak 2 ruang belajar kemudian ditambah dengan ruang pertemuan balai desa serta

ada juga yang belajar di rumah penduduk. Sampai akhir pelaksanaan pendidikan jumlah warga belajar yang aktif dan berhak mendapat sertifikat berjumlah 210 warga belajar (PW.P.3). Sejak awal proses pendidikan, tingkat kehadiran warga belajar cukup baik, walaupun tidak sama dengan kehadiran siswa sekolah regular pada pendidikan formal. Dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus, kehadiran warga belajar tidak dipaksakan. Karena kebanyakan warga belajar adalah ibu rumah tangga dan nelayan, sehingga warga belajar bisa mengikuti pembelajaran dengan Tutor disesuaikan dengan waktu yang mereka bisa hadir, ada yang bisa datang siang, ada yang bisa datang habis magrib. Selain itu, rutinitas belajar juga disesuaikan dengan kesiapan Tutor yang mengajar (PW.P.4). Selanjutnya berdasarkan perbandingan jenis kelamin (gender) jumlah warga belajar yang perempuan dan yang laki-laki, ternyata warga belajar jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kalau dipersentasikan kira-kira 30% adalah laki-laki-atau bapak-bapak, yaitu sekitar 65 orang warga belajar. Mereka rata-rata adalah nelayan yang tingkat pendidikannya tidak tamat Sekolah Dasar. Sisanya 70% adalah perempuan yaitu sekitar 145 orang yang rata-rata bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tukang menjemur hasil tangkapan nelayan. Itulah perbandingan jumlah warga belajar yang secara bergantian terus mengikuti program pendidikan keaksaraan (PW.P.5)

Kedua, berkenaan dengan aspek tenaga pendidik. keahlian tenaga pendidik (Tutor) sesuai dengan kurikulum pada pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus. Cara mengajar Tutor melatih warga belajar untuk bisa membaca, menulis dan berhitung cukup baik, karena para pengajar langsung mengajar warga belajar orang perorang pada setiap jam pelajaran dilakukan (PW.P.6). Selain itu, nampak adanya kemampuan tenaga pendidik (Tutor) dalam meningkatkan kemampuan warga belajar untuk mengembangkan jaringan usaha. Menurut pengelola, memang secara umum semua Tutor hanya melakukan pengajaran terhadap warga belajar hampir semuanya untuk belajar membaca, menulis dan berhitung, terutama untuk ibu-ibu warga belajar yang sama sekali

belum bisa membaca. Selama ini belum ada kegiatan belajar yang secara khusus melatih pengembangan usaha, tetapi dalam beberapa kesempatan seringkali Tutor melatih beberapa ibu-ibu warga belajar yang telah lancar membaca dan menulis untuk mengenal penggunaan computer (PW.P.7). Selanjutnya tingkat kehadiran tenaga pendidik (Tutor) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik cukup baik.

Selama pelaksanaan pendidikan keaksaraan belangsung kehadiran para pengajar sangat telaten hadir, sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh para Tutor , kemudian para Tutor juga disediakan tempat tinggal dirumah warga, sehingga mereka selalu hadir pada saat warga belajar sedang mengikuti pelajaran, dengan rincian jumlah Tutor dalam satu ruang belajar minimal ada tiga atau empat orang pada setiap sesi pelajaran, baik siang ataupun malam (PW.P.8). Kalau dilihat dari sisi rasio antara tenaga pendidik (Tutor) yang berjenis kelamin laki laki dan perempuan pada pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus relatif kurang dan masih perlu penambahan jumlah. Saat ini jumlah semua tenaga pengajar yang ada pada pendidikan keaksaraan sebanyak 16 orang, dengan rincian 9 (Sembilan) Tutor laki-laki dan 7 (tujuh) Tutor perempuan, tentunya dari jumlah warga belajar dengan jumlah Tutor sangat terbatas dan tidak seimbang, karena jumlah warga belajar yang kaum ibu sangat banyak, apalagi jumlah Tutor perempuannya juga tidak sebanyak Tutor laki-laki. Sebaiknya memang jumlah Tutor perempuan harus lebih banyak dari Tutor laki-laki (PW.P.9).

Walaupun demikian dengan jumlah yang terbatas para Tutor sebagai tenaga pendidik memiliki banyak upaya yang dapat mendukung pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus. Usaha untuk mendukung agar warga belajar bisa lebih untuk mampu membaca, menulis berhitung terus diupayakan, dimana para Tutor berusaha sedekat mungkin berkomunikasi dengan warga belajar satu demi satu warga belajar, agar warga belajar lebih bisa menerima pelajaran yang diberikan (PW.P.10). Berkenaan dengan pemahaman tenaga pendidik (Tutor) terhadap konsep *life skills* pada pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus, para Tutor mengajarkan cara membaca,

menulis dan berhitung yang relative lebih banyak menggunakan pendekatan bahasa ekonomi. Sehingga pembelajaran lebih aplikatif dan contoh-contoh yang digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sedang mereka lakukan seperti menulis tentang nama-nama ikan, alat-alat menangkap ikan dan kebutuhan lainnya yang relative meningkatkan pemahaman keaksaraan yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang ditekuni warga belajar (PW.P.11). Selain itu, diajarkan pula tentang keaksaraan yang ada hubungannya dengan peningkatan keterampilan lain seperti bahasa yang ada hubungannya dengan cara membuat kaligrafi, membuat produksi bahasa dan bahasa teknis pada keterampilan sebagainya. Oleh karena itu, dukungan para Tutor terhadap pengembangan usaha warga belajar untuk bisa lebih cepat membaca, menulis dan berhitung sangat serius, dimana waktu belajar dan dirumah para Tutor terus membimbing warga belajar dengan harapan dapat dimanfaatkan dan terasah melalui kegiatan usaha (PW.P.12).

Ketiga, pada aspek pengembangan kurikulum belajar, dapat dideskripsikan bahwa dalam pendidikan keaksaraan di Jaring Halus, struktur kurikulum keaksaraan yang digunakan disusun oleh tim yang terdiri atas para Tutor pendidikan keaksaraan di Jaring Halus, Tim Akademisi dari Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU), serta dari pihak perangkat desa setempat (PW.P.13). Berkenaan dengan aspek komposisi kurikulum, ternyata kurikulum memiliki kandungan antara kemampuan keterampilan (*vocational skills*) dan kemampuan sosial (*social skills*) pada pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus. Kurikulum dalam pendidikan keaksaraan tersebut hanya mencakup membaca, menulis, dan berhitung. Jadi keterampilan yang diajarkan difokuskan pada aspek bagaimana warga belajar yang bisa membaca, menulis dan berhitung, karena dari warga belajar yang mengikuti pendidikan keaksaraan tersebut terdiri dari warga yang sama sekali tidak bisa membaca, menulis dan berhitung, kemudian ada juga warga yang sudah bisa membaca, menulis dan berhitung tetapi belum lancar, atau masih mengeja huruf dan angka kemudian juga. Untuk kemampuan keterampilan (*vocational skill*) Tutor juga mengajarkan beberapa keterampilan terhadap warga belajar seperti latihan

membuat bakso dan kaligrafi. Untuk kemampuan sosial dalam kurikulum tersebut tidak dilakukan secara langsung hanya secara tersirat, yaitu Tutor berusaha memperlihatkan cara bergaul yang baik, serta mengajarkan agar warga belajar tidak merasa rendah diri, dan bisa bergaul dengan warga dari luar jaring halus.yaitu para Tutor tidak segan-segan mendatangi rumah para warga untuk bercengkrama dan berdiskusi (PW.P.14).

Komposisi presentase (%) proporsi pada struktur kurikulum antara materi praktek dan teori pada pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus sangat ideal. Dengan pertimbangan bahwa warga belajar lebih banyak yang belum bisa dalam membaca, menulis, dan berhitung, maka dalam jam belajar pada pendidikan tersebut di bulan pertama dan kedua lebih banyak materi praktek yang dilakukan, karena para Tutor langsung mengajari warga belajar satu persatu untuk mengajari warga dalam belajar membaca, belajar menulis dan belajar berhitung. Setelah warga belajar sudah mulai bisa membaca, menulis dan berhitung, di bulan ketiga para Tutor mulai memberikan teori agar warga belajar semakin bisa dan semakin lancar dalam membaca, menulis, dan berhitung, sehingga kalau dipresentase kan, materi praktek lebih banyak di bandingkan teori (PW.P.15).

Untuk menterjemahkan kurikulum yang ada dilakukan pengkajin tentang metode dan teknik pembelajaran yang baik dan tepat. Selama ini strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Tutor pada pendidikan keaksaraan tersebut adalah melakukan *interview* terhadap warga belajar yang belum bisa membaca,menulis, dan berhitung, kemudian warga belajar sudah bisa tapi masih belum lancar membaca, menulis dan berhitung. Karena warga belajar pada pendidikan keaksaraan lebih banyak warga yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Maka pembelajaran yang dilakukan oleh Tutor adalah dengan membimbing langsung dengan warga belajar untuk mengenal huruf-huruf dan angka pada masing-masing warga belajar, dengan cara warga belajar menuliskan langsung huruf demi huruf dan mengejanya , itulah strategi pembelajaran yang secara bertahap terus dilakukan oleh Tutor, baik diruang belajar maupun dirumah warga (PW.P.16)

Strategi pembelajaran dimaksud disusun dalam jadwal pembelajaran. Jadwal belajar pada pendidikan keaksaraan tersebut disusun oleh Tutor dengan perangkat desa yang waktunya disesuaikan dengan waktu luang warga belajar, dimana masing-masing warga belajar didata ke rumah masing-masing waktu mereka yang bisa untuk mengikuti pembelajaran, sehingga disepakati jadwal pembelajaran dilakukan pada siang hari dan malam hari, jadwal pada siang hari terdiri dari 3 (tiga) kelas siang dan 2 (dua) kelas malam dengan masing-masing kelas di bimbing oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang Tutor, dengan waktu yang dibagi secara bergiliran warga belajar dan Tutor (PW.P.17).

Seluruh kegiatan pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup yang diselenggarakan di Desa Jaring Halus selalu didokumentasikan dan dipublikasikan. Proses pendokumentasian dimulai dari pengumpulan dokumen bahan-bahan belajar meliputi alat tulis, buku-buku pelajaran, dokumen warga belajar meliputi pendidikan warga, pekerjaan warga, dokumen jadwal pelaksanaan pembelajaran dan dokumen proses pelaksanaan pendidikan warga belajar. Dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh perangkat desa untuk pendokumenan warga belajar yang akan mengikuti pendidikan keaksaraan, kemudian pihak Tutor atau pihak UMSU dalam pendokumenan bahan-bahan pelajaran, dokumen pelaksanaan pendidikan keaksaraan tersebut. Untuk menginformasikan pendidikan keaksaraan tersebut dilakukan oleh perangkat desa yang menemani langsung tutor untuk menginformasikan dan mendata warga yang mau ikut belajar pendidikan keaksaraan tersebut (PW.P.18).

Keempat, berkenaan dengan aspek bahan belajar dan sarana pembelajaran dapat dijelaskan dalam beberapa hal antara lain, rasio bahan bacaan dengan jumlah semua warga belajar maka tidak seimbang, karena jumlah bahan bacaan semuanya hanya sekitar 70 bahan bacaan, jumlah warga belajar semuanya 210 orang tetapi karena waktu belajar dibagi waktu siang dalam 2 ruang belajar dan 1 ruang belajar untuk malam hari, maka jumlah bahan bacaan tersebut bisa dipakai secara bergantian terkadang warga belajar juga bisa membawa bahan bacaan tersebut ke rumah warga (PW.P.19). Begitu

pula dengan sarana belajar mengajar yang digunakan dalam kegiatan pendidikan keaksaraan masih sangat terbatas. Sarana yang tersedia hanya sebatas ruang belajar, sebanyak 2 ruang belajar kemudian sarana bahan bacaan, praktek belajar membaca, menulis dan berhitung dilakukan hanya pada saat waktu warga belajar yang biasanya dilakukan di ruang belajar dalam waktu sekitar 2 jam, kemudian diluar waktu belajar, terkadang para Tutor juga sering mengajar warga belajar membaca di rumah warga belajar (PW.P20).

Keterbatasan lain adalah berkenaan dengan keterbatasan media pembelajaran. Jenis media pembelajaran hanya bahan bacaan, alat-alat tulis yang digunakan oleh warga belajar sekaligus sebagai media, dalam pembelajaran Tutor lebih sering mengajari langsung ke warga belajar sehingga tidak banyak media yang dipergunakan (PW.P.21).

Kelima, berkenaan dengan aspek tempat belajar. Selama ini ruang belajar yang digunakan oleh warga belajar adalah ruang sekolah SD sebanyak 2 ruang, yang berukuran Rata-rata 8x8 m, kemudian juga sering dipakai ruang belajar di rumah-rumah warga belajar yang rata-rata berukuran 4x5 meter atau di ruang tamu. Dimana dalam satu ruang belajar sering diisi oleh 20- 30 warga belajar (PW.P.22). Proses pengadaan tempat belajar di siapkan pengelola dengan meminjam ruang belajar SD, sebanyak 2 ruangan, dalam satu ruang belajar terdiri dari 30 kursi kayu dan meja kayunya. karena anak sekolah SD dari pagi sampai jam 1 (PW.P.23). Kemudian juga disiapkan rumah warga pada malam hari, bagi warga belajar yang tidak bisa belajar siang hari. Ruang belajar yang terdiri dari ruang kelas memiliki 30 kursi dan meja belajar, karena jam belajar warga belajar tidak di jadwalkan kepada semua warga belajar untuk mengikuti jam pelajaran maka meja dan kursi ruang belajar yang ada cukup untuk warga belajar. Sesuai dengan waktu pelajaran yang ditentukan (PW.P.24).

Berkenaan dengan kebersihan tempat belajar, dapat dikatakan bahwa ruang belajar masih kurang bersih walaupun untuk ukuran ruang belajar cukup memadai. Kebersihannya tempat belajar nampak sangat kurang layak untuk tempat belajar, pada saat air laut pasang yang airnya bisa sampai ke arena ruang kelas, dan saat surut banyak sampah yang tinggal dan ruang kelas dalam keadaan lembab.

Karena pendidikan keaksaraan warga belajarnya adalah nelayan dan rata-rata ibu rumah tangga maka Tutor berupaya memaksimalkan kebersihan ruang belajar bersama warga belajar yang umumnya terbiasa bekerja (PW.P.25). Selanjutnya berkenaan dengan proporsi tempat belajar, selama ini ruang belajar dan ruang praktek untuk warga belajar sekaligus dalam ruangan belajar yang di sediakan, karena dalam ruang belajar tersebut belajar dan praktek sekaligus di lakukan oleh warga belajar yang dibimbing oleh para Tutor (PW.P.26).

Keenam, berkenaan dengan aspek mitra kerjasama, nampaknya pengelola masih terbatas dalam membuka jaringan atau akses kerjasama. Jumlah mitra kerja dalam pendidikan keaksaraan tersebut masih didominasi oleh kerjasama sesama pengelola dalam hal ini perangkat desa (lurah, sekretaris lurah, dan kepala dusun), kepala dusun membantu para Tutor untuk pendataan warga yang akan mengikuti pendidikan keaksaraan dan para Tutor yang disiapkan dari UPKIM UMSU (PW.P.26). Dengan demikian, belum ada kelompok lembaga mitra kerja dalam pendidikan keaksaraan tersebut, hanya pihak perangkat desa dan dari UPKIM UMSU yang dibantu oleh para Tutor. Jadi walaupun ada mitra kerja yang dimaksud adalah hanya pihak UPKIM UMSU dan perangkat desa saja (PW.P.28.). Selama ini pihak UPKIM dan para Tutor sangat membantu proses pendidikan keaksaraan tersebut mulai dari menyiapkan bahan belajar, dan alat tulis belajar semua disiapkan oleh pihak UPKIM dan para Tutor (PW.P.29). Selanjutnya cakupan mitra kerjasama pendidikan keaksaraan tersebut dilaksanakan di desa jaring halus dengan 5 (lima) dusun, jadi warga belajar yang menjadi peserta pendidikan keaksaraan diambil dari warga ke lima dusun tersebut (PW.P.30).

Ketujuh, berkenaan dengan aspek proses pelaksanaan pendidikan keaksaraan, kegiatan pembelajaran diselenggarakan dengan pendekatan manajemen pendidikan luar sekolah. Dalam implementasinya, proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dilakukan secara sistematis, dimana langkah-langkah pembelajaran tersebut dimulai dari pendataan warga dari lima dusun tersebut, setelah warga terdata, maka pusat informasi pelaksanaan belajar

dipusatkan di kantor lurah, kemudian ditetapkan jam belajar untuk warga belajar jadwal siang dimulai sekitar pukul 2 siang sampai pukul 4 sore, bagi warga belajar yang punya waktu pada jam tersebut diperkenankan hadir untuk belajar.

Kehadiran warga belajar tidak bisa ditentukan setiap harinya. Selanjutnya warga belajar berkumpul di tempat belajar yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari kantor lurah, didalam ruang belajar masing-masing warga belajar diberi alat tulis dan buku bacaan, kemudian Tutor mulai mengenalkan apa materi yang akan dipelajari, karena dalam ruang belajar ada 3 sampai 4 orang Tutor, maka satu orang Tutor menjelaskan materi (membaca, menulis, dan berhitung), para Tutor yang lainnya membimbing langsung warga belajar untuk menghafal, menulis dan membaca materi yang di pelajari pada setiap sesinya. Demikian juga pada jadwal malam hari, cara belajar dilakukan oleh Tutor yang berbeda dan warga belajar yang tidak mengikuti jam belajar siang hari (PW.P.31). Waktu belajar yang dilakukan warga belajar dan para Tutor dalam waktu yang ditentukan maksimal sekitar 2 jam sehari untuk jam belajar siang hari dan 1 sampai 1 jam 30 menit untuk warga belajar yang belajar malam hari, dimana kadang-kadang 1 Tutor dari 3 Tutor membimbing warga belajar sekitar 5 sampai 7 menit secara bergantian untuk setiap warga belajarnya (PW.P.32).

Kedelapan, berkenaan dengan dana belajar, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan selama ini masih ditanggung secara swadaya serta memanfaatkan dana bantuan dari pihak luar. Oleh karena itu, dalam pendidikan keaksaraan tidak ada biaya khusus, biaya yang digunakan hanya untuk keperluan operasional belajar warga belajar, dan para Tutor bersumber dari pihak kelurahan/desa setempat (PW.P.33). Biaya untuk makan para Tutor semalam pendidikan keaksaraan di tanggung oleh pihak UPKIM UMSU (PW.34). Selama ini pihak pengelola (perangkat desa) tidak ada menerima bantuan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk bantuan apapun (PW.P.35).

Kesembilan, hasil dari kegiatan pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup sudah banyak dirasakan oleh warga belajar dan nampak dalam peningkatan kemampuan dalam

berbahasa warga belajar, terutama kemampuan menulis, membaca, dan berhitung terutama bagi warga belajar yang sebelumnya tidak mempunyai kemampuan baca, tulis dan hitung akibat putus sekolah. Dari keseluruhan warga belajar yang mengikuti pendidikan keaksaraan dari bulan pertama sampai bulan ketiga ada sekitar 60 warga yang putus belajar artinya mereka pernah sekolah dasar tetapi tidak sampai tamat, sisanya sekitar 150 warga belajar adalah berwirausaha dalam hal ini adalah sebagai nelayan dan istri nelayan atau ibu rumah tangga yang kesehariannya menjemur/mengasinkan hasil tangkapan nelayan (PW.P. 36). Hal yang paling terlihat adalah dalam hal semangat warga belajar dalam hal penguasaan mereka dalam membaca, menulis dan berhitung, selanjutnya juga terjadi perubahan terhadap warga belajar dalam mengelola dan merubah cara pandang mereka terhadap pengaturan kehidupan terutama tentang motivasi terhadap anak-anak mereka agar terus bersekolah. Mereka cukup menyadari pentingnya bisa membaca, menulis dan berhitung, tetapi untuk pengelolaan pola hidup warga belajar terutama peningkatan kehidupan warga belajar pada masing-masing keluarga mereka, masih belum banyak berubah. Walaupun demikian, umum mereka mengalami ada peningkatan pada motivasi dan kesadaran warga belajar, terutama dalam hal berusaha. Dalam implementasinya, kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang mereka miliki telah banyak digunakan terutama ketika mereka melakukan proses transaksi penjualan hasil pengasinan ikan (PW.P.37).

Keberlangsungan menjalankan mata pencaharian yang selama ini mereka lakukan telah banyak dipengaruhi oleh hasil belajar pada program pendidikan keaksaran berbasis kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh pihak desa setempat. Sekurang-kurangnya dalam proses menjalankan mata pencaharian sehari-hari terutama memenuhi kebutuhan bahan untuk dijual, melakukan transaksi jual beli serta mengemas barang jualan ikan hasil penangkapan jauh lebih baik bila dibandingkan sebelum mereka mengikuti pendidikan keaksaraan, sehingga berdampak terhadap ketertiban kegiatan usahanya serta penambahan pendapatan hasil usahanya (PW.P.38).

Kalau secara kuantitatif atau diangkakan, peningkatan pendapatan warga belajar tersebut, kita tidak bisa melihatnya ada perubahan secara cepat, karena semua warga belajar pendidikan keaksaraan tersebut adalah nelayan, apalagi mereka bertumpu pada hasil dari laut yang berpengaruh pada baik tidaknya cuaca atau iklim di laut, maka dalam waktu singkat kita tidak bisa mengukur peningkatan pendapatan wargabelajar, kalau di persenkan adanya peningkatan penghasilan warga belajar paling sekitar 3 % sampai 7 %, atau yang bisa kita lihat dari total 210 warga belajar pendidikan keaksaraan ada perubahan peningkatan pendapatan warga belajar itu sekitar 7 sampai 13 warga belajar saja, setelah mengikuti pendidikan keaksaraan ini, tetapi motivasi mereka dalam bekerja dan intensitas mereka untuk melaut telah banyak meningkat (PW.P.39). Ada hal yang menarik dalam pengelolaan hasil usaha, yaitu kemampuan warga belajar pada proses hasil transaksi penjualan yang lebih tertib sehingga diperkirakan jumlah pendapatan hasil penjualan akan meningkat (PW.P.40).

Pada sisi lain para motivasi pengelola pendidikan keaksaraan di Jaring Halus, hanya untuk membantu warga belajar belum berorientasi terhadap peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan pengelolaan pendidikan keaksaraan. Berdasarkan hasil wawancara, mereka mengungkapkan bahwa pendapatan khusus dari pengelolaan pendidikan keaksaraan, seluruh pengelola tidak ada yang menerima, jadi pendapatan mereka tetap berjalan sebagaimana biasa, dalam arti honor dari pemerintah kabupaten, dan juga ada hasil kegiatan menangkap ikan, karena sebagian besar pengelola juga merupakan nelayan (PW.P.41).

Kesepuluh, berkenaan dengan tindak lanjut program pendidikan keaksaraan, disampaikan para pengelola, bahwa mereka pengelola dari perangkat Desa Jaring Halus berharap program ini terus dilanjutkan agar semua warga Jaring Halus tidak ada lagi yang tidak bisa membaca dan menulis, dan mereka akan mendukung penuh jika ada program lain yang sejenis akan dilaksanakan di Desa Jaring Halus ini (PW.P.42). Jaminan masyarakat dan aparat desa untuk terus melanjutkan program pendidikan keaksaraan cukup tinggi. Tentunya kalau pengelola dari perangkat Desa Jaring Halus

berharap program ini terus dilanjutkan agar semua warga Jaring Halus tidak ada lagi yang tidak bisa membaca dan menulis, dan kita akan mendukung penuh jika ada program yang sama dilaksanakan di Desa Jaring Halus ini (PW.P.43). Untuk menjamin kegiatan pendidikan keaksaraan berjalan terus diperlukan dana. Oleh karena itu, pada waktu-waktu yang akan datang kita berharap ada keberlangsungan program pendidikan keaksaraan ini dengan sumber dana tentunya kita berharap dukungan dari pemerintah pusat dan dari daerah (PW.P.44).

b. Pengelolaan Program

Hasil wawancara dengan pengelola tentang penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang diselenggarakan pada masyarakat Nelayan di Jaring Halus dapat dianalisis berdasarkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan luar sekolah, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan program.

Pertama, tahap perencanaan program diawali dengan kegiatan identifikasi kebutuhan. Langkah-langkah yang dilakukan dimulai dengan kegiatan perangkat desa (kepala dusun) melakukan pendataan warga dusun pada lima dusun di Desa Jaring Halus, dengan mendata warga yang belum mampu, belum bisa membaca, menulis, berhitung (calistung), kemudian menyesuaikan kesediaan warga untuk menjadi warga belajar pada pendidikan keaksaraan. (PW.P.45) Langkah selanjutnya merumuskan tujuan diselenggarakannya program pendidikan keaksaraan dengan mengadakan koordinasi dengan semua pengelola (kades, sekdes, kadus) kemudian dengan pihak Userta dengan semua Tutor yang telah ditunjuk dari pihak Unit Kegiatan Komunitas Ilmiah Mahasiswa (UPKIM) dan Kampus UMSU. Adapun rumusan secara umum tujuan program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus adalah bagaimana warga belajar pada pendidikan keaksaraan mampu membaca, mampu menulis dan mampu berhitung dengan baik dan benar (PW.P.46).

Berdasarkan rumusan tujuan tersebut. Disusun kurikulum pembelajaran. Kurikulum pendidikan keaksaraan pada pendidikan

keaksaraan tentunya disusun sesuai dengan program pemberantasan buta aksara, dengan berkoordinasi dengan semua pihak yang mengelola (kades, sekdes, kadus), pihak Unit Kegiatan Komunitas Ilmiah Mahasiswa (UPKIM) dan para Tutor. Adapun pendidikan keaksaraan tersebut memiliki kurikulum secara umum (membaca, menulis, berhitung) tentunya dilakukan oleh tim dari UMSU, para Tutor serta dari pihak perangkat desa. (PW.P.47) Setelah memiliki kurikulum, selanjutnya proses rekrutmen tenaga pendidik. Selama ini tenaga pendidik atau sumber belajar pendidikan keaksaraan di Jaring Halus dilakukan oleh aparat desa setempat dengan pembinaan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). (PW.48)

Pada tahap selanjutnya pihak pengelola menyusun jadwal kegiatan pendidikan keaksaraan bagi masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan dilaksanakan dari hari senin sampai sabtu. Kemudian pelaksanaan belajar dilaksanakan pada siang hari mulai sekitar pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.30 WIB dan dengan ruang belajar dilaksanakan antara 2 sampai 3 ruang belajar, yaitu ruang sekolah SD dan rumah warga belajar. Kemudian pada malam hari jam belajar dilaksanakan pada pukul 19.10- 21.00 WIB. Itulah jadwal rutin pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, kemudian khusus pada hari kamis sekali dalam seminggu setiap hari kamis dilaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, dan setiap minggu pagi dilaksanakan pelaksanaan senam pagi, dan pada malam rabu dilaksanakan pengajian Al-Qur'an. Contoh jadwal pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Jadwal Kegiatan Pendidikan Keaksaraan di Desa Jaring Halus

Hari	Waktu	Materi
Senin	14.00-15.00	Membaca
	15.00-16.20	Praktek Membaca
Selasa	14.00-15.00	Membaca
	15.00-16.20	Praktek Membaca

Rabu	14.00-15.00	Menulis
	15.00-16.20	Praktek Menulis
Kamis	14.00-15.00	Menulis
	15.00-16.20	Praktek Menulis
Jumat	14.00-15.00	Berhitung
	15.00-16.20	Praktek Berhitung
Sabtu	14.00-15.00	Berhitung
	15.00-16.20	Praktek Berhitung

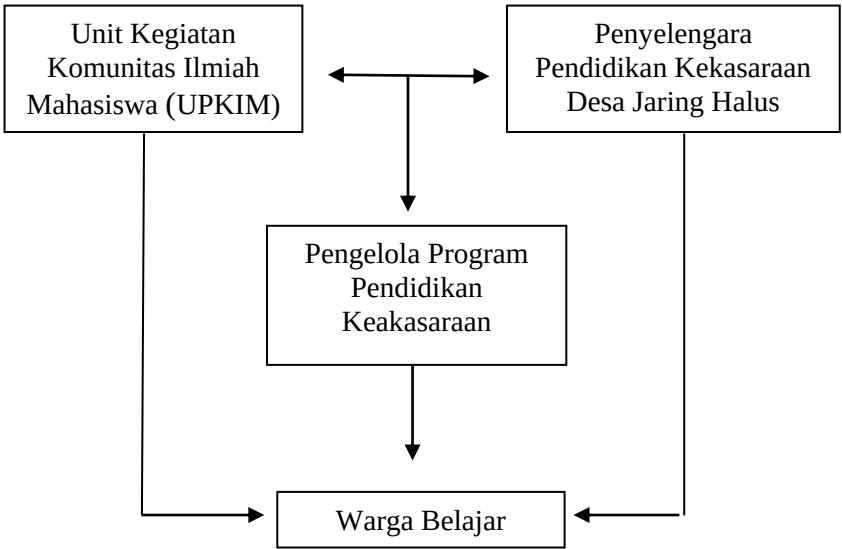
Sumber: Pengelola Pendidikan Keaksaraan di Desa Jaring Halus (2012)

Jadwal tersebut di atas, disusun secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kesempatan dan kesiapan belajar warga belajar. Walaupun demikian, kendala umum berkenaan dengan pemetaan jadwal adalah tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran warga belajar pada pendidikan keaksaraan tentunya sangat ditentukan oleh waktu yang dimiliki oleh warga belajar, dari kehadiran warga belajar dalam tiap jam belajar yang dilaksanakan kehadiran warga belajar tidak menentu, misalnya jadwal belajar dilaksanakan pada pukul 2 siang hingga pukul 4 sore WIB yang hadir sekira 20 hingga 30 orang, belum tentu pada hari berikutnya yang hadir sama dengan hari sebelumnya (PW.49).

Selanjutnya sarana yang digunakan dalam proses pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus selama ini masih memanfaatkan fasilitas yang ada. Sarana yang disediakan untuk kegiatan program pendidikan keaksaraan adalah sarana ruang belajar, yaitu ruang sekolah SD, alat tulis, buku bacaan, bahan-bahan baca, dan tulis, serta beberapa alat-alat praktek keterampilan. Kemudian sumber pengadaan sarana ini disediakan oleh pihak pengelola dan dari pihak Unit Kegiatan Komunitas Ilmiah Mahasiswa (UPKIM) UMSU (PW.50).

Kedua, tahap pengorganisasian program yang diawali dengan proses penyusunan struktur pengelola program. Pihak pengelola

melakukan proses penyusunan struktur pengelola program pendidikan keaksaraan dengan melibatkan langsung semua pihak, dan menghasilkan struktur sebagai berikut:



Bagan 4.5.
Struktur Pengelola Program Pendidikan Keaksaraan
Sumber: Dokumen Pemerintahan Desa Jaring Halus, 2012

Alasan menetapkan bentuk struktur tersebut diatas, didasarkan ada kebutuhan untuk mempermudah koordinasi kerja dalam pendidikan keaksaraan sehingga semua diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan keaksaraan (PW.P.51).

Selanjutnya disusun pula *job deskripsi* atau uraian tugas pengelola program pendidikan keaksaraan berbasis Kecakapan Hidup di Jaring Halus berdasarkan struktur pengelola program. Berdasarkan hasil wawancara deskripsi uraian tugas pengelola program pendidikan keaksaraan dijabarkan sebagai berikut: pengelola yang terdiri dari perangkat Desa Jaring Halus yaitu kepala desa (Kades) yang bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap koordinasi warga belajar yang juga merupakan warga Desa

Jaring Halus, sekretaris desa berfungsi untuk membantu kades dalam memantau serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan warga belajar, kemudian bersama dengan kepala dusun mengkoordinasikan untuk mendata warga yang belum bisa mampu membaca, menulis dan berhitung (calistung) dan belum mampu dan mensosialisasikan program pendidikan keaksaraan (PW.P. 52)

Kemudian tugas Unit Kegiatan Komunitas Ilmiah Mahasiswa (UPKIM) adalah merekrut tenaga Tutor dari beberapa fakultas di UMSU kemudian mengadakan pelatihan tenaga Tutor untuk diterjunkan pada pendidikan keaksaraan, selanjutnya menyusun format kurikulum keaksaraan dan selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak pengelola, kemudian menyiapkan perlengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku, bahan-bahan lainnya yang diperlukan, untuk mendukung program pendidikan keaksaraan. Tutor adalah tenaga sukarela yang berfungsi untuk melakukan program keaksaraan, mulai dengan pengajaran, membimbing warga belajar untuk bisa Calistung, membuat ketrampilan, sehingga warga belajar nantinya mampu melakukan calistung dengan baik dan benar.

Selanjutnya untuk mengisi jabatan pengelola sebagaimana struktur program tersebut ditetapkan susunan personil pengelola. Cara menetapkan personil untuk mengisi struktur program pendidikan keaksaraan tentunya dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama perangkat desa (kades,sekdes, dan Kadus) bersama dengan UPKIM. Alasan penetapan dan personil yang bersangkutan pada posisinya, karena program tersebut dilaksanakan di Desa Jaring Halus, tentunya untuk menentukan warga belajar yang memahami adalah para perangkat desa, maka ditentukanlah pengelola dari pihak Desa Jaring Halus, selanjutnya Unit Kegiatan Komunitas Ilmiah Mahasiswa (UPKIM) yang merekrut pihak Tutor yang akan melakukan pengajaran Calistung pada program tersebut (PW. P.53).

Ketiga, penggerakan program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus yang dituangkan dalam pedoman motivasi pengelolaan program pendidikan keaksaraan berbasis Kecakapan Hidup di Jaring Halus. Pedoman motivasi pengelolaan program pendidikan

keaksaraan tidak disusun secara tertulis, tetapi upaya memberi motivasi terhadap warga belajar senantiasa dilakukan pihak pengelola serta para Tutor, sesuai dengan kondisi dari warga belajar (PW.P. 54).

Bentuk-bentuk motivasi tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dan semangat warga belajar mengikuti program pendidikan keaksaraan, artinya kondisi warga belajar untuk mau mengikuti program pendidikan ini adalah disesuaikan dengan waktu luang mereka, karena pada jadwal belajar yang telah ditetapkan belum tentu pada waktu tersebut warga belajar bisa mengikutinya, atau misalnya hari ini mereka bisa hadir belum tentu hari berikutnya mereka bisa mengikuti program pendidikan, sehingga dengan kondisi ini secara kontinu pihak pengelola dan Tutor, selalu melakukan motivasi akan pentingnya bisa membaca, menulis dan berhitung (PW.P.55)

Tahap-tahap motivasi dilakukan pengelola kepada pelaksana Tutor dilakukan dalam rapat koordinasi perminggu antara pengelola dan Unit Kegiatan Komunitas Ilmiah Mahasiswa (UPKIM) serta dengan Tutor untuk melihat kondisi dan mengevaluasi perkembangan peserta, serta permasalahan yang terjadi pada saat program pendidikan keaksaraan berlangsung, dengan demikian motivasi dari Tutor tetap terpantau untuk melaksanakan program pendidikan Calistung terhadap warga belajar (PW. P.56).

Intensitas motivasi yang dilakukan pengelola berdampak sangat baik terutama terhadap para Tutor, mereka semakin betah dan berada di Desa Jaring Halus untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan, ini terlihat dengan intensitas kehadiran para Tutor, selalu terjaga dan lebih aktif dari warga belajar sendiri. Begitu pula terhadap warga belajar, walaupun disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, namun mereka antusias mengikuti pendidikan keaksaraan yang dipandu oleh para Tutornya (PW. P.57)

Keempat, pembinaan program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus relative berjalan baik. Kegiatan pengawasan terutama dari pengelola dilakukan setiap kerja, karena ini juga bagian dari tugas rutin mereka sebagai pelayan masyarakat, jadi proses pengawasan dilakukan langsung dengan melihat kondisi langsung

proses pelaksanaan program, kalau dirata-rata kan jumlah warga belajar hadir pada saat pelaksanaan sekitar 20-30 warga belajar setiap harinya dalam 2 (dua) kelas belajar, jadi sekitar 60 Warga Belajar yang mengikuti program pendidikan keaksaraan tersebut (PW.P.58). Selanjutnya kegiatan supervisi dilakukan pula oleh pengelola terhadap para Tutor (PW.P. 59). Kegiatan supervisi dan pemantauan tentunya dilakukan secara rutin setiap hari dan rapat koordinasi dalam setiap minggu guna melihat dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan serta bisa menentukan dan memaksimalkan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan (PW.P.60).

Kelima, penilaian program pendidikan keaksaraan pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus dilaksanakan langsung oleh pengelola program bekerjasama dengan pihak terkait lainnya. Aspek yang dinilai pada program pendidikan keaksaraan ini adalah (1) efektifitas pengelolaan program, (2) hasil belajar yang mengukur sejauh mana kemampuan warga belajar bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung, kemudian aspek-aspek penilaian ini ditetapkan melalui rapat koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam program ini yaitu pengelola, Unit Kegiatan Komunitas Ilmiah Mahasiswa (UPKIM) dan Tutor (PW. 61). Berkenaan dengan proses penetapan dan penyusunan instrumen penilaian, seluruh instrumen alat penilaian ditentukan oleh Tutor, mulai dari instrumen dan alat penilaian kemampuan warga belajar menulis, membaca, dan berhitung (PW.P.62).

Pendekatan yang dilakukan pada kegiatan penilaian adalah pendekatan langsung yang dilakukan oleh Tutor kepada warga belajar, dimana penilaian yang dilakukan ada dua tahap yaitu penilaian kehadiran dan praktek kemampuan warga belajar dalam Calistung, bagi warga yang belum mampu maka baik melalui pengelola maupun Tutor langsung memberikan motivasi kepada WB untuk terus semangat, terkadang pengelola dan Tutor langsung mengunjungi warga kerumah-rumah bagi warga belajar yang harus melakukan ujian ulangan ketika ada warga belajar yang penilaian dalam Calistungnya masih kurang (PW. P.63).

Langkah-langkah penilaian yang dilakukan pada program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus dilakukan mengikuti tahap waktu penilaian yakni tahap pertama, melalui penilaian terhadap kehadiran warga belajar, yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap sejauh mana kemampuan warga belajar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Penilaian itu dilakukan langsung dengan praktek Calistung terhadap warga belajar satu-persatu (PW. P.64)

Keenam, pengembangan program pendidikan keaksaraan yang selayaknya menjadi komitmen pengelola untuk peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, sampai saat ini belum ada bentuk yang dipikirkan untuk pengembangan program yang akan dilakukan setelah program pendidikan keaksaraan ini selesai (PW. P.65). Pihak pengelola hanya memantau pelaksanaan atau hal-hal yang rutin yang dilakukan oleh warga Desa Jaring Halus terutama warga yang pernah mengikuti pendidikan keaksaraan. Setelah pelaksanaan program pendidikan keaksaraan ini selesai masih tahap pelaporan kepada tingkat kecamatan dan kabupaten, prinsipnya pengelola hanya menunggu pengembangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak Unit Kegiatan Komunitas Ilmiah Mahasiswa (UPKIM) dan dari pemerintah (PW.P.66).

Tindak lanjut dari pihak pengelola tentunya hanya sebatas melakukan monitoring dan terus memberi motivasi terhadap warga yang pernah mengikuti untuk terus mengembangkan kemampuan dan meningkatkan pendapatan, untuk program berikutnya kita menunggu bentuk-bentuk kegiatan yang serupa (PW.P.67) Berkenaan dengan pengembangan kerjasma, selama ini pengelola melakukan kemitraan atau kerjasama dengan banyak pihak antara lain dengan perguruan tinggi UMSU, Dinas Pendidikan Sumatera Utara, dan kedepannya direncanakan kerjasama dengan pihak swasta terutama perusahaan yang ada di wilayah atau berdekatan dengan Desa Jaring Halus (PW.P.68).

3. Proses Pembelajaran Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup pada Masyarakat Nelayan di Jaring Halus.

Proses Perencanaan pembelajaran bagi masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus dilakukan oleh pengelola program. Kegiatan proses pembelajaran dipaparkan dalam 4 (empat) aspek, yakni: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan. Keempat aspek tersebut masing-masing dijabarkan dalam sub aspek yang lebih rinci. Untuk itu dalam penelitian ini dipaparkan hasil studi tentang proses pembelajaran sebagai berikut:

a. Perencanaan Pembelajaran

Materi tentang perencanaan pembelajaran dieksplorasi melalui wawancara dengan salah seorang Tutor Program Pendidikan Keaksaraan di Desa Jaring Halus, yakni Ibu Muliana, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Medan, 13 Juli 1991, yang beralamat di Jl. Binjai Km 12,5 Gg. Sambi Medan. Berdasarkan hasil wawancara di paparkan aspek-aspek perencanaan pembelajaran dengan merujuk kepada pendekatan pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah sebagai berikut: *Pertama*, kegiatan identifikasi kebutuhan sebagai tahap awal menyusun rencana pembelajaran. Identifikasi kebutuhan pada pendidikan keaksaraan dilakukan secara langsung, dimana para Tutor beserta perangkat desa, mendata langsung warga Desa Jaring Halus dari lima dusun bahwa pendidikan keaksaraan memang diperlukan dilaksanakan, maka dari data desa bahwa ada sekitar 500 lebih warga Desa Jaring Halus masih ada yang belum bisa membaca dan menulis serta berhitung dari data tersebut kita mendatangi warga dari rumah ke rumah, apakah mereka membutuhkan dilaksanakannya pendidikan keaksaraan, ternyata terdatalah warga yang bersedia mengikuti dan butuh akan pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus, maka terdatalah sekitar 250 lebih warga yang mau mengikuti pendidikan keaksaraan tersebut, dan yang mengikuti pendidikan keaksaraan menjadi sebanyak 210 warga belajar (PW.T.1).

Petugas atau pihak yang terlibat langsung dalam mengidentifikasi kebutuhan warga belajar pendidikan keaksaraan adalah pihak desa (kedas, sekdes, kepala dusun), para Tutor, dengan

membagi ke masing-masing lima dusun di Desa Jaring Halus untuk mendata langsung kebutuhan kepada warga belajar pada pendidikan keaksaraan (PW.T.2). Substansi atau hal-hal yang diungkap dalam identifikasi kebutuhan warga adalah terfokus pada pendidikan keaksaraan saja, sehingga hal yang diungkap adalah sejauh mana kebutuhan warga akan pendidikan keaksaraan yaitu agar mampu membaca dan menulis dengan baik dan benar (PW.T.3)

Langkah-langkah yang dilakukan petugas untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar para program pendidikan keaksaraan diawali dengan proses mengunjungi rumah warga belajar yang dilakukan perangkat desa dalam hal ini kepala dusun. Masing-masing kepala dusun mengunjungi lima dusun dengan di damping oleh 3 sampai 4 Tutor, dusun 1 didamping 3 Tutor, dusun 2 didampingi 4 Tutor, dusun 3 didampingi 4 , dusun 4 didampingi 4 Tutor, dusun 5 didampingi 4 Tutor, mereka langsung mendata ke rumah warga masing-masing dusun dari rumah ke rumah, dengan melakukan langsung wawancara dan memberikan penjelasan akan pentingnya bisa membaca dan menulis, dari wawancara dan penjelasan Tutor tersebut teridentifikasi, sebenarnya warga yang belum bisa membaca atau putus sekolah sangat berkeinginan untuk belajar membaca dan menulis (PW.T.4).

Kedua, penentuan materi belajar berdasarkan hasil rumusan identifikasi kebutuhan belajar. Materi belajar disusun dengan memuat banyak aspek diantaranya perumusan tujuan belajar. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran pada pendidikan keaksaraan tersebut, tentunya setelah hasil identifikasi kebutuhan akan pentingnya pelaksanaan pendidikan keaksaraan ini, maka para Tutor dan perangkat desa merumuskan tujuan pembelajaran pada pendidikan ini yang di padukan dengan tujuan pendidikan keaksaraan ini, yaitu pemberantasan buta aksara, maka di rumuskan lah tujuan pembelajaran ini yaitu agar warga dari lima dusun di Desa Jaring Halus yang menjadi warga belajar bisa dan mampu membaca, menulis dan berhitung (PW.T.5) Selanjutnya, mengembangkan kisi-kisi materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan belajar. Pengembangan materi belajar ini merujuk kepada kisi-kisi yang telah di susun pemerintah tentang pendidikan keaksaraan dasar. Materi

pembelajaran pada pendidikan keaksaraan adalah membaca, menulis dan berhitung, maka dalam pengembangan materi tersebut para Tutor di arahkan agar dalam memberi pelajaran harus langsung bisa berinteraksi dengan warga belajar, dimana materi tersebut langsung diajarkan ke masing-masing warga belajar satu persatu dengan cara warga belajar sambil mengenali materi pelajaran Tutor juga meminta warga belajar langsung mempraktekkan nya (PW.T.6)

Setelah materi belajar disusun secara lengkap. Langkah selanjutnya menyusun jadwal pembelajaran. Dalam menyusun jadwal belajar pada pendidikan keaksaraan, tentunya di sesuaikan dengan jadwal yang disepakati oleh warga belajar, dimana untuk jadwal waktu nya disesuaikan dengan kesepakatan warga belajar, yaitu siang pada pukul 2 sampai pukul 4 sore, malam hari dari jam 7 sampai pukul 8.30 wib, dengan susunan sistematika jadwal belajar yang diterapkan Tutor pada pendidikan keaksaraan adalah: (1). Pengenalan cara menulis tentang huruf-huruf abjad latin kepada warga belajar, (2). belajar membaca dan menulis huruf-huruf kepada masing-masing warga belajar, (3). pengenalan dan penulisan angka-angka, (4). pengenalan dan penggunaan angka-angka dalam penjumlahan, perkalian dan pembagian, (5). latihan-latihan dan praktek membaca dan menulis warga belajar, (6). diskusi warga belajar tentang membaca, menulis dan berhitung dan tentang hal-hal umum. Itulah jadwal belajar yang digunakan oleh Tutor pada pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus (PW.T.7).

Ketiga, rekrutmen warga belajar yaitu proses pemilihan dan penentuan warga belajar peserta pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus. Sasaran peserta pendidikan keaksaraan pada program pendidikan keaksaraan ini adalah warga yang berada di 5 (lima) dusun di Desa Jaring Halus yang belum bisa membaca dan menulis, yang putus sekolah dan tidak pernah sekolah (PW.T.8) Kegiatan rekrutmen untuk menentukan warga belajar pada program pendidikan keaksaraan tentunya dilakukan secara bersama antara pihak desa dan Tutor yang waktunya pada saat mendata warga yang akan ikut pendidikan keaksaraan tentunya dari rumah ke

rumah pada waktu siang menjelang sore dan pada malam hari (PW.T. 9).

Langkah rekrutmen warga belajar diawali pada saat kunjungan rumah oleh pihak desa dan Tutor yang bersama-sama menyebar ke masing-masing lima dusun untuk mendata serta mengkomunikasikan akan pentingnya ikut pendidikan keaksaraan ini, dan meminta kesediaan warga untuk menjadi warga belajar, hal ini dilakukan hampir dalam waktu kurun satu minggu (PW.T.10)

Keempat, penentuan sumber belajar sebagai Tutor program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pengelola ketika menentukan perencanaan pembelajaran yaitu kualifikasi sumber belajar yang relevan dengan materi pembelajaran. Pihak desa dan UPKIM dalam menentukan Tutor hanya memberi syarat minimal untuk menjadi Tutor adalah mampu mengajar menulis, membaca dan berhitung dengan baik, dan bersedia menjadi Tutor sesuai dengan waktu yang ditentukan (PW.T.11). Selanjutnya latar belakang pendidikan Tutor pada pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus adalah mereka yang memiliki kemampuan mengajar dari berbagai disiplin ilmu. Selama ini yang menjadi Tutor aktif adalah mahasiswa dari beberapa fakultas Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU). (PW.T.12)

Aspek penting lainnya yang perlu dikaji adalah penentuan penjadwal proses pembelajaran yang dilakukan oleh Tutor. Karena jumlah Tutor ada sebanyak 15 Tutor, dan jadwal pembelajaran dilaksanakan pada siang hari pada dua tempat belajar, dan malam hari juga dilaksanakan, maka Tutor mambagi jadwal Tutor yaitu dalam belajar siang yang di isi oleh 4 Tutor untuk satu ruang belajar dimana 1 orang Tutor menjelaskan materi (membaca)sekitar 15 sampai 20 menit, kemudian keempat Tutor mulai membimbing warga belajar, dengan 1 Tutor membimbing warga belajar antara 6 sampai 7 warga belajar. Pada hari berikutnya Tutor yang lain yang menjelaskan materi (berhitung) dan keempat Tutor mulai membimbing warga belajar, dengan 1 Tutor membimbing warga belajar antara 6 sampai 7 warga belajar. Demikian juga dengan

jadwal belajar pada malam hari, jadwal ini terus dilakukan selama proses pendidikan keaksaraan dilaksanakan (PW.T. 13).

Kelima, metode pembelajaran program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus didesain secara tepat sesuai kebutuhan. Metode pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan keaksaraan di Jaring Halus adalah metode pembelajaran yang bisa memotivasi warga agar mau belajar membaca dan menulis, dimana metode tersebut bisa diterima warga dengan gembira, selanjutnya melalui metode ceramah dan tanya jawab Tutor yang mengajar bisa langsung memberi materi dan memotivasi warga untuk mempraktekannya, kemudian terjadinya komunikasi yang baik antara warga belajar dengan para Tutornya (PW.T. 14). Teknik pembelajaran yang dilakukan oleh Tutor, dan bisa dilihat langsung efeknya adalah teknik membimbing langsung warga belajar satu persatu, karena kebanyakan warga belajar adalah ibu rumah tangga, maka pola itu yang paling tepat, jadi dalam 1 sesi pelajaran masing-masing Tutor membimbing warga belajar 1 Tutor membimbing 7 sampai 8 orang warga belajar setiap jam pelajarannya (PW.T.15)

Keenam, perencanaan penilaian hasil belajar warga belajar program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus. Kisi-kisi penilaian hasil belajar disusun dalam perminggu warga belajar mengikuti pembelajaran, dimana kisi-kisi tersebut di susun dengan pertimbangan semua Tutor, adapun indikator dari penilain hasil belajar lebih kepada kemampuan mempraktekkan langsung warga belajar dalam hal sejauh mana warga belajar sudah mampu dalam membaca, mampu dalam menulis, warga belajar satu persatu. Indikator tersebut terus diukur perminggu, sehingga Tutor bisa menilai dan mengikuti perkembangan warga belajar dalam membaca, menulis dan berhitung (PW.T. 16).

Langkah-langkah yang direncanakan dalam penilaian hasil belajar adalah dengan menilai langsung kemampuan warga belajar dalam membaca, menulis dan berhitung dengan praktek langsung, itu dilakukan kepada masing-masing warga belajar dimana penilaian dilakukan terhadap warga belajar lebih kepada penilaian praktek langsung dengan melihat kemampuan membaca, menulis dan berhitung, terhadap warga belajar orang per orang. Jika warga belajar

dinilai belum bisa membaca dan menulis, maka warga belajar tersebut di berikan bimbingan belajar kembali terhadap pada materi mana yang belum bisa dikuasai warga belajar tersebut, demikian dilakukan secara bertahap terhadap warga belajar, jika dinilai warga belajar tersebut telah bisa membaca dan menulis, maka warga belajar tersebut masuk pada tahap materi membaca, menulis dan berhitung pada tahap tingkat mahir dengan bentuk praktek langsung dengan menggunakan buku-ajar yang telah di sediakan (PW .T.17).

Proses analisis data hasil belajar tentunya dilakukan dengan menilai langsung secara tertulis dan praktek terhadap hasil belajar mereka, setelah data nilai hasil ujian warga belajar orang per orang terutama terhadap kemampuan membaca, menulis dapat tentukan kemudian dilakukan perengkingan nilai dari masing-masing warga belajar, terutama dalam praktek membaca, menulis dari warga belajar, jika dinilai warga belajar tersebut telah bisa membaca dan menulis, maka warga belajar tersebut masuk pada tahap materi membaca, menulis dan berhitung pada tahap tingkat mahir dan jika warga belajar sudah pada tahap mahir maka warga belajar tersebut dinyatakan lulus dan diberi piagam dan sampai pendidikan keaksaraan berakhir tentunya semua warga belajar dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan yang berbeda. Tingkat kelulusan ditentukan dengan 3 tahap, tahap pertama warga belajar lulus dengan nilai yang sangat baik, tahap kedua warga belajar diberi nilai baik, tahap ketiga warga belajar diberi nilai cukup (PW.T. 18).

Selanjutnya direncanakan pula tentang petugas evaluator hasil belajar yang secara khusus mempersiapkan soal dan melakukan proses penilaian. Petugas evaluator adalah adalah pihak UPKIM dan dari kelurahan setelah hasil penilaian akhir terhadap warga belajar di berikan oleh Tutor (PW.T.19).

Ketujuh, rancangan jadwal pembelajaran yang selama ini ada disesuaikan dengan kesempatan dan waktu masyarakat nelayan yang tercatat sebagai warga belajar. Waktu pembelajaran dijadwalkan setelah warga belajar menyelesaikan seluruh pekerjaannya (PW 20). Adakalanya di selenggarakan sore hari tetapi ada kalanya juga diselenggarakan pagi hari sesuai kesepakatan. Selanjutnya tempat pendidikan dijadwalkan di ruang Sekolah Dasar

(SD), balai kantor desa dan kantor Rukun Warga (RW) setempat (PW.T.21).

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran andragogik. Berdasarkan hasil wawancara dapat dideskripsikan beberapa hal: Pertama, tahap-tahap pembelajaran yang diawali dengan persiapan awal sebelum proses belajar pendidikan keaksaraan adalah sosialisasi dan pemberian informasi tentang materi keaksaraan oleh para Tutor. Substansi informasi adalah materi yang akan diajarkan dan informasi pembagian tugas Tutor tentang siapa yang akan menyampaikan materi di depan kelas dan Tutor yang akan membimbing warga belajar, selanjutnya untuk persiapan awal warga belajar adalah mengabsen kehadiran warga belajar serta melihat kesiapan bahan belajar. Setelah semua persiapan awal Tutor dan warga belajar rampung barulah proses belajar akan dimulai dilaksanakan (PW.T. 22).

Tahapan selanjutnya pada tahap awal pembelajaran adalah merencanakan fungsi Tutor sebagai pendidik dan pembimbing. Oleh karena itu para Tutor menyepakati metode yang digunakan adalah metode pembelajaran langsung dan partisipatif, dan tidak terlalu formal agar warga belajar tidak merasa ada jarak dengan para Tutor, kemudian metode pembimbingan yang langsung kepada warga belajar orang per orang (PW.T. 23). Tahap selanjutnya proses bimbingan tentang penguatan materi belajar dilakukan dengan membagi kelompok warga belajar yang dibimbing oleh masing-masing Tutor, dimana satu Tutor membimbing langsung 6 sampai 7 orang warga belajar. Materi yang dibimbingkan antara lain materi belajar dari mulai mengajari mengenalkan huruf, cara membaca, warga dibimbing dan di arahkan secara bertahap. Proses bimbingan ini dilakukan secara kontinu selama proses pendidikan keaksaraan berlangsung (PW.T. 24).

Sebagai pembimbing para Tutor melakukan berbagai macam pendekatan pembelajaran bagi para warga belajarnya. Selama ini

pendekatan belajar yang dilakukan pada pendidikan keaksaraan adalah berupa pendekatan kekeluargaan, dimana Tutor berusaha melakukan pendekatan belajar kepada warga belajar dengan komunikasi langsung dengan masing-masing warga belajar, dimana Tutor langsung membimbing warga belajar berkomunikasi seakrab mungkin sehingga warga belajar tidak merasa rendah diri, dan termotivasi untuk mau mengikuti bahan pelajaran yang disampaikan oleh Tutor (PW.T. 25).

Kedua, Dalam proses pembelajaran digunakan prinsip-prinsip belajar orang dewasa (andragogik). Berdasarkan hasil wawancara dengan Tutor, ternyata empat prinsip pembelajaran andragogik telah diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus, yakni prinsip mengharagai konsep warga belajar, mengeksplorasi pengalaman warga belajar, menguatkan kesiapan warga belajar, dan mempraktekkan hasil belajar.

Menghargai konsep diri warga belajar dilakukan ketika Tutor berusaha melakukan komunikasi dalam belajar dengan warga belajar sedekat mungkin serta tidak menjadikan warga seperti anak belajar, tetapi menjadikan mereka adalah seperti teman, dan orang tua, serta membimbing kesulitan warga belajar dengan membuat suasana belajar gembira serta di selingin dengan humor humor ringan, itulah yang dilakukan untuk menghargai warga belajar pada pendidikan keaksaraan tersebut (PW. T.26)

Mengeksplorasi pengalaman dilakukan ketika Tutor berusaha dengan komunikasi yang baik dalam menjelaskan betapa pentingnya bisa membaca dan menulis, kemudian Tutor juga sering meminta warga belajar untuk bercerita dan bertukar pengalaman masalah apa saja yang sering mereka hadapi jika karena tidak bisa atau kurang lancar dalam membaca dan menulis, dengan adanya tukar pengalaman banyak warga yang berharap agar anak mereka tidak seperti mereka, selanjutnya kalau sudah demikian dengan suasana yang gembira warga belajar sangat antusias dalam mengikuti bahan pelajaran yang tengah di pelajari bersama-sama. Selanjutnya mereka juga sering bercerita bagaimana setelah warga belajar mendapatkan pelajaran pendidikan keaksaraan sering dirumah mereka juga

mengulang ulang bahan bacaan yang mereka bawa pulang (PW.T. 27).

Menguatkan kesiapan belajar pada pendidikan keaksaraan selalu dilakukan oleh Tutor. Adapun penguatan yang dilakukan diantaranya selalu memotivasi warga agar tetap semangat untuk terus mengikuti kegiatan ini, kemudian setiap berakhirnya jam belajar, Tutor selalu juga memberi berupa tugas sederhana, agar warga belajar juga menyempatkan mengulang membaca dan menulis di rumah, agar semakin lancar kemampuan membaca dan menulis dari warga belajar pada saat belajar keesokan harinya (PW.T. 28).

Berkenaan dengan mempraktekan hasil belajar pada setiap akhir jam belajar, Tutor selalu meminta warga belajar mempraktekkan langsung cara membaca dan menulis dari warga belajar baik secara perorang atau ketika di tes maju ke depan kelas, dari praktek langsung tersebut tentukan akan mudah melihat hasil belajar warga belajar, dan dapat diketahui warga belajar yang masih kurang bisa membaca dan kurang bisa menulis. Setelah diketahui warga belajar yang masih kurang mampu tentunya Tutor akan melakukan bombing lagi terhadap warga belajar tersebut (PW.T.29)

Ketiga, melakukan komunikasi efektif dalam setiap proses pembelajaran yang dapat dilihat dari penggunaan bahasa, saluran media yang digunakan, cara merespon tanggapan yang disampaikan warga belajar. Penggunaan bahasa yang dituturkan oleh Tutor sebagai fasilitator pada proses pendidikan keaksaraan adalah bahasa Indonesia, dan disesuaikan dengan kondisi Desa Jaring Halus adalah bahasa melayu, kemudian dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan Tutor menggunakan bahasa yang mudah, jelas dan bisa di pahami oleh warga belajar (PW.30). Selanjutnya, media komunikasi yang dimanfaatkan oleh Tutor pada pendidikan keaksaraan lebih banyak menggunakan media buku bacaan, alat tulis, serta media papan tulis dalam ruang belajar, kemudian media tersebut lebih banyak di gunakan dan dibimbing oleh Tutor kepada masing-masing warga (PW.T. 31).

Berkenaan dengan komunikasi yang digunakan Tutor dalam merespon warga belajar pada proses pembelajaran program pendidikan keaksaraan tentunya komunikasi terbuka, dimana semua

keluhan dan keinginan warga belajar selalu direspon dengan baik oleh pengelola dan Tutor, sehingga dengan komunikasi yang terbuka tersebut, motivasi warga belajar terus terjaga untuk terus ikut dalam pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus (PW.T. 32).

c. Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan evaluasi pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus dilakukan oleh para Tutor. Ada tiga hal yang menjadi fokus pemaparan dalam mendeskripsikan aspek evaluasi pembelajaran yaitu: pertama, menentukan aspek-aspek penilaian hasil pembelajaran. Aspek penilaian yang disusun oleh Tutor ini dijabarkan dalam beberapa subindikator penilaian yakni: (1) kemampuan mendengarkan, (2) kemampuan berbicara, (3) kemampuan membaca dan (4) kemampuan menulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tutor pendidikan keaksaraan didapat informasi bahwa kemampuan mendengar warga belajar pendidikan keaksaraan secara umum cukup baik, mereka bisa mendengar dengan jelas setiap arahan yang disampaikan oleh Tutor, dari 210 ada sekitar 12 orang warga belajar yang pendengarannya kurang baik dikarenakan usia, rata-rata usia 60 sampai 65, sehingga untuk warga belajar tersebut memang kemampuan mendengarnya kurang, sehingga memang harus di bimbing secara langsung oleh para Tutor. (PW.T. 33)

Untuk kemampuan berbicara warga belajar pada bagus dan lancar pada pendidikan keaksaraan rata-rata baik, walaupun dengan logat melayu pesisir, tetapi didalam pelaksanaan pembelajaran tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Tutor (PW.T. 34). Selanjutnya, kemampuan membaca warga belajar pada pendidikan keaksaraan sebelum pembelajaran dimulai memang masih sangat minim apalagi warga belajar yang sama sekali tidak pernah sekolah, sehingga kemampuan membaca sangat rendah, setelah pendidikan keaksaraan diikuti oleh warga belajar kemampuan membaca warga dikelompokkan pada sangat baik, baik dan cukup (PW.T. 35)

Hasil evaluasi pada aspek kemampuan menulis warga belajar pada pendidikan keaksaraan sebelum pembelajaran dimulai memang

masih sangat minim dan tidak rapi, apalagi warga belajar yang sama sekali tidak pernah sekolah, sehingga sangat kaku kemampuannya dalam menulis, setelah pendidikan keaksaraan diikuti oleh warga belajar kemampuan menulis warga dikelompokkan pada sangat baik, dan cukup (PW 36). Begitu pula, untuk kemampuan berhitung warga belajar pada pendidikan keaksaraan sebelum pembelajaran dimulai rata-rata warga bisa dalam pengurangan, penjumlahan, dan penulisan tetapi masih sangat kurang dalam menuliskan angka-angkanya. Apalagi kalau warga belajar yang sama sekali tidak pernah sekolah, sehingga kemampuan berhitungnya sangat rendah, setelah pendidikan keaksaraan diikuti oleh warga belajar kemampuan berhitung warga dikelompokkan pada sangat baik, baik dan cukup (PW.T. 37).

Kedua, kegiatan pelaksanaan proses penilaian yang dilakukan Tutor terhadap warga belajar sudah sangat kondusif. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa kegiatan penilaian penilaian sekurang-kurangnya memperhatikan aspek waktu, petugas, tempat dan jadwal. Waktu penilaian pada pendidikan keaksaraan ditentukan dengan 3 tahap, tahap pertama dilakukan dalam 1 kali seminggu sesudah pembelajaran berjalan 2 minggu bulan pertama, yaitu dengan penilaian praktek langsung warga belajar dalam hal membaca dan menulis, penilaian ini dilakukan untuk melihat perkembangan warga belajar dalam memahami materi membaca, menulis dan berhitung, selanjutnya dalam 1 kali dalam 2 minggu, ini juga dilakukan masing-masing warga belajar dilihat sejauh mana perkembangan kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya. dan tahap ketiga adalah untuk melihat seberapa banyak warga belajar yang telah pada tahap (sangat baik, baik dan cukup) yang sudah dicapai warga belajar baik, tahap ketiga ini dilakukan pada bulan ke tiga dan bulan terakhir. Diakhir bulan pembelajaran dilakukan ujian tulis dan praktek terhadap warga belajar kemudian didapat ranking warga belajar dengan masing masing tingkat penguasaan dari warga belajar. Demikianlah penentuan penilaian warga belajar pada pendidikan keaksaraan (PW.T. 38).

Petugas yang terlibat pada proses penilaian pada pendidikan keaksaraan adalah di serahkan sepenuhnya kepada Tutor yang

bertugas, hasil rekomendasi dari Tutor dilaporkan kepada pengelola atau kepada pengelola dan pihak UPKIM (PW.T. 39). Selanjutnya tempat penilaian bagi warga belajar pendidikan keaksaraan dilaksanakan di posko pelaksanaan pendidikan keaksaraan yaitu di balai Desa Jaring Halus dan terkadang dirumah sekretaris desa (PW.T. 40).

Jadwal pelaksanaan penilaian pada pendidikan keaksaraan ditentukan dengan 3 tahap, tahap pertama dilakukan dalam 1 kali seminggu sesudah pembelajaran berjalan 2 minggu bulan pertama, yaitu dengan penilaian praktek langsung warga belajar dalam hal membaca dan menulis, penilaian ini dilakukan untuk melihat perkembangan warga belajar dalam memahami materi membaca, menulis dan berhitung, selanjutnya dalam 1 kali dalam 2 minggu, ini juga dilakukan masing-masing warga belajar dilihat sejauh mana perkembangan kemampuan membaca, menulis dan berhitung nya. dan tahap ketiga adalah untuk melihat seberapa banyak warga belajar yang telah pada tahap (sangat baik, baik dan cukup) yang sudah dicapai warga belajar baik, tahap ketiga ini dilakukan pada bulan ke tiga dan bulan terakhir. Diakhir bulan pembelajaran dilakukan ujian tulis dan praktek terhadap warga belajar kemudian didapat ranking warga belajar dengan masing masing tingkat penguasaan dari warga belajar. Demikianlah penentuan penilaian warga belajar pada pendidikan keaksaraan (PW.T.41)

Ketiga, kegiatan laporan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan oleh para Tutor program pendidikan keaksaraan secara rutin. Sistematika laporan disusun berdasarkan pola yang telah dibuat oleh pengelola. Adapun aspek-aspek yang harus dilaporkan antara lain jumlah warga belajar dan tingkat perkembangannya sampai akhir pelaksanaan pendidikan keaksaraan, kemudian waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan, selanjutnya adalah jumlah kebutuhan yang selama ini di gunakan, mulai dari anggaran dana, bahan-bahan pelajaran yang digunakan. System pelaporannya adalah setelah aspek-aspek yang dilaporkan tadi secara sistematika di laporkan kepada pihak pengelola perangkat desa dan UPKIM UMSU (PW.T.42).

Tindak lanjut hasil evaluasi pendidikan keaksaraan yang meliputi pelaksanaan, dan penilaian dari pendidikan keaksaraan terhadap warga belajar tentunya dengan hasil penilaian akhir warga belajar, setelah itu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan keaksaraan. Hasil evaluasi pendidikan keaksaraan selanjutnya dilakukan secara berkala dilakukan oleh pengelola yang langsung berhubungan dengan warga belajar di desa Jaring Halus. Kemudian pada waktu tertentu juga pihak UPKIM melakukan monitoring juga terhadap kelangsungan dan perkembangan tahap hidup warga belajar di desa Jaring Halus PW.T. 43).

d. Pengembangan Pembelajaran

Pengembangan pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus nampaknya akan terus berlanjut dan diharapkan lebih berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tutor ternyata ada banyak harapan dan rencana jangka panjang dalam pengembangan proses pembelajaran. Ada dua hal menarik yang diungkapkan Tutor, yaitu: Rencana Tutor dalam upaya perluasan pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran.

Pengembangan perluasan pembelajaran berkenaan dengan: pertama, Perluasan pembelajaran. Pada aspek ini dianalisis tentang materi pembelajaran. Menurut Tutor pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus, materi pembelajaran yang selama ini disampaikan kepada warga belajar adalah merujuk kepada standar kompetensi keaksaraan Dasar (SKK) yang diterbitkan pihak pemerintah yang masih mensyaratkan pada kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung. Namun demikian ada rencana pengembangan pada peningkatan usaha dan keterampilan berusaha bagi warga belajar. Dengan demikian kalau SKK Dasar sudah terpenuhi, warga belajar akan diajarkan keaksaraan yang beralih pada Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (SK-KUM). (PW.T. 44)

Selanjutnya berkenaan dengan tempat praktek belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tutor terungkap bahwa selama ini tempat belajar masih menggunakan Balai Desa atau

sekretariat RW setempat, harapan kedepan warga belajar jumlahnya melebihi jumlah yang ada sekarang dan menjangkau masyarakat nelayan di daerah yang lebih luas, sehingga tempat belajarnya pun akan lebih banyak lagi (PW.T. 45).

Aspek lainnya adalah model pembelajaran yang lebih bervariasi, Oleh karena itu direncanakan sasaran pendidikan keaksaraan di Kabupaten Langkat tidak hanya didominasi oleh masyarakat nelayan saja tetapi sudah menjangkau masyarakat pada profesi lain. Dengan demikian model pembelajaran keaksaaaannya lebih bervariasi dan menarik. (PW.T. 46)

Kedua, Peningkatan pembelajaran Keaksaraan untuk masa yang akan datang di Desa Jaring Halus, diungkapakn oleh Tutor bahwa perlu ada dua peningkatan yakni: mutu proses. Mutu proses pembelajaran selama ini masih dianggap kurang, sebab keterbatasan waktu proses belajar mengajar, terutama ketidaksiapan dari pihak warga belajar. Rencana pengembangan mutu pembelajaran akan diusahakan lebih terstruktur terutama bagi kelompok warga belajar yang memiliki kesamaan usia. Saat ini masih bercampur antara peserta yang usianya tua dan muda, sehingga tingkat penerimaan materi serta responnya sangat berbeda dan ini menyulitkan Tutor dalam mengajar (PW.T. 47). Selanjutnya mutu hasil belajar. Hasil belajar yang selama ini dilakukan berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, mendengarkan dan berhitung dalam rangka membantu warga belajar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rencana ke depannya lebih baik kalau diupayakan untuk peningkatan prestasi, terutama bagi warga belajar yang masih muda. Seharusnya mereka belajar keakasaan untuk peningkatan mutu sehingga memungkinkan sebagai bekal lanjut studi (PW.T.48).

4. Tingkat Keberaksaraan Masyarakat Setelah Mengikuti Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup di Jaring Halus di Jaring Halus.

Tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus dianggap berhasil sebab berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap warga belajar menunjukkan kemampuan

keberaksaraan mereka meningkat. Ada lima aspek yang dijadikan ukuran tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus sebagai warga belajar program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup, yaitu: (1) tingkat keberaksaraan mendengarkan, (2) tingkat keberaksaraan berbicara, (3) tingkat keberaksaraan membaca, (4) tingkat keberaksaraan menulis, dan (5) tingkat keberaksaraan berhitung.

Untuk mengukur tingkat keberaksaraan warga belajar telah dipilih 3 (tiga) orang warga belajar sebagai responden. Ketiga responden penelitian yaitu Bapak JF salah seorang warga belajar yang dilahirkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 20 April 1973. JF berjenis kelamin laki-laki beralamat di Desa Jaring Halus yang sat ini berprofesi sebagai Nelayan. Responden yang kedua adalah Bapak JH juga warga belajar program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus yang dilahirkan di Langkat pada tanggal 18 Mei 1980. Saat ini Bapak JH berprofesi sebagai Nelayan. Responden yang berikutnya adalah Ibu RS yang dilahirkan di Langkat pada tanggal 13 Juli 1973. Saat ini Ibu RS tinggal di Desa Jaring Halus dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Pengumpulan data dilakukan terhadap ketiga responden sebagaimana disebutkan di atas dengan menggunakan instrumen observasi yang memuat tingkat keberaksaraan tentang aspek mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung. Masing-masing aspek memiliki indikator dan pada setiap indikator ditetapkan interval skornya. Dengan demikian akan terukur secara tepat kompetensi atau tingkat keberaksaraan ketiga warga belajar yang dijadikan sampel penelitian. Kegiatan observasi pada aspek mendengarkan dilakukan dengan cara membuat wacana keberaksaraan, melalui tahap sebagai berikut: (1) Tutor membuat/menyiapkan wacana/bacaan, (2) Tutor membacakan wacana yang telah disiapkan, (3) warga belajar mendengarkan/menyimak wacana yang dibacakan oleh Tutor, (4) Tutor bertanya kepada warga belajar tentang isi bacaan, (5) warga belajar menceritakan kembali isi bacaan, (6) Tutor menilai kemampuan mendengarkan (pemahaman) berdasarkan kemampuan menceritakan kembali isi wacana yang dibacakan oleh Tutor.

Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan berbicara waga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor menunjukkan sebuah gambar (poster) keadaan hutan yang rusak kepada warga belajar, (2) Tutor bertanya kepada warga belajar mengenai gambar/poster yang ditunjukkan, (3) Tutor meminta WB menceritakan isi pesan yang terdapat di dalam gambar/ poster yang ditunjukkan, (4) Warga belajar menceritakan isi pesan yang terdapat di dalam gambar/ poster yang ditunjukkan sebagaimana yang diminta Tutor, (5) Tutor menilai kemampuan berbicara Warga Belajar melalui kemampuannya bercerita.

Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan membaca, warga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor menyediakan sebuah wacana/ cerita yang sesuai dengan karakteristik warga belajar (kegiatan pertanian, kehidupan rumah tangga, pemilihan umum, dll), (2) Warga Belajar membaca wacana/ cerita, (3) Tutor menilai kemampuan warga belajar dalam membaca khususnya penggunaan tanda baca, intonasi.

Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan menulis, warga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor meminta warga belajar menulis sebuah surat, misalnya surat izin untuk tidak mengikuti kegiatan belajar karena akan mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, (2) Tutor menilai kemampuan menulis warga belajar melalui penilaian hasil tulisannya.

Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan berhitung, warga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor membuat/menyiapkan soal berhitung dengan menggunakan empat simbol hitung (pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian), (2) Soal dibuat dalam bentuk soal cerita, (3) Tutor meminta warga belajar mengerjakan, (4) Tutor menilai kemampuan berhitung warga belajar melalui penilaian hasil hasil perhitungannya.

Kegiatan observasi pada tingkat keberaksaraan berhitung, warga belajar diobservasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tutor membuat/menyiapkan soal berhitung dengan menggunakan empat simbol hitung (pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian), (2) Soal dibuat dalam bentuk soal cerita, (3) Tutor meminta warga belajar mengerjakan, (4) Tutor menilai kemampuan

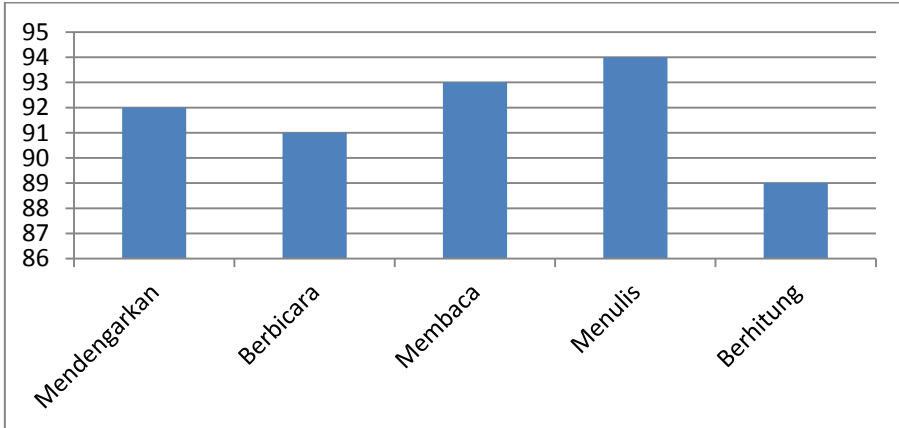
berhitung warga belajar. Data skor hasil tes penilain keaksaraan warga belajar berkenaan dengan data mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung selanjutnya ditafsirkan (penafsiran data) secara kualitatif berdasarkan tabel standar mutu, yaitu rentang skor 50-60 artinya kurang, 61-70 artinya sedang, 71-80 artinya cukup, 91-90 artinya baik, 91-100 artinya sangat baik.

Berdasarkan hasil rekap penilaian Tutor terhadap ketiga responden warga belajar yang dipilih sebagai sampel penelitian didapat skor keaksaraan berdasarkan berdasarkan aspek-aspek pendidikan keaksaraan. Mempehatikan jumlah skor hasil penelitian dan standar konversi tentang mutu keberaksaraan, tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus setelah mengikuti pendidikan keaksaraan dapat dianalisis pada dua hal yakni, pertama tingkat keberaksaraan seluruh responden penelitian setelah mengikuti kegiatan pendidikan keaksaraan pada setiap aspek, kedua tingkat keberaksaraan setiap responden berdasarkan seluruh aspek-aspek keaksaraan setelah mengikuti pendidikan keaksaraan.

Tingkat keberaksaraan seluruh responden penelitian pada setiap aspek keaksaraan dapat data sebagai berikut: (1) kompetensi mendengarkan seluruh responden, skor total sebesar 278 dengan rata-ratanya mencapai angka 92 atau termasuk kategori sangat baik. (2) kompetensi berbicara seluruh responden, skor total 273 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 91 atau termasuk kategori sangat baik, (3) kompetensi membaca seluruh responden, skor total 279 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 93 atau termasuk kategori sangat baik, (4) kompetensi menulis seluruh responden, skor total 283 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 94 atau termasuk kategori sangat baik, dan (5) kompetensi berhitung seluruh respnden, skor total 267 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 89 atau termasuk kategori baik. Data tersebut dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik. 4.3

Tingkat Keberaksaraan Seluruh Responden Pada Setiap Aspek Keaksaraan Setelah Mengikuti Pendidikan Keaksaraan

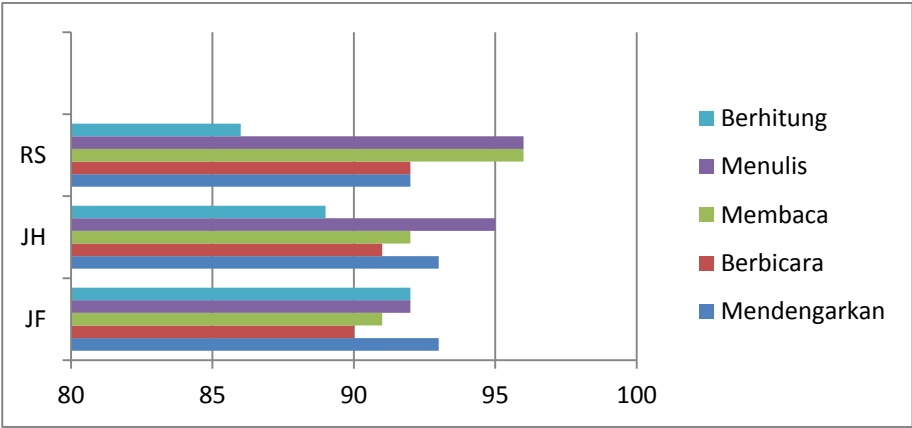


Sumber: Hasil Evaluasi Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan di Desa Jaring Halus (2013)

Tingkat keberaksaraan setiap responden berdasarkan aspek-aspek keaksaraan, diketahui data sebagai berikut: pertama, kemampuan keberaksaraan Bapak JF untuk aspek mendengarkan mencapai skor 93, aspek berbicara mencapai skor 90, aspek membaca mencapai skor 91, aspek menulis mencapai skor 92, dan aspek berhitung mencapai skor 92. Dengan demikian skor totalnya mencapai 458 dengan skor rata-rata mencapai angka 91 atau termasuk kategori sangat baik. Kedua, kemampuan keberaksaraan Bapak JH untuk aspek mendengarkan mencapai skor 93, aspek berbicara mencapai skor 91, aspek membaca mencapai skor 92, aspek menulis mencapai skor 95, dan aspek berhitung mencapai skor 89. Dengan demikian skor totalnya mencapai 460 dengan skor rata-rata 92 atau termasuk kategori sangat baik. Ketiga, kemampuan keberaksaraan Ibu RS untuk aspek mendengarkan mencapai skor 92, aspek berbicara mencapai skor 92, aspek membaca mencapai skor 96, aspek menulis mencapai skor 96, dan aspek berhitung mencapai skor

86. Dengan demikian skor totalnya mencapai 462 dengan skor rata-rata 92 atau termasuk kategori sangat baik. Data tersebut dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik. 4.4
Tingkat keberaksaraan Responden Berdasarkan Seluruh Aspek-aspek Keaksaraan Setelah Mengikuti Pendidikan Keaksaraan



Sumber: Hasil Evaluasi Belajar Pendidikan Keaksaraan di Desa Jaring Halus (2013)

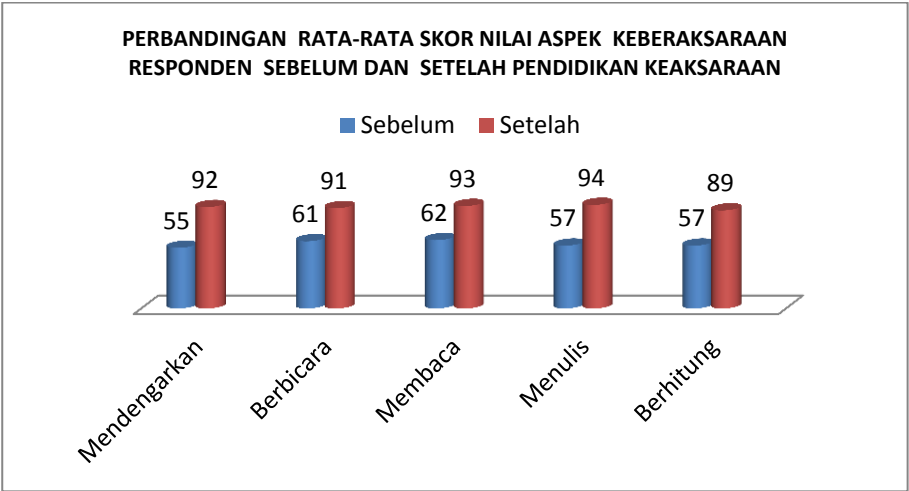
Bila dibandingkan hasil observasi sebelum dan sesudah program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan skor hasil belajar pada warga belajar program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus pada setiap aspek keaksaraan sebesar 33,4 atau 36,38 %.

Secara rinci peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut *pertama*, aspek mendengarkan, sebelum warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan rata-rata memperoleh skor 55 dan setelah mengikuti pendidikan keaksaraan meningkat skornya menjadi 92, artinya terjadi peningkatan skor sebesar 37 atau sama dengan 40.21%. *Kedua*, aspek berbicara, sebelum warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan skor rata-rata diperoleh sebesar 61

dan setelah mengikuti pendidikan keaksaraan meningkat skornya menjadi 91, artinya terjadi peningkatan skor sebesar 30 atau sama dengan 32,96%. *Ketiga* aspek membaca, sebelum warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan skor rata-rata diperoleh sebesar 62 dan setelah mengikuti pendidikan keaksaraan meningkat skornya menjadi 93, artinya terjadi peningkatan skor sebesar 31 atau sama dengan 33.33%. *Keempat*, aspek menulis, sebelum warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan skor rata-rata diperoleh sebesar 57 dan setelah mengikuti pendidikan keaksaraan meningkat skornya menjadi 94, artinya terjadi peningkatan skor sebesar 37 atau sama dengan 39.36%. *Kelima*, aspek berhitung, sebelum warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan skor rata-rata diperoleh sebesar 57 dan setelah mengikuti pendidikan keaksaraan meningkat skornya menjadi 89, artinya terjadi peningkatan skor sebesar 32 atau sama dengan 35.95%. Data tersebut dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 4.5.

Perbandingan Rata-rata Skor Nilai Aspek Keberaksaraan Responden
Sebelum dan Setelah Pendidikan Keaksaraan



Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian (2013)

Berdasarkan uraian di atas, maka tingkat keberaksaraan responden baik berdasarkan kemampuan setiap individu warga belajar responden penelitian maupun berdasarkan kemampuan keseluruhan responden tentang keaksaraan termasuk dalam kategori rata-rata sangat baik dan meningkat signifikan bila dibandingkan dengan hasil observasi tingkat keaksaraan pada responden yang sama sebelum dilakukan program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus.

5. Kemampuan Mengelola Pendapatan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Jaring Halus.

Kemampuan masyarakat nelayan yang tercatat sebagai warga belajar program pendidikan keaksaraan dalam mengelola pendapatan mengalami peningkatan setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan. Untuk mengetahui secara mendalam tentang kemampuan tersebut akan diuraikan hasil wawancara dengan tiga orang responden sebagai warga belajar program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus.

Ada tiga aspek yang menjadi fokus kajian tentang kemampuan mengelola pendapatan yaitu, kemampuan merencanakan penggunaan pendapatan, kemampuan mempergunakan pendapatan secara efektif dan efisien, serta kemampuan mengevaluasi penggunaan pendapatan. Ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, kemampuan merencanakan penggunaan pendapatan dianalisis berdasarkan sub aspek (1) merencanakan sumber pendapatan, (2) merencanakan alokasi penggunaan pendapatan, (3) merencanakan pengaturan penggunaan uang pendapatan.

Wawancara dilakukan pada tiga responden, yakni Bapak JF (40 tahun) yang berprofesi sebagai nelayan, Bapak JH (32 Tahun) yang juga berprofesi sebagai nelayan, dan Ibu RS (40 tahun) yang sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Pada sub aspek sumber pendapatan yang mereka peroleh, Bapak JF memaparkan bahwa Sumber pendapatan yang selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dari melaut, itupun juga dilihat dari kondisi laut (ombak dan cuaca), kemudian juga ada sumber lain

yaitu dengan membuat ambai ikan/ kolam kecil untuk memelihara ikan, dan juga dengan mencari kerang, kalau cuaca sedang tidak bagus, saya juga bekerja untuk memilih ikan-ikan tangkapan (ikat pukat), dan jumlah rupiah perhari terkadang tidak menentu, tapi kalau dirata-ratakan sebesar Rp.50.000,- per harinya. Jawaban yang senada juga dipaparkan Bapak JH (32 tahun) yang sehari-harinya sebagai nelayan mengatakan bahwa sumber pendapatan yang selama ini didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dari melaut, itupun juga dilihat dari kondisi laut (ombak dan cuaca), kemudian sumber lainnya adalah dengan membuat kerambah ikan kerapuh. dan jumlah rupiah per hari terkadang tidak menentu, tapi kalau dirata-ratakan sebesar Rp.65000,- per harinya. Selanjutnya Ibu RS (40 Tahun) yang selama ini mengurus rumah tangga dan memperoleh pendapatan dari hasil kerja suaminya. Menurut Ibu RS. Sumber pendapatan yang dimiliki oleh kami adalah dari hasil melaut suami dan anak-anak, selanjutnya sumber lainnya adalah dari usaha menyulam kain, dan menjahit kain, kemudian dari hasil menjemur ikan olahan menjadi ikan kering tawar dan ikan asin, dan jumlah rupiah yang dihasilkan per hari diratakan sekitar Rp.75000,- per harinya sebagai pendapatan dirinya dan suaminya. Kalau pendapatan asli yang dihasilkan dari usaha dirinya ibu RS rata-rata perharinya Rp. 25.000,-. (PW.WB. 1)

Berdasarkan sumber dan besaran pendapatan tersebut mereka memaparkan gambaran atau rincian alokasi pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak JF memaparkan bahwa pengaturan alokasi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari tentunya adalah untuk kebutuhan pangan, mulai dari beras, lauk pauk, minyak lampu, serta kebutuhan untuk jajan anak sekolah, biaya untuk rokok, biaya solar untuk melaut. Begitu pula dengan paparan Bapak JH yang jawabannya hampir senada dengan Bapak JF yakni bahwa alokasi pengeluaran untuk kebutuhan makan keluarga, yakni membeli beras, lauk pauk, minyak lampu, serta kebutuhan untuk jajan anak sekolah, dan, biaya membeli bahan bakar solar. Ibu RS juga memiliki jawaban yang mirip sama, bahwa alokasi dana untuk keperluan hidup sehari-hari keluarganya dan biaya sekolah anak-anaknya (PW.WB.2)

Strategi pengaturan pengeluaran dana telah dirancang oleh masing-masing peserta beserta istri dan atau suaminya. Bapak JF selalu menyusun strategi pengeluaran dana diatur pola penggunaan uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tentunya diatur sepenuhnya oleh istri, dimana jika ada dapat uang tangkapan ikan yang paling penting di setorkan langsung ke istri, selebihnya saya pegang hanya untuk uang rokok. Selanjutnya Bapak JH memaparkan stargei pengaturan uang uang dilakukan untuk kebutuhan keluarga, dan posisi istri lebih dominan dalam pengaturan keuangan. Begitu pula dengan Ibu RS, bahwa karena lagi ada uang maka langsung dialokasinya untuk memenuhi kebutuhan makan dan sekolah, jika ada lebih belanjanya maka disimpan (PW.WB.3).

Kedua, mempergunakan pendapatan baik yang bersumber dari hasil penangkapan ikan sebagai mata pencaharian. Awalnya tidak pernah mencatat dan membuat kebutuhan rincian yang diperlukan, karena kebutuhan selalu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi uang yang didapat dari melaut dan hasil lainnya. Akhirnya saat ini kami termotivasi untuk mencatat kebutuhan hidup. Proses pencatan penting untuk membandingkan beberapa harga bahan pokok. Saudara JF memaparkan bahwa awalnya tidak pernah mencatat dan membuat kebutuhan rincian yang diperlukan, karena kebutuhan selalu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi uang yang didapat dari melaut dan hasil lainnya. Akhirnya saat ini kami termotivasi untuk membuat catatan kebutuhan hidup. Proses pencatan penting untuk membandingkan beberapa harga bahan pokok.

Selanjutnya Bapak JH menjelaskan bahwa ia sendiri pada awalnya sama sekali tidak pernah mencatat kebutuhan yang diperlukan untuk kebutuhan hidup seharinya, dan selalu menyesuaikan dengan selera yang dibutuhkan. Saat ini sudah mulai mencatat rencana pengeluaran uang pendapatan walaupun belum teratur setiap harinya. Berbeda dengan kedua responden sebelumnya, responden ketiga yakni Ibu RS mengaku selama ini hanya mencatat yang diperlukan saja, yang dibeli, terutama untuk keperluan dapur seperti beras, cabai gula, garam dan lainnya (PW.WB.4)

Berkenaan dengan kebiasaan mencari informasi tentang sesuatu yang berhubungan dengan mata pencahariannya, barang atau bahan makanan yang dibutuhkan untuk keperluan hidup sudah mulai dilakukan dengan cara membaca informasi, baik dari media masa seperti televisi maupun media cetak lainnya. Melalui wawancara, Bapak JF memaparkan bahwa ia sering membaca dan mendengar dari TV, tetangga dan teman-teman warga Jaring Halus yang sering ke kota. Terutama informasi tentang tata cara melaut yang modern yang bisa mendapatkan ikan sebanyak mungkin. Responden lainnya yakni Bapak JH juga melek untuk mendapatkan informasi walaupun kurang fokus terhadap isi informasi. Ia seringkali mendapat informasi yang istilahnya agak baru. Melalui cerita istri dan anak yang meminta kebutuhan yang agak aneh, seperti HP, DVD dan lainnya. Selama ini Ia juga seringkali bertanya dan membaca berita tentang Informasi yang paling ia inginkan yaitu tentang tata cara melaut yang modern. Begitu pula dengan Ibu RS yang sehari-harinya mengurus keperluan rumah tangga banyak mendengarkan dan membaca informasi dari berita tentang banyak hal dari TV. Ia memaparkan informasi yang paling disukai dan dicari tentang menu makanan yang baik dan sehat. ((PW.WB.5)

Berdasarkan banyaknya informasi yang mereka dengar dan baca tentang semua kebutuhan hidupnya, akhirnya mereka mempertimbangkan semua informasi dan memutuskan untuk memilih prioritas kebutuhan yang paling penting. Bapak JF misalnya, memaparkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya kami menentukan prioritas kebutuhan sehari-hari yang harus di penuhi, yang tentunya dengan melihat kebutuhan yang paling mendesak untuk dirumah, seperti beras dan gula, serta biaya untuk keperluan sekolah anak-anak.biaya listrik dan solar perahu untuk melaut. Begitu pula paparan Bapak JH jawabannya telatif sama dengan Bapak JF, mereka lebih mementingkan memenuhi kebutuhan hidup untuk keperluan keluarganya sehari-hari serta kebutuhan untuk membeli solar. Selanjutnya mengenai paparan responden yang ketiga, yakni Ibu RS, ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dibacanya begitu tawaran yang menarik dan menggiurkan, tetapi kami hanya menentukan kebutuhan untuk makan sehari-hari

serta biaya sekolah anak, dan keperluan untuk menjemur ikan. (PW.WB.6)

Setelah mereka menentukan prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan informasi yang diterimanya, selanjutnya melalui wawancara digali informasi tentang bagaimana cara mereka menghitung uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bapak JF selaku kepala rumah tangga yang menjadi sumber penghasilan keluarga memaparkan bahwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-harinya awalnya kadang-kadang dihitung, kadang-kadang tidak dihitung, dan kalau dihitung tentunya menghitung apakah jumlah uang cukup dengan yang mau dibelanjakan. Tetapi saat ini setelah tahu cara menghitung yang baik, setiap rencana pengeluaran dihitung secara teliti, sebab khawatir terlalu banyak yang dibeli, padahal ada kebutuhan lainnya yang belum dibeli. Sehingga sebelum belanja dihitung ulang antara jumlah uang yang ada dengan kebutuhan yang akan dibeli. Ketika mewawancarai responden kedua yakni Bapak JH, terungkap bahwa ia jarang bahkan tak pernah menghitung pengeluaran yang dibelanjakan, karena setiap dapat uang dari penjualan semuanya diserahkan kepada istri, dan istrilah yang selalu mengatur pengeluaran belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi setelah paham cara menghitung ia dan istrinya bersama-sama menghitung dan menentukan apa yang akan dibeli dengan uang yang ada. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu RS, selama ini ia tidak pernah menghitung uang untuk keperluan hidup sehari-hari, sebab kalau uang belanja kurang ia selalu minta uang tambahan kepada suaminya untuk menutupi kekurangannya. Saat ini setelah paham cara menghitung, ia mengkalkulasikan terlebih dahulu uang yang dimilikinya dengan kebutuhan yang akan dibelinya. Sehingga sebelum belanja ia menginformasikan kekurangan uang belanja kepada suaminya. (PW.WB.7)

Berkenaan dengan kegiatan selanjutnya yakni mencatat setiap pengeluaran uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan usaha lainnya, hampir semua responden menjawab melakukan proses pencatatan walaupun sangat sederhana. Hasil wawancara dengan Bapak JF terungkap bahwa kadang-kadang mencatat pengeluaran, dan dihitung secara biasa saja tidak memakai alat hitung seperti

kalkulator karena ia sudah bisa menghitung. Begitu pula dengan ungkapan yang disampaikan Bapak JH, bahwa ia seringkali mencatat pengeluaran bersama dengan istrinya, terutama yang memerlukan uang besar, tetapi untuk kebutuhan hidup sehari-hari adakalanya istrinya yang secara langsung mencatat sebab istrinya yang tahu dan mengatur pengeluaran uangnya. Selanjutnya hasil wawancara dengan responden ketiga, yakni Ibu RS, yang juga menjawab sama bahwa ia mencatat setiap barang yang sudah dibelinya termasuk mencatat ulang uang yang sudah keluar. (PW.WB.8)

Kegiatan mendokumentasikan data atau menyimpan catatan rencana pengeluaran maupun catatan pengeluaran dana, rata-rata responden menjawab dengan nada yang relatif sama, bahwa mereka seringkali menyimpan data catatan pengeluaran. Bapak JF misalnya, memaparkan bahwa untuk pengeluaran yang besar biasanya buku catatannya kita simpan, karena kalau dibutuhkan dapat dengan mudah dicari. Kecuali untuk catatan pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari kadang kadang disimpan tapi juga kadang tidak disimpan. Selanjutnya Bapak JH juga memaparkan bahwa untuk beberapa catatan penting tentang pengeluaran seringkali disimpan. Biasanya kalau pengeluaran tersebut yang jumlahnya besar. Seperti biaya pendidikan anak, atau catatan tentang biaya perbaikan kapal untuk menangkap ikan. Begitu pula dengan jawaban Ibu RS, bahwa ia biasa menyimpan data tentang catatan pengeluaran. Terutama kalau ada pembelian yang besar uangnya dan diberi kwitansi oleh toko. Saya biasa menyimpan bukti pembelian dan kartu garansi, disertai catatan saya tentang biaya pengeluarannya. (PW.WB.9)

Ketiga, kemampuan mengevaluasi atau menilai tentang penggunaan pendapatan yang dikeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak JF memberi jawaban tentang ketertiban penggunaan dana hasil pendapatannya secara tertib. Menurutnya, Ia mengaku penggunaan uang hasil usaha digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan semuanya tertib dan mudah diingat baik oleh saya maupun istri saya. Walaupun untuk beberapa pengeluaran adakalanya tidak tertib, terutama menghadapi resiko yang kadang muncul saat ada

kebutuhan yang mendadak seperti ada keluarga sakit. Begitu pula dengan ungkapan Bapak JH, yang seringkali melibatkan istrinya dalam mempergunakan uang hasil pendapatannya, ia merasa tertib dalam penggunaan keuangan. Menurutnya karena uang pendapatannya relatif kecil jadi sangat mudah dipanatau dan biasanya langsung habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi adakalanya menyisihkan sebagian uang hasil pendapatannya untuk persiapan jika ada onderdil kapal penangkap ikan yang harus dibelinya. Ibu RS memberikan jawaban sangat singkat, menurutnya ia dan suaminya merasa tertib dalam penggunaan pendapatannya, ia merasa uang hasil usaha suaminya dan dirinya selama ini disatukan dan penggunaanya didiskusikan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam keluarganya. (PW.WB.10)

Berkenaan dengan aspek peningkatan kemampuan pada diri warga belajar, terungkap melalui wawancara dengan ketiga responden tersebut diatas bahwa mereka merasa ada peningkatan dalam pengelolaan pendapatan setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan di Desa Jaring Halus. Data tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak JF, ia memaparkan bahwa ada peningkatan pada dirinya dalam pengelolaan pendapatan sehari-hari setelah mengikuti pendidikan keaksaraan ini, terutama meningkatnya motivasi untuk menyimpan dan berhemat dalam menggunakan biaya sehari-hari, kemudian termotivasi untuk mengembangkan usaha selain mencari tangkapan dilaut. Selanjutnya responden kedua yaitu Bapak JH, Menurutnya, ada peningkatan diri dalam keberaksaraan, sebab ia saat ini menjadi paham tentang cara membaca, berhitung dan menulis. Sehingga dalam mengatur pengelolaan pendapatan sehari-hari setelah mengikuti pendidikan keaksaraan ini, lebih mudah menghitung uang dan hasil tangkapan ikan, dan Ia merasa kemampuan membacanya lebih baik sehingga dapat lebih banyak lagi mendapatkan informasi. Menurut Pak JH, melalui pendidikan keaksaraan ia termotivasi untuk mengembangkan usahanya selain mencari tangkapan ikan di laut. Saat ini ia sudah membuat usaha tepung ikan, dan bakso ikan, walaupun masih dalam modal kecil-kecilan. Responden ketiga yaitu

Ibu RS, memaparkan bahwa melalui pendidikan keaksaraan ada peningkatan yang ia rasakan. Menurutnya, peningkatan yang cukup baik terutama dalam kemampuan mencatat uang, sehingga mudah menghitung uang simpanan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui pendidikan keaksaraan ia semakin termotivasi untuk mengembangkan usahanya selain mencari menjahit kain, ia juga mengembangkan usaha mengeringkan ikan dalam kemasan, serta membuat tambak ikan patin. (PW.WB.1)

Keempat, Peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengembangan usaha. Bapak JF memberikan jawaban, sampai saat ini Ia termotivasi untuk meningkatkan pendapatan melalui penambahan kegiatan usaha. Namun sampai saat ini belum terealisasi, Ia masih mengelola usahanya melalui kegiatan penangkapan ikan di laut dan hasilnya dijual. Berbeda dengan responden yang pertama, pada responden yang kedua yakni Bapak JH lebih banyak memaparkan tentang keberhasilan dirinya dalam menambah jenis usahanya. Menurutnya ada penambahan variasi usaha yang dikembangkan setelah pendidikan keaksaraan yaitu membuat penggilingan tepung ikan dan bakso, selain usaha nelayan dan membuat kerambah ikan kerapuh. Begitu pula dengan jawaban dari Ibu RS sebagai responden yang ketiga. Menurutnya selama mengikuti pendidikan keaksaraan kemampuan membaca dan berhitung serta menulis cukup memberi motivasi untuk menambah jenis usahanya. Menurut Ibu RS selama ini ada penambahan variasi usaha selain menjahit, yakni usaha yang tengah dilakukan adalah jemur ikan belah, menangkap udang. (PW.WB.12)

Berkenaan dengan penambahan jaringan usahanya, warga belajar peserta pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus, rata-rata memiliki mitra kerjasama dalam mengembangkan usahanya. Bapak JF memaparkan bahwa selama ini Ia mengatakan mitra usaha yakni dengan para pedagang di daerah lain. Ia sudah mulai mengunjungi beberapa desa di wilayah Sumatera Utara untuk dijadikan mitra atau agent promosi penjualan ikan. Kegiatan membuka agen ini diharapkan ada keuntungan yang lebih untuk biaya sekolah anak. Bapak JH yang selama ini banyak mengenal

para pedagang membangun kemitraan secara intensif. Selama ini Ia bermitra dengan para pedagang asongan yang menjual ikan kemasan hasil produksi saya sendiri. Usaha yang dilakukan juga dengan mengedarkan tepung ikan ke pengecer, dan warga jaring halus. Setiap harinya ada saja warung jajanan yang menerima simpanan dagangannya. Begitu pula dengan Ibu RS yang lebih awal membuka usahanya. Ia membangun kemitraan dengan cara kerjasama dalam pengadaan bahan pakaian dengan organisasi nelayan di Desa Jaring Halus, Menurutnya selain mengembangkan tambak ikan patin, kegiatan menjahit juga Ia terus kembangkan dan bermitra dengan banyak pihak. PW.13

Walau mereka selama ini telah dianggap berhasil dalam kegiatan usahamengelola pendapatan hasil usahanya. Kendala usaha yang mereka lakukan nampaknya masih banyak dirasakan. Bapak JF mengalami adanya kesulitan dalam mengembangkan usaha selain menangkap ikan. Karena permodalan yang terbatas. Padahal Ia sangat berminat sekali membuka usaha lain yang ada hubungannya dengan kegiatan menangkap ikan. Ia berharap kedepannya dapat membuka toko onderdir dan bahan bakar untuk kapal penangkap ikan. Selanjutnya kendala yang dihadapi Bapak JH, adalah dalam penyiapan bahan baku tepung ikan. Menurutnya kendala yang dialaminya itu berhubungan dengan keterbatasan sarana, selaian jumlahnya yang masih yang masih sangat kurang juga kualitas sarannya sudah kurang layak. Padahal permintaan terhadap produksinya sudah mulai meningkat. Kendala yang dihadapi Ibu RS, lebih banyak berkenaan dengan penyediaan bahan baku. Karena jarak dari Desa Jaring Halus ke Kota tempat belanja sangat jauh. Ia berharap dalam membuka toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan usahanya. (PW.WB.14).

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup Pada Masyarakat Nelayan di Desa Jaring Halus.

Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Jaring Halus sangat unik dan relative berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan

keaksaraan di tempat lain. Keunikan ini akan nampak dari berbagai faktor. Melalui penelitian ini akan diungkap tentang faktor penghambat dan pendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan di Jaring Halus, berkenaan dengan aspek: (1) pengelolaan, (2) tenaga pendidik, (3) warga belajar, (4) sarana belajar, dan (5) biaya penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan.

Melalui wawancara dengan pihak pengelola terungkap secara jelas tentang faktor pendukung dan penghambat dari setiap aspek tersebut, yakni: pertama, aspek pengelolaan program membahas tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Berdasarkan paparan pengelola, pada sub aspek perencanaan factor penghambat atau kendala pada sub aspek ini adalah secara umum tidak ada permasalahan yang menjadi kendala, tetapi secara teknis permasalahan pada perencanaan program berkenaan dengan kesulitan menyusun perencanaan jadwal pelaksanaan pendidikan keaksaraan. Hal ini disebabkan oleh permasalahan kesiapan warga belajar dalam mengikuti program ini, yaitu permasalahan waktu mereka yang tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti program ini secara berkesinambungan sesuai waktu belajar yang ditentukan, sehingga mereka bisa jika waktu pulang mencari ikan, atau urusan rumah mereka sudah rampung, kemudian misalnya jam belajar itu 2 jam, kadang-kadang banyak warga belajarnya hanya bisa 1 jam saja, untuk permasalahan tempat media belajar, alat-alat belajar tidak ada masalah. Selanjutnya faktor pendukung pada aspek perencanaan adalah faktor semangat dan kekompakan warga belajar dengan para Tutor, keinginan warga belajar cukup antusias dalam menyusun rencana belajar. Selain itu, dukungan juga datang dari perangkat desa dan dusun (PW.P.69-70)

Pada subaspek pelaksanaan program terdapat kendala yang cukup mengganggu yang memang sudah dapat dianalisis dari kendala perencanaannya. Faktor penghambat pelaksanaan tersebut adalah masalah waktu belajar dari semua warga belajar yang rata-rata sebagai nelayan yang mencari ikan, ibu-ibu warga belajar yang juga rata-rata bekerja menjemur dan membersihkan hasil lautnya. Sehingga permasalahan yang muncul diantaranya pada jam belajar dimulai jam 2, warga belajar yang hadir tidak pernah mencapai 30-40

orang secara bersamaan, misalnya ada warga yang belajar hanya 1 jam lalu dia pulang, ada yang baru datang 1 jam kemudian atau waktu sudah mau pulang baru mereka datang, itulah kendala yang sering terjadi. Kemudian dalam hal belajar dan prakteknya. Kita lihat Tutor sudah 2 sampai lima kali memberi tahu tentang huruf dan angka kadang-kadang warga belajar susah menangkap atau mengulang materi yang baru atau sedang dipelajari. Selanjutnya faktor pendukung pada pelaksanaannya adalah semangat dan kekompakan warga belajar dengan para Tutor, dimana ada keinginan besar dari warga belajar untuk bisa membaca, menulis dan berhitung sehingga warga belajar sangat bersemangat untuk mengikuti materi yang diajarkan kalau pun mereka terkadang kurang seriusnya, kemudian para Tutor juga bisa mencairkan komunikasi dengan warga belajar sehingga tidak ada jarak dengan warga belajar, dan mereka cukup sabar dalam mengajari warga belajar. (PW.P.71-72)

Pada sub aspek evaluasi pengelolaan program diketahui banyak kendala diantaranya dalam proses evaluasi pendidikan keaksaraan meliputi dalam proses pembelajaran dimana dalam mengevaluasi perkembangan kemajuan warga belajar tidak bisa secara menyeruh dalam waktu bersamaan, karena sulit mengumpulkan warga secara bersamaan dalam mengevaluasi warga belajar, sehingga dilakukan dalam beberapa kali, itu lah kendala utama dalam proses melakukan evaluasi. Selanjutnya faktor pendukung pada kegiatan evaluasi adalah kesiapan pengelola dan Tutor dalam pendidikan keaksaraan, kemudian kesiapan warga belajar walaupun waktu mereka untuk berkumpul secara bersama sulit dilakukan dalam waktu tertentu. Tetapi semangat mereka untuk terus ikut pada pendidikan keaksaraan sangat mendukung proses evaluasi pada pendidikan keaksaraan. (PW.P.73-74)

Kedua, aspek tenaga pendidik. Permasalahan yang muncul pada pengelolaan tenaga pendidik adalah berkenaan dengan subaspek: kualifikasi, kompetensi dan kinerja tenaga pendidik pada program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus. Pada sub aspek kualifikasi tenaga pendidik terungkap ada kendala yang berkenaan dengan belum ada Tutor yang secara

khusus diangkat atau mengabdikan diri sebagai pendidik dengan latar belakang kualifikasi Sarjana Pendidikan. Oleh karena itu tenaga pendidik masih dilakukan oleh mahasiswa. Walaupun kurikulumnya hanya menuntut tugas pokok sederhana, yakni mengajar dengan tujuan warga belajar bisa dan mampu untuk menulis, membaca dan berhitung, namun kebutuhan kehadiran Sarjana Pendidikan sangat penting, terutama dalam pendalaman substansi materi belajar maupun inovasi pembelajaran. Selanjutnya faktor pendukung dalam aspek ketenagaan diantaranya proses komunikasi yang nampaknya kondusif dan menyenangkan. Karena Tutornya adalah mahasiswa dari berbagai fakultas, jadi informasi dan variasi mengajar nampaknya sangat dinamis dan tidak menjenuhkan. (PW.P.75-76)

Berkenaan dengan subaspek kompetensi tenaga pengajar, nampaknya belum memenuhi syarat sebagai pengajar karena umumnya mereka mahasiswa yang belum dilatih secara khusus tentang kompetensi tenaga pendidik. Namun demikian dalam prosesnya selama ini belum diketemukan ada masalah serius dengan aspek kompetensi Tutor, karena semua Tutor bisa mengajari warga belajar dengan baik, mulai dengan membaca, menulis, berhitung, kemudian bisa memotivasi warga belajar akan pentingnya dan manfaat bisa membaca dan menulis. Selanjutnya faktor pendukung pengembangan kompetensi Tutor adalah kepercayaan dari warga belajar terhadap para Tutor. Selama ini para Tutor telah berusaha secara maksimal mengajari warga dalam belajar membaca, menulis dan berhitung sesuai kemampuannya. Selain itu, para Tutor juga melakukan penilaian secara objektif pada pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus tersebut. (PW.P.77-78)

Selanjutnya pada subaspek kinerja daripada para Tutor, kendala yang dihadapi berkenaan dengan kinerja Tutor dalam melaksanakan tugasnya belum diketemukan hambatan yang berarti, sebab selama ini jadwal mereka mengajar waktunya diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu, saat pembagian jadwal mengajar, para Tutor secara penuh waktu mengajari warga belajar pada pendidikan keaksaraan. Untuk Tutor yang mengajar malam hari disediakan fasilitas penginapan atau tempat tinggal. Selanjutnya faktor pendukung terhadap kinerja Tutor dalam mengajar adalah

perilaku penduduk dan warga belajar yang sangat menghargai para Tutor mereka, sehingga terlihat para Tutor sangat senang dan bersemangat dalam mengajari para warga belajar. (PW.P 79-80)

Ketiga, aspek warga belajar peserta pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jarung Halus. Ada beberapa subaspek pada aspek warga belajar, diantaranya subaspek motivasi dan prestasi warga belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program diketahui bahwa secara umum tidak ada kendala motivasi, selama ini warga belajar dalam setiap belajar dengan para Tutor selalu bersemangat, adapun yang sering menjadi kendala mereka adalah kendala dalam membagi waktu untuk bekerja, mengurus rumah, dan waktu untuk mengikuti pendidikan keaksaraan. Sehingga ada kesan bahwa ketidakhadiran mereka saat mengikuti program pendidikan mengalami penurunan motivasi belajar, padahal karena keterbatasan mengatur waktu saja. Selanjutnya berkenaan dengan faktor pendukung terhadap motivasi warga belajar mengikuti program pendidikan keaksaraan diantaranya dukungan keluarga warga belajar dan semua warga Desa Jarung Halus, selain motivasi internal dari warga belajar itu sendiri yakni kesadaran akan penting bisa membaca dan menulis. Dukungan lain bagi warga belajar adalah semangat dari para Tutor yang mengajari para warga belajar dengan sabar. (PW.P 81-82)

Selanjutnya hambatan pada subaspek prestasi belajar daripada warga belajar. Kendala utama dalam subaspek prestasi adalah peningkatan pendalaman warga belajar yang belum sepenuhnya baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan warga belajar secara fisik, seperti kemampuan mengingat, kecepatan membaca dan orientasi berprestasinya masih kurang. Bagi mereka belajar adalah alat mendapatkan ilmu dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada sebagian warga belajar ada pemahaman bahwa ketika mereka sudah mampu membaca, menulis dan berhitung dianggap sudah dianggap berprestasi, padahal ada level atau tingkatan lain seperti keaksaraan mahir yang belum mereka capai. Inilah tantangan bagi para Tutor untuk menambah orientasi berpikir warga belajar dalam program pendidikan keaksaraan. Selanjutnya faktor pendukung peningkatan prestasi belajar warga belajar diantaranya adalah

tersedianya sarana belajar seperti media buku dan alat tulis bagi masing-masing warga belajar. Selain itu, faktor Tutor yang dengan sabar mengejar dan meminta warga belajar mempraktekan kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang telah dipelajarinya. (PW.P 83-84)

Keempat, aspek sarana dan prasarana dalam program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus. Ada dua hal yang menjadi bahan diskusi pada aspek ini adalah subaspek tempat belajar dan fasilitas belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program pendidikan keaksaraan diketahui bahwa faktor penghambat atau kendala pada subaspek tempat berkenaan dengan keterbatasan akan kebutuhan aula atau ruangan belajar yang cukup besar. Namun demikian keterbatasan tempat belajar sama sekali tidak menjadi kendala serius, karena tempat belajar untuk warga belajar tidak saja hanya diruang belajar yang disediakan terkadang Tutor juga mengajari warga belajar di rumah mereka diluar jam belajar yang ditentukan. Selanjutnya faktor pendorong atau pendukung tentang sub aspek tempat belajar ini adalah komitmen para aparat Desa yang bersedia membolehkan sebagian tempat kerjanya untuk kegiatan belajar, kalau ruangan tempat belajar dianggap kurang. (PW.P. 85-86)

Selanjutnya pada subaspek fasilitas belajar, pengelola program pendidikan keaksaraan memaparkan bahwa selama ini yang menjadi kendala berkenaan dengan fasilitas belajar adalah alat-alat belajar seperti buku, spidol, alat praktek dan dokumen lainnya yang diperlukan. Persyaratan minimal dalam program pendidikan keaksaraan telah digariskan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat (2009:8) sebagai berikut: Sarana dan prasarana kelompok belajar meliputi sarana dan prasarana belajar berupa alat tulis, bahan ajar, alat dan bahan praktik keterampilan usaha, serta administrasi kelompok belajar. Sarana dan prasarana belajar minimal yang perlu disediakan di setiap pembelajaran meliputi: (1) Papan tulis, (2) Alat-alat tulis, (3) Modul atau bahan belajar lain yang sejenis, (4) Alat dan bahan praktik keterampilan usaha, dan (5) Tempat pembelajaran.

Sarana administrasi minimal yang perlu disediakan di setiap kelompok belajar meliputi: (1) Buku induk warga belajar, (2) Daftar

hadir warga belajar, (3) Buku induk Tutor/narasumber teknis, (4) Daftar hadir Tutor, (5) Buku tamu, (6) Buku rencana pembelajaran (disiapkan oleh Tutor), (7) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar WB, (8) Buku inventaris barang kelompok belajar, (9) Buku kas umum, (10) Jadwal belajar/pertemuan.

Saat ini kendala pengadaan sarana dan fasilitas tersebut telah dipenuhi Pemerintah Desa Jaring Halus bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi sangat membantu warga belajar dalam pengadaan fasilitas belajar pendidikan keaksaraan, walaupun belum selengkap yang diharapkan. Selanjutnya faktor pendukung pengadaan fasilitas belajar pada program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di desa Jaring Halus adalah adanya komitmen dan perhatian nyata yang dilakukan oleh Tutor, pihak perguruan tinggi dan juga pihak aparaturnya Desa Jaring Halus. (PW.P. 87-88)

Kelima, pembiayaan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus. Ada tiga subaspek yang mengungkap kendala dan pendukung program pembiayaan pendidikan keaksaraan antara lain: sumber biaya, penggunaan biaya dan pelaporan biaya pendidikan keaksaraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kendala yang dihadapi berkenaan dengan sumber biaya program pendidikan keaksaraan awalnya adalah kebutuhan untuk mendapatkan sumber subsidi yang tetap pada program pendidikan keaksaraan. Saat ini telah dapat dipenuhi, karena masalah sumber biaya pada pendidikan keaksaraan, seperti konsumsi, makanan ringan, serta keperluan belajar warga belajar ditanggulangi oleh warga sekitar dan dari perangkat desa. Selanjutnya faktor pendukung pengadaan sumber biaya samapai saat ini adalah dari pihak UPKIM UMSU, dan bantuan dari pihak Desa Jaring halus dan sebagian bantuan warga sekitar. (PW.P. 98-90)

Penggunaan biaya program pendidikan keaksaraan relatif tidak ada masalah serius sebab semua sumber dana langsung diatur oleh pihak pengelola sepenuhnya. Adapun faktor pendukung dalam penggunaan biaya diantaranya waktu penggunaan biaya yang relatif tidak harus serentak. Selama ini biaya yang digunakan hanya pada saat pendidkan berlangsung atau pada saat belajar, Sedangkan untuk

biaya minum warga belajar dilakukan pada awal proses belajar. Semua penggunaan biaya pendidikan dikoordinasikan secara terbuka dan bersama oleh pihak Desa Jaring halus dan dan para Tutor.(PW.P. 91-92

Pada subaspek pelaporan penggunaan biaya program pendidikan keaksaraan dilakukan oleh pengelola program, dan sampai saat ini tidak menghadapi banyak kendala serius, hanya waktu pembuatan dan teknis pengetikan saja. Karena keterbatasan kapasitas para pengelola yang siap mengetik laporan menggunakan Komputer. Selanjutnya faktor pendukung dalam penyusunan laporan penggunaan biaya pendidikan antara lain perhatian dan keterlibatan semua unsur. Sehingga data dan informasi yang diisi dalam laporan biaya pendidikan bahkan keseluruhan kegiatan penyelenggaraan program diketahui oleh semua pihak. (PW.P. 93-94)

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembahasan Umum

Ditinjau dari historisnya pendidikan keaksaraan di Indonesia telah melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang. Sejak awal perang kemerdekaan para gerilyawan yang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung secara aktif mengajari rekannya dan masyarakat yang belum dapat membaca dan menulis. Pendidikan ini dikenal dengan istilah pendidikan keaksaraan tradisional yakni pengajaran pengetahuan, kemampuan dasar budaya membaca, menulis dan berhitung segenap warga masyarakat yang masih buta hurup selama perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya pada masa kemerdekaan dikenal 'kursus ABC', yang kemudian pada tahun 1964 dinamakan Pemberantasan Buta Huruf (PBH), yang berlangsung secara merata di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan Pemberantasan Buta Huruf tersebut pada tahun 1978 dikemas menjadi kelompok belajar (Kejar) Paket A dan tahun 1995 menjadi Keaksaraan Fungsional (KF) sebagai pendekatan untuk mengembangkan kemampuan dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan warga belajar (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat, 2002:1-3). Dengan demikian, keaksaraan fungsional lebih berpusat pada bagaimana cara masyarakat menggunakan keterampilan keaksarannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya membaca informasi tetapi menerapkannya dan mengambil keuntungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, secara material maupun secara fisik.

Keaksaraan telah berkembang menjadi kemampuan mencari informasi, secara kritis mengolah, menilai dan mengelolanya (dalam dunia digital) untuk kebermanfaatan bagi dirinya dan berbagi dengan orang lain. Sehingga dibedakan antara *keaksaraan dasar* dan *keaksaraan keluarga* termasuk *keaksaraan usaha mandiri* (Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, 2009a:29). Pendidikan keaksaraan mewakili kebutuhan *revolution, reform, maintenance and conservation* (Jones, 1988:47). Penyelenggaraan Paket A buku A1 – A20 lebih merupakan revolusi dan reformasi cara belajar untuk mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Sedangkan Paket A buku A21 – A60 dan A61 – A100 secara fungsional lebih menekankan upaya pemeliharaan dan konservasi keaksaraan sesuai bidang kehidupan dan pekerjaan warga belajar.

Saat ini walaupun upaya pemberantasan terus dilakukan, namun masyarakat yang buta huruf masih ada. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (2009b:16) sasaran pendidikan keaksaraan sampai akhir Agustus 2008 mencapai 10,16 juta orang (6,22 persen), dari jumlah tersebut, 65 persen adalah wanita. Sedangkan menurut BPS pada tahun 2009 proporsi angka melek huruf penduduk berumur 10 tahun ke atas mencapai 93,05 persen. Capaian pendidikan nonformal, terutama tuna aksara terhadap Indeks Pembangunan Manusia mulai 2010 telah dikecualikan dari Laporan Global IPM Badan Pembangunan PBB setelah koefisien pendidikan hanya mengacu pendidikan formal (Hardiyanto, 2011:31).

Lambatnya pemberantasan buta aksara dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi. Sekurang-kurangnya ada dua kendala penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yaitu: *pertama*, secara geografis kondisi Negara Indonesia masih cukup banyak daerah yang terpencil, pedesaan yang sulit transfortasinya serta

daerah yang masih terisolasi. Daerah yang karakteristiknya seperti itu masih relatif sangat luas, hal ini yang mengakibatkan pelaksanaan pendidikan keaksaraan di daerah tersebut menjadi sulit, walaupun bisa biayanya menjadi relatif mahal sementara itu kemampuan pemerintah dan masyarakat masih sangat terbatas keberhasilannya. *Kedua*, jumlah calon buta aksara baru setiap tahunnya berdatangan, akan tetapi jumlah buta aksara yang sebagian besar merupakan sasaran yang sangat sulit (*hardrock*). Karena mereka rata-rata berusia 45 tahun, yang kondisi ekonominya tergolong miskin, status sosialnya relatif rendah, dan tingkat kesehatannya umumnya kurang memadai menjadikan motivasi dan daya tahan mereka untuk belajar keaksaraan sangat rendah. *Ketiga*, akuntabilitas terhadap mutu dan hasil penyelenggaraan selama ini belum ajeg.

Dalam kajian filsafat pendidikan luar sekolah, Oong Komar (2006:19) memaparkan kesalahan pendidikan yang menyebabkan keterhambatan program pendidikan diantaranya: pertama, kesalahan teknis, pendidik yang kurang terampil dalam melaksanakan pembelajaran yang baik, misalnya pendidik tidak melaksanakan kontak psikologis (kontak pandang) dengan memberikan kasih sayang kepada peserta didiknya atau pendidik yang tidak mereaksi keinginan peserta didiknya. *Kedua*, kesalahan konsep, yaitu pendidik yang kurang mendalami konsep-konsep ilmu pendidikan sehingga memiliki pandangan yang salah tentang perbuatan mendidiknya, misalnya menganggap bahwa peserta didiknya merupakan suatu wadah yang harus diisi dengan ilmu sebanyak mungkin. *Ketiga*, kesalahan kepribadian, yaitu pendidik memiliki sumber struktur kepribadian yang menyimpang, misalnya memiliki sifat agresif, egois, depresi/murung, cemas, frustrasi dan sebagainya.

Kelemahan lain seringkali terjadi dalam pendidikan keaksaraan adalah berkenaan dengan pemahaman Tutor tentang sasaran pendidikan keaksaraan yang diasumsikan sebagai warga belajar yang tidak tahu apa-apa, padahal mereka adalah warga masyarakat yang termasuk kategori dewasa. Di Indonesia umumnya penyelenggaraan pembelajaran keaksaraan fungsional tingkat dasar memiliki kelompok sasaran orang dewasa yang telah memiliki

berbagai pengalaman hidup. Maka dalam layanan dan pendekatan pembelajarannya pun Tutor harus memperhatikan karakteristik orang dewasa. Tutor harus pandai melihat situasi dan kondisi belajar warga belajar. Bagi orang dewasa, terkadang belajar menjadi suatu beban dan merepotkan, terkadang pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan kurang memperhatikan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, Tutor pendidikan keaksaraan yang sasarannya orang dewasa selayaknya memahami konsep dan teori pendidikan orang dewasa (andragogik).

Hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, tentu merupakan kelemahan yang umumnya terjadi atau seringkali dialami pendidik dalam proses pembelajaran baik pada lembaga formal maupun dalam pendidikan nonformal termasuk pelaksanaan pendidikan keaksaraan. Berkaitan dengan pendidikan keaksaraan, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan sebagaimana diuraikan diatas, secara teoritis konsep pendidikan keaksaraan telah menunjukkan banyak manfaat sebagai perwujudan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang senantiasa memberi solusi atau alternatif pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Program-program pendidikan luar sekolah yang dijalankan pada satu negara pada umumnya merupakan jawaban terhadap permasalahan (sosial) yang dihadapi negara tersebut.

Selama ini Pendidikan Luar Sekolah dipandang memberikan solusi terhadap permasalahan karena pendidikan luar sekolah merupakan alternatif solusi yang baik untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut. Peran pendidikan luar sekolah sebagaimana diungkapkan di atas, sejalan dengan karakteristik pendidikan luar sekolah itu sendiri sebagaimana diungkapkan Sutaryat Trisnamansyah (2003: 19), diantaranya: (1) bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan, (2) berpusat pada peserta didik, (3) waktu penyelenggaraan relatif singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan, (4) menggunakan kurikulum kafetaria, (5) Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri, (6) Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat

mendatar, (7) Penggunaan sumber-sumber lokal. Atas karakteristik di atas, pendidikan luar sekolah memiliki banyak keunggulan yaitu: memiliki program yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu dalam aplikasinya penggunaan kurikulum dan proses pembelajaran ditetapkan bersama peserta didik.

Karakteristik pendidikan luar sekolah tersebut merupakan rujukan konsep bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hakekatnya merupakan upaya untuk mendorong mereka agar melakukan perubahan dengan mengembangkan kekuatan yang dimilikinya agar memberikan pengaruh pada lingkungan kehidupannya dan kedudukannya dalam masyarakat. Proses pemberdayaan (*empowering*) sebagaimana yang didiskusikan dalam hasil-hasil studi terdahulu bahwa antara pihak yang memberdayakan dengan masyarakat yang diberdayakan terjalin interaksi yang bersifat edukatif, yaitu interaksi yang ditujukan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat. Makna edukatif ini menjadi sangat jelas dalam arti pemberdayaan yang dikemukakan oleh Babari dan Priyano (Ikka Kartika, 2003), yaitu: Proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka program pendidikan keaksaraan yang dalam implementasinya adalah proses pembelajaran yang merupakan kegiatan pemberdayaan, khususnya pada anggota masyarakat nelayan yang berada di Desa Jaring Halus. Kegiatan pemberdayaan pada dasarnya mengupayakan agar seseorang menjadi sadar, sebab dengan kesadaran itu ia dapat berbuat dan mengontrol aktivitas dirinya, mempertahankan dirinya, dan penuh makna dalam hidupnya. Pemberdayaan menurut Kindervatter (1979) dalam bukunya *Nonformal as An Empowering process*, memiliki makna agar orang-orang yang diberdayakan itu mempunyai “daya” atau mempunyai kemampuan untuk hidup layak sama dengan temannya sesama manusia. Pendidikan sebagai

upaya mencerdaskan bangsa berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat seimbang baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, antara hak dan kewajiban, menjadi warga negara yang bersikap dan berbuat demokratis terhadap sesama manusia menuju masyarakat yang memahami akan hak, kewenangan dan tanggungjawab mereka dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kindervatter (1979:13) mengartikan pemberdayaan (*empowering*) sebagai: *People gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political forces in order to improve their standing in society*. Artinya bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan atau politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Batasan ini lebih menekankan pada produk akhir dari proses pemberdayaan, yaitu masyarakat memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya-daya sosial, ekonomi, dan politik, agar bisa meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pendidikan luar sekolah, Kindervatter (1979:245) lebih lanjut menyatakan pemberdayaan sebagai berikut:

Non formal education for empowerment is an approach which enable leaner ti again greater understanding of and control over social, economic, and/or political forces through: (1) exsercising process a high degree of control over all aspects of the learning process, (2) learning both content and process skill responsive to their needs to and problems, and (3) working collaboratively to asolve mutual problems.

Proses pemberdayaan merupakan inti dari pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah. Pemberdayaan masyarakat sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial dan terjadi pula penanaman nilai-nilai budaya maju; seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggung jawaban. Proses pemberdayaan seperti ini merupakan paradigma baru dalam pembangunan

manusia seutuhnya dan berkelanjutan. Dampak dari adanya pendidikan keaksaraan; “dampak atau pengaruh (*impact*) adalah menyangkut hasil yang dicapai peserta didik (pesereta pendidikan) atau lulusan” (Djudju Sudjana, 2009:3).

Dampak program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus, dapat dianalisis pada dua dampak yaitu, *pertama*, dampak proses adalah rangkaian kegiatan sebagai pengaruh timbal balik dalam suatu program pendidikan keaksaraan, warga belajar (masyarakat nelayan di Jaring Halus) mampu melakukan hasil dari pendidikan baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarganya. Masyarakat Nelayan di Jaring Halus, kini mulai bangkit perekonomiannya melalui usaha membuat berbagai makanan olahan ikan laut. *Kedua* dampak hasil adalah merupakan rangkaian akibat yang muncul setelah program pendidikan selesai dilaksanakan, yang meliputi memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru, peningkatan taraf hidup, peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Perubahan yang nampak adalah kemampuan mengelola hasil pendapatan secara baik. Dengan keterampilan baru ini peserta memiliki kesadaran pentingnya mengatur keuangan keluarga dan menambah jenis usaha atau pencaharian baru.

Bila mengamati uraian di atas, maka upaya pemberdayaan dalam studi ini telah diawali dengan upaya penyadaran warga belajar dalam setting kelompok masyarakat nelayan di Jaring Halus. Sedangkan kesadaran yang diperlukan adalah kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapinya serta pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan belajarnya dalam setting kelompok. Pentingnya pengembangan belajar dalam konteks kelompok didasari oleh pemikiran bahwa kegiatan belajar dalam kelompok lebih bermakna dan memberikan kekuatan kolektivitas. Oleh karena itu, kelompok belajar dapat berfungsi: (1) sebagai metode, (2) sebagai media, (3) sebagai sarana pembelajaran, dan (4) sebagai agen perubahan. Dalam pandangan lain, Kindervatter (1979:207) menyatakan peran kelompok belajar sangat penting sebagai agen pembaharuan dalam rangka pemberdayaan (*empowering process*). Manfaat yang dapat diperoleh dari kelompok belajar adalah dapat

dengan mudah membelajarkan anggotanya, mengubah tingkah lakunya, bahkan mengembangkan masyarakat sampai dengan berdirinya lembaga keuangan lokal (*the local bank*).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991, dijelaskan bahwa kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan. Dengan demikian, pengelompokan warga belajar pada pendidikan keaksaraan merupakan kelompok belajar yang setara dengan kelompok belajar lainnya, seperti: kelompok capir, kelompok belajar usaha, kelompok belajar kesetaraan, kelompok belajar keaksaraan, untuk memudahkan saling membelajarkan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha yang mendukung terhadap peningkatan produktivitas.

Uraian di atas, menegaskan bahwa kelompok belajar keaksaraan yang berada di Desa Jaring Halus termasuk dalam kelompok belajar, sebab dalam aktivitasnya terjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota kelompok untuk terus memenuhi kebutuhan belajarnya bagi peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha produktifnya secara bersama-sama dalam ikatan kelompok. Fungsi kelompok belajar sebagai agen perubahan, mengharuskan ditempatkannya sebagai suatu institusi formal yang daya hidupnya bertahan untuk beberapa periode waktu, Bentuk kelompok yang demikian inilah yang oleh Rogers (1994a:84) disebut sebagai: *group may well pass through a numbers of stage at different time, changing its nature according to its function*.

Merujuk kepada uraian di atas, maka program pendidikan keaksaraan yang dikembangkan dalam setting kelompok merupakan upaya pemberdayaan, karena berdasarkan kajian teoritis maupun kajian empirik kegiatan program keaksaraan telah berfungsi dalam: pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat nelayan terhadap pentingnya upaya mereka untuk membebaskan dirinya dari kebodohan, dari imbalan atau upah kerja yang rendah, dan adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Kedua, membantu masyarakat pelaku nelayan untuk biasa hidup berorganisasi sehingga secara

bersama mereka dapat mempelajari keadaan kehidupannya serta menajagi berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, lapangan usaha, dan kemudahan yang diperoleh seperti pemberian kredit modal, bahan dan alat yang dibutuhkan, serta pemasaran dan informasi yang diperlukan. *Ketiga*, para pendidik atau Tutor bersama warga belajar mengidentifikasi kebutuhan dan mendayagunakan prasarana sosial dan lingkungan masyarakat untuk membantu masyarakat nelayan agar mereka dapat memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi.

Dalam kepustakaan studi pembangunan, wacana mengenai partisipasi masyarakat tidak terlepas dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pentingnya kelompok dalam pengembangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan telah dibicarakan oleh para ahli. Dalam studinya Adi Fahrudin (2012:31) mengutip informasi hasil penelitian DOKU yang memaparkan kesimpulannya bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dikenal sebagai program partisipasi masyarakat (peoples Participation Program) lebih disebabkan karena pembentukan kelompok kecil yang bersifat informal, homogeni dan memiliki minat sosio-ekonomi bersama.

Berdasarkan informasi tersebut, selayaknya program pendidikan keaksaraan yang berbasis kecakapan hidup menggunakan startegi pembelajaran dalam setting kelompok. Pemaknaan program pendidikan keaksaraan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam setting kelompok sebagaimana diungkapkan di atas, sesungguhnya merupakan aktualisasi peranan pendidikan luar sekolah berkenaan dengan hal-hal berikut: *pertama*, sebagai pendekatan awal untuk menumbuhkan kesadaran mereka terhadap permasalahan yang dihadapinya serta pemahaman yang lebih mendalam tentang kegiatan usaha yang digelutinya selama ini. *Kedua*, pendidikan luar sekolah berperan membantu para masyarakat nelayan untuk menumbuhkan minat usaha produktif melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap mental wirausaha. *Ketiga*, pendidikan luar sekolah berperan untuk memberikan pembinaan melalui bimbingan kebersamaan dan bimbingan usaha agar segala sesuatu yang telah dicapai selama ini

oleh masyarakat nelayan disadari untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.

Implikasi teoritis dari program pendidikan keaksaraan ini, memperkuat teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa pendidikan sebagai *human capital* (Becker, 1993). Program-program pendidikan pada hakekatnya dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas, peningkatan pendapatan, dan memampukan peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan sebagai hasil maupun dampak pembelajaran yang telah ditempuh.

Program pendidikan keaksaraan yang dikembangkan di Jaring Halus Sumatera Utara secara nyata telah dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan warga belajarnya sebagai anggota kelompok masyarakat nelayan pada satu sisi dan meningkatkan pendapatan disisi lain. Implikasi teoritis pada program pendidikan keaksaraan terletak pada *pertama*: aspek relevansinya dengan kebutuhan. Berdasarkan temuan empiris, program pendidikan keaksaraan menunjukkan efektivitasnya bagi terpenuhinya kebutuhan belajar (*learning needs*) warga belajar anggota masyarakat nelayan di Jaring Halus, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar dan kreativitas dalam memenuhi kebutuhan selanjutnya.

Kedua, aspek inovasinya dalam pengembangan masyarakat. Merujuk kepada konsep dan kajian difusi inovasi Rogers (1983), program pendidikan keaksaraan yang diterapkan pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus merupakan suatu inovasi, mengingat program pendidikan keaksaraan telah berhasil menunjukkan: (1) *relative advantage*, karena dipandang oleh anggota kelompok masyarakat nelayan dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan produktifitas usahanya. (2) *compatibility*, karena dapat memenuhi kebutuhan belajar dan memiliki kesesuaian dengan potensi yang ada. (3) *complexity*, karena memiliki kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan usaha yang sedang ditekuninya, sehingga untuk memahami materi yang dipelajarinya tidak sulit atau tingkat kesukarannya rendah. (4) *trialability*, karena kegiatan pembelajaran dapat dicobakan dalam

proses kerja atau dalam bahasa lain diistilahkan belajar sambil bekerja (*learning by doing*), selain itu karena adanya daya dukung lingkungan setiap hasil belajar dapat langsung diaplikasikan. (5) *observability*, karena setiap warga masyarakat nelayan yang telah mengikuti proses pembelajaran dan mengaplikasikannya dengan menunjukkan keberhasilannya dapat memberikan gambaran nyata bagi anggota keluarga dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas, maka program pendidikan keaksaraan yang dikembangkan memiliki relevansi dengan karakteristik inovasi dan secara empiris telah menunjukkan efektivitasnya bagi diaplikasikannya hasil belajar. Aplikasi hasil belajar sesungguhnya merupakan respon nyata dari peserta belajar atau dalam bahasa lain diadopsinya suatu inovasi oleh sasaran. Sedangkan implikasi praktis dari program pendidikan keaksaraan ini efektif bagi pemberdayaan anggota masyarakat nelayan dalam meningkatkan produktifitas usahanya. Implikasi praktis ini diantaranya: (1) implikasi bagi anggota warga masyarakat nelayan dalam meningkatkan motivasi belajarnya sehingga senantiasa melakukan belajar secara berkelanjutan dalam memenuhi tuntutan dan perkembangan kebutuhan usahanya, (2) implikasi bagi pengembang program pemberdayaan masyarakat (pengelola dan pendamping), kaitannya dalam keputusan pemenuhan kebutuhan belajar kelompok sasaran masyarakat nelayan. Pengelola dan Tutor, dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan belajar warga belajar masyarakat nelayan perlu memadukan kebutuhan yang diperkirakan (*predictive needs*) dengan kebutuhan aktual yang dirasakan warga belajar sasaran (*felt needs*). Melalui upaya ini diharapkan tidak akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang diprediksikan atas dasar fenomena umum (*generalisasi*), yang seringkali mengakibatkan hasil belajar tidak berpengaruh yang berarti (*over out*) bagi anggota masyarakat nelayan. (3) implikasi bagi instansi pemerintah atau lembaga independent lainnya, kaitannya dalam kebijakan pemberdayaan yang bersifat menyeluruh. Instansi atau departemen terkait sebelum menetapkan kebijakan pemberdayaan perlu memperhatikan program masyarakat setempat (*bottom up program*) yang kemudian dipadukan dengan program dari pusat (*top down*

program). Pemberdayaan bagi masyarakat yang dilakukan melalui upaya ini akan melahirkan program yang adaptabilitasnya tinggi, karena memiliki relevansi yang tepat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pada gilirannya mendapat respon masyarakat sasaran dalam tindakan nyata.

2. Pembahasan Khusus

Pendidikan keaksaraan fungsional perlu mendapat perhatian dan pengkajian secara komprehensif baik pada aspek pengelolaan penyelenggaraan program keaksaraan, maupun orientasi pendidikan keaksaraan yang mengantarkan pada suatu kemampuan keterampilan tertentu sehingga kemampuan keaksaraannya tersebut memiliki makna dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Penelitian ini mendeskripsikan sisi lain dari kegiatan pendidikan keaksaraan yang berbasis pendidikan kecakapan hidup yang dilakukan masyarakat nelayan, sekaligus mengukur tingkat keberaksaraan warga belajar program pendidikan keaksaraan tersebut pada tahap perencanaan, tahap penyelenggaraan, tahap evaluasi dan tahap tindak lanjut, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi

Pemikiran yang mengantarkan perlunya pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus diawali oleh analisis terhadap pemaknaan pendidikan keaksaraan secara global yang mengalami perluasan makna. Pendidikan keaksaraan saat ini bukan hanya berkutat pada masalah kesenjangan kecakapan membaca, menulis dan berhitung, tetapi hal itu juga menyangkut kecakapan hidup (penguasaan keterampilan praktis) yang kontekstual dan selaras dengan perubahan dan kebutuhan pelakunya. Oleh karena itu, dalam pendidikan keaksaraan, pendekatan mutu diwujudkan melalui muatan kecakapan hidup (*lifeskill*) yang dapat mengantarkan para lulusannya memperoleh mata pencaharian melalui pembukaan usaha baru atau keterampilan dunia usaha.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sisi yuridis formal penyelenggaraan pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup bagi masyarakat nelayan yang diselenggarakan di Desa Jaring Halus

merupakan program pendidikan yang diorientasikan pada pengelolaan program yang secara umum merupakan implementasi komitmen dari amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) No. 20 tahun 2003, sekaligus wujud dari program kementerian pendidikan dan kebudayaan pada jalur pendidikan non formal, dengan pendekatan pembelajaran andragogik karena umumnya mereka adalah para masyarakat nelayan yang sudah dewasa. Oleh karena itu sebagai layanan pendidikan non formal, pendidikan keaksaraan harus diselenggarakan secara sistematis dan terorganisir. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudjana (2010:21) mengenai pengertian pendidikan nonformal, bahwa pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem pendidikan persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajar.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan keaksaraan adalah salah satu program dari pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan dimana tujuan dan kegiatan, serta programnya dirumuskan berdasarkan kebutuhan serta minat masyarakat yang bersangkutan yang tidak dapat terpenuhi di jalur persekolahan formal dalam rangka memotivasi masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan produktifitasnya untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

Dilihat dari fungsinya, pendidikan luar sekolah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan. Menurut Mustofa Kamil (2002:24):

Pendidikan nonformal sebagai *modes of learning*, memberikan akses pendidikan dan belajar lebih luas kepada warga belajar. Oleh karena itu warga belajar berpeluang untuk memiliki daya suai (*adaptability*), daya lentur (*flexibility*), kapasitas inovatif dan "*entrepreneurial attitudes and aptitudes*". Sehingga warga belajar tertantang mencari dan memperkuat "*basic knowledge and competences, curiosity and motivations, critical and creative behaviors*" untuk menciptakan situasi-situasi yang

memungkinkan dirinya lebih mapan “*to know how to learn, how to be, and know how to become*: (a) belajar berahlak mulia; (b) Belajar untuk memahami; (c) Belajar berbuat; (d) Belajar hidup dalam kebersamaan; dan (e) Belajar mewujudkan jati dirinya.

Selanjutnya proses pembelajaran yang dilakukan dianalisis dengan menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatoris yang memuat tentang aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Melalui program pendidikan keaksaraan inilah diharapkan terjadi peningkatan mutu hasil belajar berupa tingkat keberaksaraan yang meningkat. Indikator tingkat keberaksaraan warga belajar diukur dari kemampuan mendengar, menulis, membaca, berhitung dan berbicara sebagai ukuran *output* program pendidikan keaksaraan. Salah satu penyebab keberhasilan tersebut adalah perencanaan program yang dilakukan oleh pengelola cukup baik terutama dalam penyesuaian dengan potensi lokal. Selanjutnya *outcome* atau tingkat keberhasilan jangka panjang dari proses pendidikan keaksaraan diukur dari kemampuan warga belajar menerapkan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Karena warga belajarnya adalah masyarakat nelayan yang sehari-harinya bekerja sebagai pencari ikan, dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan keberaksaraan harus bermanfaat dan bermakna dalam pengelolaan pendapatan warga belajar.

Paparan di atas sejalan dengan pendapat Jalal et.al. yang dikutip Ade Kusmiadi (2009:15) dalam sebuah artikelnya yang memaparkan bahwa keberhasilan suatu perencanaan program adalah memperhatikan unsur konteks atau potensi lokal. Unsur-unsur konteks sosial lokal yang harus diperhatikan dalam perancangan program tersebut antara lain: (a) kelompok sasaran, (b) tujuan, (c) kegiatan belajar, (d) waktu dan tempat pembelajaran dan (e) hal lain yang terkait yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok belajar.

Program pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan di Desa Jaring Halus selama ini berjalan dengan baik, walaupun tidak menutup kemungkinan banyak faktor-faktor penyebab keberhasilan

atau kendala yang selama ini dihadapi baik oleh para pengelola, para Tutor maupun warga belajar. Kelima aspek tersebut diatas akan dianalisis sebagai berikut:

Pertama, tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Jaring Halus yang diukur oleh kemampuan responden yang mewakili seluruh responden warga belajar di Deas Jaring halus. Sesuai dengan buku rujukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang diterbitkan Kemendikbud, ada 5 (lima) aspek yang dijadikan indikator kemampuan warga belajar yakni kemampuan mendengar, membaca, menulis, berhitung dan bercerita yang dianggap representatif mewakili semua warga masyarakat. Kondisi masyarakat buta aksara di Desa Jaring Halus terjadi sebagai akibat dari kondisi tempat tinggal dan social ekonomi masyarakat yang rendah. Asumsi tersebut cukup beralasan sebab berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UNESCO (Kusnadi, 2005:35) dipaparkan bahwa Jumlah buta aksara terdapat dikalangan suku-suku terasing atau kelompok-kelompok minoritas, yang kurang memiliki akses terhadap dunia pendidikan. Di daerah perkotaan jumlah buta aksara banyak terkonsentrasi di daerah kawasan kumuh (*slum area*) yang penghuninya berpenghasilan rendah. Karena rendahnya pendapatan tersebut, mereka lebih mementingkan “perut” daripada “belajar” . Akibat penghasilan rendah itu mereka tidak memiliki kemampuan pembiayaan pendidikan sendiri, apalagi membiayai pendidikan anak-anaknya, minimal tamat sekolah dasar (*basic education*). Begitu pula, di daerah pedesaan jumlah buta aksara banyak terkonsentrasi di daerah terpencil dengan tingkat pendapatan penduduknya yang rendah.

Informasi di atas cukup memberikan alasan banyaknya masyarakat yang buta aksara di Desa Jaring Halus yang kondisinya berada di daerah terpencil, dan penduduknya relative miskin karena mereka hanya mengandalkan pendapatannya dari menjaring ikan. Oleh karena itu pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Jaring Halus dilakukan dalam upaya meningkatkan kecvakapahn hidupnya sehingga mampu memberdayakan dirinya dalam mengentaskan kemiskinan dan meraih kesejahteraan.

Indikator seseorang telah dianggap memiliki kemampuan kecakapan hidup apabila banyak kemampuan yang dimilikinya. Washington State University (Sri Handayani, 2009:6) mengelemenirnya menjadi empat indikator *Life Skills* yang terdiri dari: *Pertama*, kemampuan membuat keputusan (*Decision making*) dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif, kemampuan membuat daftar pilihan sebelum membuat keputusan, mampu memikirkan akibat dari putusan yang akan diambil, dan mampu mengevaluasi pilihan yang telah dibuat. *Kedua*, kemampuan memanfaatkan sumber daya (*Wise use of resources*) dalam menggunakan referensi, bermanfaat, punya nilai responsibilitas, berdasarkan prioritas. *Ketiga*, Komunikasi (*Communication*) berupa kemampuan menyampaikan pendapat, informasi, atau pesan dengan berbagai orang melalui pembicaran, penulisan, gerak tubuh, dan ekspresi yang efektif. *Keempat*, bertanggung jawab pada diri sendiri (*Self-responsibility*) sehingga mampu menjaga diri; menghargai perilaku diri dan dampaknya; mampu memilih posisi diantara salah dan benar.

Kedua, Pengelolaan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Jaring Halus dinilai cukup baik. Dilihat dari aspek-aspek pengelolaan program pendidikan luar sekolah. Semua aspek yang diukur mencerminkan program pendidikan keaksaraan secara ideal, yakni memenuhi aspek fungsi-fungsi manajemen program pendidikan luar sekolah yakni: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) penggerakan, (4) pembinaan, (5) penilaian dan (6) pengembangan (Djudju Sudjana, 2006:8). Implementasi dari fungsi manajemen sebagaimana diungkapkan di atas pada program pendidikan keaksaran berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring halus sudah berjalan dan dilakukan sebagaimana mestinya. Walaupun mereka tidak secara eksplisit menyebutkan fungsi-fungsi tersebut, namun dalam realisasinya pengelola telah menjalankan kelima fungsi tersebut.

Ketiga, proses pembelajaran keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Jaring Halus selama ini telah berjalan secara baik dan memenuhi aspek-aspek penyelenggaraan pembelajaran. Para pengelola bekerjasama dengan pihak pemerintah

Desa Jaring Halus menyusun kurikulum dan desain pembelajaran sebagai intisari kegiatan belajar mengajar. Kurikulum yang disusun di Desa Jaring halus relatif sesuai dengan harapan warga belajar. Dalam studinya Ade Kusmiadi (2009) memaparkan bahwa kriteria isi kurikulum pada pendidikan keaksaraan diantaranya sebagai berikut: *pertama*, strategi pembelajaran membaca, menulis dan berhitung melalui berbagai jenis keterampilan yang lebih diarahkan pada pemahaman berbagai informasi dan pengungkapan gagasan baik secara lisan maupun tertulis. *Kedua*, menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai masukan pokok pengembangan kurikulum. *Ketiga*, pengelolaan usaha bersama sebagai fokus materi pembelajaran dengan penekanan pada pengembangan kewirausahaan.

Desain pembelajaran pendidikan keaksaraan di Jaring Halus secara bertahap disempurnakan sesuai kebutuhan belajar warga belajar. Desain pembelajaran menjadi perhatian penting para pengelola mengingat penetapan keseluruhan aspek dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil belajar merupakan tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Djudju Sudjana (2006:85) aspek-aspek proses pembelajaran tersebut menjadi penting karena: (1) Perencanaan program pembelajaran keaksaraan, adalah suatu penentuan urutan tindakan, perkiraan kegiatan, serta penggunaan waktu untuk suatu kegiatan pembelajaran keaksaraan yang didasarkan atas data tentang kebutuhan, potensi dan sumberdaya di sekitar warga belajar, dengan memperhatikan prioritas yang wajar dan efisien untuk tercapainya tujuan pembelajaran. (2) Proses pembelajaran, adalah interaksi edukatif antara peserta dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Komponen - komponen yang terlibat dalam pembelajaran ini terdiri dari Keluaran (*output*), Proses pembelajaran (*learning proses*), Masukan mentah (*raw input*) , Masukan sarana (*instrumental input*), Masukan lingkungan (*enviromental input*), dan (3) Evaluasi atau penilaian pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui kemajuan warga belajar selama mengikuti program pendidikan keaksaraan.

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh warga belajar dibawah pembinaan para Tutor pendidikan keaksaraan di Desa

Jaring Halus. Sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga belajar Selama ini metoda pembelajaran yang digunakan oleh para Tutor sangat bervariasi. Dalam banyak hal metode ceramah masih dipergunakan dalam pembelajaran, namun metode diskusi, metode pemecahan masalah, metode demonstrasi, dan metode simulasi tetap digunakan dan lebih menarik bagi pembelajaran orang dewasa. Karena itu model belajar dengan “learning by doing” dan metode pemecahan masalah adalah metode-metode yang dianggap sangat tepat bagi warga belajar orang dewasa..

Mengacu pada tujuan program pendidikan keaksaraan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baca-tulis-hitung dan kemampuan fungsional warga belajar, maka dalam rangka mengetahui sejauh mana kemampuan tersebut, para pengelola program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus melaksanakan penilaian secara bertahap, berkala, rutin dan teratur. Berkenaan dengan aspek pembelajaran, Direktorat Pendidikan Masyarakat (2009:2) menggaris bawahi bahwa salah satu aspek penting dan sering menjadi masalah mengemuka dalam pendidikan keaksaraan, adalah aspek pembelajaran. Aktivitas pembelajaran bukan sekedar penyampaian dan penerimaan informasi, melainkan juga memberikan pengalaman belajar yang mampu mendukung proses transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Dalam pendidikan keaksaraan, pembelajaran yang efektif terjadi apabila rangsangan yang diberikan oleh Tutor menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada peserta didik sesuai dengan yang diharapkan.

Selain hal di atas, dalam proses pembelajaran di Jaring Halus para Tutor sangat memperhatikan kondisi warga belajar yang umumnya adalah para nelayan yang sudah dewasa. Oleh karena itu proses pembelajarannya sudah menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa. Walaupun mereka belum menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah implementasi dari pendidikan orang dewasa.

Perlakukan para Tutor terhadap warga belajar sejalan dengan pendapat Paul Bergevin yang dikutip Susan Yulianti (2009:46) tentang tujuan pendidikan bagi orang dewasa sebagai berikut: (a)

membantu orang dewasa dalam mencapai tingkat kebahagiaan hidupnya dan arti kehidupan yang sebenarnya, (2) membantu orang dewasa untuk memperoleh pengertian tentang dirinya sendiri, kekuatan yang dia miliki, kekurangan dan hubungannya dengan orang lain, (3) membantu orang dewasa untuk mengenal kebutuhan belajar yang terus menerus, (4) menyediakan suatu kondisi dan kesempatan dalam membantu orang dewasa mencapai tujuannya melalui proses pendewasaan baik secara spiritual, budaya, fisik, politis maupun secara vokasional, (5) menyediakan kebutuhan yang berkenaan dengan pendidikan bagi kecakapan baca tulis, keterampilan dan kesehatan.

Keempat, tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan di Jaring Halus yang diukur oleh kemampuan tiga orang responden. Berdasarkan ukuran tingkat keberaksaraan yang telah di paparkan di atas, yakni kemampuan mendengar, membaca, menulis, berhitung dan bercerita dijadikan instrument utama dalam mengukur tingkat keberaksaraan warga belajar di Desa Jaring Halus.

Program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus yang diprakarsai oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Aparat Desa Jaring Halus, memberikan nuansa pendidikan yang telah teruji dianggap dapat meningkatkan kualitas keaksaraan masyarakat. Peningkatan kemampuan warga belajar tersebut merupakan wujud bahwa program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus berjalan dengan baik dan berhasil, walaupun skor kemampuan ketiga responden belum menunjukkan angka yang maksimal.

Dampak nyata tentang peningkatan kemampuan keberaksaraan adalah pada peningkatan kecakapan hidup warga belajar dalam meningkatkan usahanya. Penguasaan kecakapan hidup menjadi hal yang penting bagi warga belajar peserta pendidikan keaksaraan, sebab kecakapan hidup atau *lifeskills* pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menanamkan dan meningkatkan kecakapan hidup individu peserta didik sehingga mampu hidup dan berpenghidupan secara layak dan mandiri. Kecakapan hidup itu sendiri merupakan suatu kecakapan yang

dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mampu mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya problema tersebut dapat diatasinya. Berdasarkan data yan ada ternyata setelah warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan tingkat keberaksaraan meeraka relative meningkat, walaupun tidak menunjukkan skor yang tinggi tapi kontribusi pendidikan keaksaraan adalah pada pembentukan karakter belajar masyarakat yang berkelanjutan.

Peningkatan keberaksaraan bagi masyarakat telah meningkatkan keterampilan dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kelima, kemampuan mengelola pendapatan pada masyarakat nelayan di Jaring Halus sudah lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum mengikuti program pendidikan keaksaraan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi terhadap warga belajar peserta pendidikan keaksaraan, rata-rata tingkat kesejahteraannya sangat lebih baik. Berdasarkan alur pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pendapatan dengan kesejahteraan sosial sangat berkaitan erat, karena apabila seseorang sudah memiliki pendapatan tetap, maka kesejahteraanpun dapat dirasakan, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Apabila pendapatan meningkat maka kesejahteraan pun akan meningkat. Pendapatan yang besar dapat mempengaruhi kehidupan seseorang di masyarakat, misalnya orang yang pendapatannya besar akan lebih disegani dibandingkan dengan orang yang pendapatannya kecil, oleh karena itu pendapatan dan kesejahteraan sosial sangat berkaitan erat.

Keenam, Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan

berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Jaring Halus sangat bervariasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya aspek pengelolaan, tenaga pendidik, warga belajar, sarana belajar dan biaya pendidikan program keaksaraan. Faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan keaksaraan di Jaring Halus telah dimanfaatkan oleh pengelola sebagai potensi yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan di Jaring Halus tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan program pendidikan keaksaraan di Jaring Halus disebabkan banyak faktor diantaranya: *pertama*, program pemberantasan buta aksara dalam bentuk pendidikan keaksaraan di jaring halus tidak semata-mata mengandalkan ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan tetapi mengerahkan semua potensi yang ada. *Kedua*, dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan pendekatan inovatif seperti penggunaan bahasa ibu bagi masyarakat yang bahasa tutur sehari-harinya bahkan bahasa Indonesia. *Ketiga*, pembelajaran diintegrasikan dengan pelajaran keterampilan yang dapat diusahakan sebagai mata pencaharian (pembelajaran fungsional). Program pembelajaran juga diintegrasikan dengan program pemberantasan kemiskinan seperti pengembangan usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, Ade Kusmiadi (2009:24) memaparkan bahwa dalam pembelajaran orang dewasa kegiatan belajar keterampilan praktis akan menarik bilamana materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dengan metode pembelajaran yang menarik pula. Karena itu model belajar dengan *"learning by doing"* dan metode pemecahan masalah adalah metode-metode yang dianggap sangat tepat bagi warga belajar orang dewasa. *Keempat*, penyelenggaraan program dilaksanakan dengan cara kerjasama antara pemerintah daerah dalam hal ini Desa Jaring Halus, Dinas terkait yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar dan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Keterlibatan ketiga unsur tersebut merupakan situasi kondusif dalam

mempercepat pemberantasan buta aksara di Jaring Halus Sumatera Utara.

Kondisi tersebut senada dengan harapan Direktorat Pendidikan Masyarakat (2008: 21) yang mengajurkan pendidikan keaksaraan dilandasi prinsip-prinsip pendidikan keaksaraan sebagai berikut: (1) konteks lokal, maksudnya pendidikan keaksaraan mengacu kepada bagaimana setiap individu bisa memanfaatkan kemampuan baca-tulis-hitung untuk memecahkan masalah keaksaraan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. (2) Desain lokal, maksudnya setiap kelompok belajar (kejar) perlu membuat perencanaan belajar berdasarkan minat dan kebutuhan warga belajar. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar (KBM) diupayakan dapat membuat bahan belajar dan jaringan kerjasama dengan organisasi setempat agar memperoleh sumber dan bahan belajar yang diperlukan, (3) proses partisipatif, maksudnya melibatkan warga belajar untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian kemampuan belajar. (4) fungsionalisasi hasil belajar, maksudnya mengukur kemampuan dan keterampilan setiap warga belajar dalam memanfaatkan dan memfungsikan keaksaraan atau hasil belajarnya dalam kegiatan sehari-hari, yang meliputi membaca menulis dan keterampilan berhitung praktis yang berguna bagi peningkatan mutu dan taraf hidupnya. Dari hasil proses belajarnya, mereka diharapkan dapat menganalisis dan memecahkan masalah keaksaraan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor penghambat kegiatan pendidikan keaksaraan di Jaring Halus diantaranya akses pendidikan belum merata terutama bagi kaum wanita, sebab umumnya para wanita lebih memiliki banyak pekerjaan selain mengurus rumah tangga juga membantu pekerjaan para suami. Rendahnya tingkat buta aksara pada kaum perempuan terjadi diberbagai tempat yang penduduknya mayoritas mengalami buta aksara. Kondisi tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian UNESCO (Kusnadi, 2005:35) bahwa pada kebanyakan kelompok perempuan jumlah buta aksara umumnya lebih besar dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Data menunjukkan dari 15.5 Juta orang penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas, dan 3.9 juta orang

berusia 15-44 tahun, dimana 67,07% nya adalah perempuan. Selain itu, jumlah buta aksara terdapat dikalangan suku-suku terasing atau kelompok-kelompok minoritas, yang kurang memiliki akses terhadap dunia pendidikan

Kondisi tersebut di atas senada dengan pendapat Ade Kusmiadi (2009:7) bahwa penyebab tak tersentuhnya perempuan oleh pendidikan keaksaraan antara lain disebabkan faktor-faktor: (a) perempuan tidak tertarik, walaupun memiliki akses yang memadai; (b) akses perempuan lebih kecil, walaupun programnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka; (c) kedua faktor itu menjadi penyebabnya. Selain itu, di daerah-daerah tertentu, secara kultural ada pembatasan ruang gerak perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Hal terpenting dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Jaring Halus adalah memelihara dan mempertahankan masyarakat warga belajar pendidikan keaksaraan tidak kembali menjadi buta huruf lagi. Untuk itu, dalam pelaksanaan program keaksaraan disertai program lanjutan berupa pendampingan masyarakat yang telah melek aksara sehingga dapat tercapai kondisi masyarakat yang mampu untuk berusaha secara mandiri. Dengan demikian; diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang berperan menjadi motivator dan penggerak secara terus menerus dalam kegiatan pendidikan keaksaraan untuk pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan alokasi anggaran, dukungan kelembagaan publik dan lembaga swasta.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kegiatan penelitian telah dilakukan dan telah mencapai tujuan, yakni mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan program dan proses pembelajaran serta tingkat keberaksaraan warga belajar pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup di Desa Jaring Halus Sumatera Utara.

Secara spesifik berdasarkan pertanyaan penelitian, diperoleh kesimpulan-kesimpulan berdasarkan hasil studi empirik sebagaimana uraian berikut:

1. Tingkat Keberaksaraan Masyarakat Nelayan Di Desa Jaring Halus.

Tingkat keberaksaraan Masyarakat Nelayan di Desa Jaring Halus dipaparkan pada dua hal yakni, tingkat keberaksaraan seluruh responden penelitian pada setiap aspek, dan tingkat keberaksaraan setiap responden berdasarkan seluruh aspek-aspek keaksaraan.

Tingkat keberaksaraan seluruh responden penelitian pada setiap aspek keaksaraan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) kompetensi mendengarkan seluruh responden, skor total sebesar 166 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 55 atau termasuk kategori kurang. (2) kompetensi berbicara seluruh responden, skor total sebesar 184 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 61 atau termasuk kategori sedang, (3) kompetensi membaca seluruh responden, skor total sebesar 185 dengan skor rata-ratanya mencapai angka 62 atau termasuk kategori sedang, (4) kompetensi menulis seluruh responden, skor total sebesar 170, dengan skor rata-ratanya mencapai angka 57 atau termasuk kategori kurang, dan (5) kompetensi berhitung seluruh responden, skor total sebesar 172, dengan skor rata-ratanya mencapai angka 57 atau termasuk kategori kurang.

Tingkat keberaksaraan setiap responden berdasarkan aspek-aspek keaksaraan, disimpulkan sebagai berikut: pertama, kemampuan keberaksaraan Bapak JF mencapai skor total 309 dengan skor rata-rata mencapai angka 61,8 atau termasuk kategori sedang. Kedua, kemampuan keberaksaraan Bapak JH mencapai skor total 277 dengan skor rata-rata 55,4 atau termasuk kategori kurang. Ketiga, kemampuan keberaksaraan Ibu RS mencapai skor total 291 dengan skor rata-rata 58,2 atau termasuk kategori kurang.

Berdasarkan uraian di atas, maka tingkat keberaksaraan responden baik berdasarkan kemampuan setiap individu warga belajar responden penelitian maupun berdasarkan kemampuan keseluruhan responden tentang keaksaraan termasuk dalam kategori rata-rata kurang.

2. Pengelolaan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Jaring Halus.

Pengelolaan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, dipaparkan pada 7 (tujuh) aspek yakni aspek penataan kondisi kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan program keaksaraan. Kesimpulan ketujuh aspek tersebut dipaparkan sebagai berikut:

- a. Penataan kondisi kelembagaan pendidikan keaksaraan diawali dengan pendataan warga belajar yang berjumlah sekarang mencapai angka 210 orang dan pembinaan tenaga tutor yang berjumlah 16 orang. Selanjutnya penetapan tempat belajar di dua lokasi yakni ruang belajar di Sekolah Dasar dan Sekretariat Desa.
- b. Perencanaan program, dilakukan melalui tahap identifikasi kebutuhan belajar, pengembangan kurikulum, pendataan warga belajar, dan rekrutmen Tutor. Setelah itu pengadaan sarana atau fasilitas belajar sesuai kebutuhan.
- c. Pengorganisasian program, dilakukan oleh pengelola dengan cara menyusun struktur pengelola lembaga, menyusun deskripsi pekerjaan untuk setiap struktur tersebut, pengisian

posisi pengurus (*staffing*) pengola pendidikan keaksaraan, dan dilanjutkan proses pelatihan (*up grading*) bagi pengurus terpilih.

- d. Penggerakan program, dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyusun desain motivasi bagi pengelola dan tenaga pengajar serta warga belajar. Proses motivasi untuk tenaga tutor dilakukan pada saat rapat koordinasi, sedangkan motivasi pada warga belajar dilakukan pada saat proses pembelajaran.
- e. Pembinaan program, dilakukan oleh pengelola berkerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak pemerintah desa melalui kegiatan supervisi dan monitoring penyelenggaraan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
- f. Penilaian program, dilakukan oleh pengelola untuk mengukur *pertama*, efektifitas pengelolaan program dan *kedua* hasil belajar yang mengukur kemampuan warga belajar dalam hal membaca, menulis dan berhitung.
- g. Pengembangan program, diarahkan untuk meningkatkan penambahan jumlah warga belajar dan mutu proses pembelajaran.

3. Proses Pembelajaran Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Jaring Halus.

Proses pembelajaran keaksaraan berbasis kecakapan hidup pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, dipaparkan dalam 4 (empat) aspek yakni:

- a. Perencanaan pembelajaran, dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: identifikasi kebutuhan materi belajar, penentuan materi belajar berdasarkan hasil rumusan identifikasi kebutuhan belajar, rekrutmen warga belajar, penetapan sumber belajar, penentuan metode pembelajaran, merencanakan penilaian hasil belajar, dan menyusun jadwal belajar.
- b. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan beberapa tahap yakni: *pertama*, persiapan awal sebelum proses belajar, sosialisasi dan informasi selama proses belajar, absensi kehadiran, dan menyepakati pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh Tutor. *Kedua*, proses pembelajaran digunakan prinsip-prinsip

pembelajaran orang dewasa. *Ketiga*, melakukan motivasi belajar melalui komunikasi efektif dalam setiap proses pembelajaran.

- c. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan cara: menentukan aspek-aspek penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, laporan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan oleh para tutor program pendidikan keaksaraan secara berkala sesuai jadwal laporan yang ditetapkan.
- d. Pengembangan pembelajaran dalam bentuk penambahan materi pembelajaran calistung dengan keterampilan berusaha, diversifikasi kelompok warga belajar berdasarkan usia dan prestasi, dan penataan tempat dan sarana belajar.

4. Tingkat Keberaksaraan Masyarakat Nelayan di Desa Jaring Halus Setelah Mengikuti Program Pendidikan Keaksaraan.

Tingkat keberaksaraan masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus setelah mengikuti program pendidikan keaksaraan dianalisis pada dua hal yakni, tingkat keberaksaraan seluruh responden penelitian pada setiap aspek, dan tingkat keberaksaraan setiap responden berdasarkan seluruh aspek-aspek keaksaraan.

Tingkat keberaksaraan seluruh responden penelitian pada aspek kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung pada seluruh responden, rata-rata skor seluruh kompetensi mencapai angka 267, dengan rata-rata skor setiap aspek kompetensi mencapai angka 91.8 atau termasuk kategori baik. Kemudian tingkat keberaksaraan setiap responden berdasarkan aspek-aspek keaksaraan, disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, kemampuan keberaksaraan Bapak JF mencapai skor total 458 dengan skor rata-rata mencapai angka 91 atau termasuk kategori sangat baik. *Kedua*, kemampuan keberaksaraan Bapak JH mencapai skor total 460 dengan skor rata-rata 92 atau termasuk kategori sangat baik. *Ketiga*, kemampuan keberaksaraan Ibu RS mencapai skor total 462 dengan skor rata-rata 92 atau termasuk kategori sangat baik.

Berdasarkan data di atas, tingkat keberaksaraan responden meningkat signifikan bila dibandingkan dengan hasil observasi tingkat keaksaraan pada responden yang sama sebelum dilakukan program pendidikan keaksaraan.

5. Kemampuan Mengelola Pendapatan Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Jaring Halus.

Kemampuan mengelola pendapatan pada masyarakat nelayan di Desa Jaring Halus, disimpulkan pada 4 (empat) aspek, yakni::

- a. Kemampuan warga belajar dalam merencanakan pengelolaan pendapatan sudah lebih baik. Umumnya responden sudah mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan keluarga dan merencanakan alokasi penggunaan pendapatan hasil usahanya tersebut.
- b. Kemampuan warga belajar dalam mempergunakan pendapatan sudah tertib, Responden mencatat kebutuhan yang akan dibeli, kemudian ditindaklanjuti dengan mencari informasi tentang kebutuhan yang akan dibeli tersebut dilanjutkan dengan menyusun daftar prioritas kebutuhan dan menghitung jumlah total pengeluaran. Semua data catatan tersebut, mereka simpan sebagai catatan keluarga yang dapat dimanfaatkan apabila dibutuhkan.
- c. Kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi penggunaan pendapatan sudah lebih baik, hal ini terbukti dari kebiasaan masyarakat untuk menghitung ulang pengeluaran pendapatannya.
- d. Kemampuan keberaksaraan telah meningkatkan motivasi masyarakat untuk menambah kegiatan usahanya. Saat ini jenis usaha masyarakat sudah bertambah, termasuk penambahan dalam membina jaringan mitra usahanya.

6. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Jaring Halus.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus, dikaji dalam 5 (lima) faktor, yaitu pengelolaan, tenaga pengajar, warga belajar, sarana, biaya. Kesimpulan kelima faktor tersebut dipaparkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengelolaan dilakukan oleh aparat desa bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi UMSU. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran adalah waktu belajar, mengingat keterbatasan kesempatan warga belajar sebagai masyarakat nelayan yang waktunya berbenturan dengan pekerjaan. Namun demikian kegiatan belajar terus berlangsung, karena faktor dukungan semangat warga belajar untuk terus ikut pada pendidikan keaksaraan.
- b. Tenaga Pendidik pada program pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus dihadapkan pada masalah rendahnya kualifikasi tenaga pengajar. Namun demikian, pendidikan keaksaraan berlangsung dengan baik karena adanya proses komunikasi yang kondusif antara warga belajar dengan Tutor.
- c. Warga Belajar pendidikan keaksaraan umumnya menghadapi kendala dalam pengaturan waktu belajar. Namun demikian semangat dan kesadaran warga belajar untuk terus belajar menjadi faktor pendukung keberlangsungan program.
- d. Sarana Belajar pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus yang selama ini menggunakan fasilitas ruang belajar di Sekoah Dasar dan kantor Desa dan rumah warga yang relatif terbatas baik luas maupun kenyamanannya. Namun demikian dukungan nyata dari pihak perguruan tinggi seperti USMU.
- e. Pembiayaan Belajar pendidikan keaksaraan di Desa Jaring Halus masih menjadi kendala, sebab belum ada anggaran rutin yang diterima pengelola. Selama ini operasional pendidikan mengandalkan dana swadaya dari warga masyarakat dan pemerintahn desa, serta bantuan dari pihak perguruan tinggi.

B. Saran

Memperhatikan temuan hasil analisis data dan teori-teori yang dijadikan rujukan sebagai landasan operasional dan pembahasan dalam penelitian ini, akhirnya direkomendasikan beberapa hal penting bagi: (1) Pengelola Program, (2) instansi terkait, dan (3) penelitian lanjutan.

1. Rekomendasi untuk Pengelola Program

Dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan ini menuntut pihak pengelola program atau pengelola suatu program pendidikan luar sekolah lainnya untuk mempelajari langkah-langkah praktisnya yang dilandasi alasan-alasan filosofis dan alasan-alasan praktisnya. Sehubungan program ini merupakan program yang berupaya memberdayakan masyarakat dari ketidakmampuan menjadi lebih mampu, maka pengelola pendidikan luar sekolah atau pengelola program pendidikan keaksaraan perlu melibatkan warga belajar dalam semua langkah kegiatan pembelajaran mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian. Dalam praktek pelibatan warga belajar tersebut, seharusnya pengelola program atau tutor berpegang kepada konsep andragogik, sehingga mereka tidak diperlakukan sebagai orang awam yang tidak memiliki kemampuan dan pengalaman, tetapi harus diakui bahwa mereka sebagai orang dewasa memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan sumber belajar potensial. Oleh karena itu pengelola program pendidikan keaksaraan atau tutor harus bertindak sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran.

Dalam kapasitasnya sebagai pengelola program atau tutor pendidikan keaksaraan, hendaknya dipahami bahwa pengelola program adalah orang yang membantu warga belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap keberaksaraan melalui sebuah proses belajar aktif. Karakteristik program pendidikan keaksaraan, sesungguhnya merupakan rekonstruksi pendidikan luar sekolah. Melalui uraian rekomendasi ini, seharusnya upaya perluasan pendidikan luar sekolah tidak hanya diorientasikan pada kelembagaan pendidikan luar sekolah, tetapi upaya perluasan pendidikan luar sekolah yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber belajar potensial dan pihak yang dapat difasilitasi untuk belajar sehingga lebih aktif memberdayakan dirinya.

2. Rekomendasi Untuk Instansi Terkait

Masyarakat nelayan sebagai warga program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup sewajarnya mendapat

dukungan dan bantuan dari instansi terkait diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk pihak pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan terkait hendaknya berfungsi sebagai regulator, fasilitator, motivator dan stimulator bagi pengelola program dan warga belajar pendidikan keaksaraan di Desa Jating Halus. Model pendidikan keaksaraan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan suatu khasanah kekayaan dalam pendidikan keaksaraan. Oleh karena hasil penelitian ini secara empirik memiliki informasi sangat efektif dalam meningkatkan penguasaan kompetensi dasar warga belajar, maka perlu ada kebijakan untuk sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian in secara luas, khususnya pada penyelenggara pendidikan keaksaraan. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten perlu mengembangkan konteks local, desain local dengan pendekatan participatory kedalam bahan belajar, media belajar dan instrument evaluasi melalui workshop/lokakarya, pelatihan serta fasilitasi berkelanjutan terhadap tutor dan pengelola program pendidikan keaksaraan. Perlu perhatian pemerintah secara khusu terhadap keberdaaan pendamping keluarga yang dipandang memiliki kontribusi cukup besar sebagai faktor determinan percepatan program. Aspek lainnya adalah upaya dan tindaklanjut program, supaya tidak terjadi buta huruf kembali dan warga belajar benar-benar menajdi pembelajar yang mandiri.
- b. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hendaknya berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan penguatan kemampuan keberaksaran melalui kegiatan usaha masyarakat, dengan cara menyusun kegiatan pelatihan dan konsultasi tentang cara membuat perencanaan usaha serta membantu mencari mitra usaha bagi masyarakat nelayan yang tercatat sebagai warga belajar pendidikan keaksaraan di Jaring Halus. Sebaiknya dibentuk lembaga berbadan hukum seperti yayasan yang dapat mewakili lembaga pendidikan formal dan informal untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah dan perusahaan melalui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang

menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar aktivitas ekonomi, melainkan juga tanggung jawab sosial, termasuk kebijakan sejumlah perusahaan yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas CSR mereka.

3. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Berdasarkan beberapa temuan penelitian, maka perlu ada rekomendasi untuk penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini, baik yang bersifat replikasi maupun perluasan. Peneliti menyadari bahwa dengan berbagai keterbatasan yang ada, sangat diyakini analisa terhadap kebutuhan belajar masyarakat dalam studi ini tidak dapat terungkap secara gamblang. Untuk itu pada subjek yang sama perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih intensif sehingga memungkinkan ditemukan permasalahan yang menuntut pengembangan desain penelitian yang sejalan kebutuhan sesungguhnya dari warga belajar program pendidikan keaksaraan. Beberapa aspek kriterium seperti halnya tingkat perubahan tingkat keberaksaraan perlu diuji secara kuantitatif melalui metode penelitian eksperiment yang lebih ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkhak, I., (2000), *Metodologi Pembelajaran Orang Dewasa*, Bandung : Andira.
- Anwar. (2004). *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)*. Bandung: Alfabeta
- Burden, P. R., & Byrd, D. M. (1999). *Method for effective teaching*, second edition. Boston: Allyn and Bacon
- Brolin, D.E. (1989). *Life Centered Career Education: Trainer's Manual*. USA: Council for Exceptional Children
- Becker, G., (1993). *Human Capital* (third edition). Chicago & London: The University at Chicago Press, Inc.,
- Bappenas tahun 2008. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS) . (2010). *Peta Statistik Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS
- Chambers, R. 1992. *Participatory Rural Appraisal Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dellors, Jacques, et al. (1998). *Learning: The Treasure Within*. Australia: Unesco Publishing.
- Ditjen PLS. (2003). *Program Life Skills Melalui Pendekatan Broad Based Education (BBE)*. Jakarta: Direktorat Tenaga Teknis Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional (2006), *Acuan Penyelenggaraan Program Pendidikan keaksaraan*: Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Pendidikan Masyarakat
- _____. (2007). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan keaksaraan*. Jakarta: Depdiknas
- _____. (2009). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (2009a). Mereka diarahkan pada Pendidikan Kesetaraan Integrasi

- Keterampilan. *Warta PNFI: Agenda*. Volume 77. Edisi X Tahun 2009.
- _____. (2009b). Pemerintah Optimis Turunkan Buta Aksara. *Warta PNFI: Sajian Utama*. Volume 76. Edisi IX Tahun 2009.
- Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. (2002) *Keaksaraan Fungsional: Buku Pegangan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional*. Bandung: Proyek Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat. (2005). *Keaksaraan Berbasis Masyarakat Desa*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2009). *Acuan Penyelenggaraan Dan Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2008). *Pemberantasan Buta Aksara dalam Sorotan Berita*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2008). *Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, Pengalaman Tutor dan Pandangan Wartawan*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2012). *Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, dan Taman Bacaan Masyarakat, Rintisan Dekonsentrasi*. Jakarta: Depdiknas.
- Fahrudin, A. (2012). *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Eriek Triputro H . (2012). *Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Kube)*. Makalah
- Fraenkel, J.R., & Wallen. (1993). *How To Design and Evaluate Research in Education*. Singapura: McGraw-Hill.
- Gamal, M. (2006). *Ekonomi-Nasional: Visi Kesejahteraan*. [Online]. Tersedia: <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg06556.html>. [8 Februari 2012].
- Hardiyanto, Edy (2011). *Peran Strategis Pendidikan Nonformal dan Informal dalam Mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia*. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP PNFI) Regional I Jayagiri – Bandung.
- Harian Global. (2010). *Pendidikan Masa Depan Melalui Penuntasan Keaksaraan*. Rubrik. Edisi 4 Maret 2010.

- Joyce, B., & Weil, M. (1980). *Model of Teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
- Jones, David. (1988). *Adult Education and Cultural Development*. Routledge. London dan New York.
- Jay Cross. (2007). *Informal Learning*. Sanfrancisco: John Wiley & Sons. Inc.
- Kartika, I., (2003). *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pemberdayaan Penerima Kredit Usaha Keluarga Sejahtera*. Disertasi. PPs. UPI.
- Kindervatter, S., (1979). *Non Formal Education As an Empowering Process*. Amherst. Massachussets: Centre for International Education University of Massachussets.
- Kusnadi, dkk. (2005). *Pendidikan Keaksaraan, Filosofi, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen PLS Departemen Pendidikan Nasional.
- Kamil, M. (2010). *Model Pendidikan dan Pelatihan: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____, M. (2002). *Model Pembelajaran Magang Bagi peningkatan kemandirian Warga Belajar*. Disertasi pada PPS UPI Bandung : Tidak diterbitkan
- Karli, H., (2002). *Model-model Pembelajaran Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bina Media Indonesia.
- Komar, O. (2006). *Filsafat Pendidikan Non Formal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moeloeng J. L. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja
- Maki Hayashikawa. (2008). *Literacy as Freedom United Nations Literacy Decade (UNLD)*. Paper. Parliamentary Conference for Education In the Asia Pacific Region 24-25 October 2008, Jakarta, Indonesia.
- Mitcell Stewart, A., (1994). *Empowering People*. Britain: Pitman Publishing-Divison of Longman Group UK. Ltd.,
- Norman Longworth. (2005). *Lifelong Learning in Action*. London: Kogan Page Limited.

- Natawidjaja, R. (1999). *Penyusunan Instrumen Penelitian*. PPs Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Payong, M.R. (2011) *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta: PT. Indeks.
- Publikasi IPB, (2012). *Sosialisasi Intensif Program Life Skills*. Bogor: IPB Press.
- Ridwansyah, H. (2009). *Konsep Pendapatan dan Beban*. [Online]. Tersedia:
<http://ngeblogwebid.blogspot.com/2009/11/konsep-pendapatan-dan-beban.html>. [20 Agustus 2011].
- Robert K., (1984). *Case Study Research: Design and Methods*. California. SAGE Publications, Inc.
- Rogers, E.M., (1983). *Diffusion of Innovations*. New York: A Devision of Macmillan Publishers Co. Inc.
- Rogers, (1994a). *Teaching Adult*. Philadelphia: Open University Press.
- Rogers, (1994b). *Adult Learning*. Philadelphia: Open University Press.
- Rogers, A. (2004). *Non Formal Education*. Hongkong: Kluwer Academic Publishers.
- Sudjana, D. (2004). *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung : Falah Production
- _____. (2010). *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung : Falah Production
- _____, (2009), *Pendidikan Nonformal : Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas*. Bandung : Falah Production.
- _____, (2005), *Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung : Falah Production.
- _____, (2006), *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Rosdakarya
- Sri Handayani, (2009). *Muatan Life Skills Dalam Pembelajaran Di Sekolah: Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Bermutu*.

- Slamet, P.H., (2002). *Pendidikan Kecakapan Hidup di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama: Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- Sugiyono, (2007), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Trisnamansyah, S, (2003). *Filsafat, Teori dan Konsep Dasar PLS*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tim BBE. (2002). *Pendidikan Berorientasi pada Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas Broad Based Education (BBE)*. Jakarta: Tim BBE Departemen Pendidikan Nasional
- Trianto. (2007). *Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Bandung: Prestasi Pustaka
- Unesco. (2005). *Literacy Initiative For Empowerment*. Paris: UIL.
- Wahyudin, U. (2008). *Mutu Layanan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Berbasis Budaya Lokal Untuk Peningkatan Kompetensi Dasar Warga Belajar (studi pengembangan model pendidikan keaksaraan fungsional pada kelompok belajar keaksaraan fungsional di PKBM Kabupaten Subang*. Disertasi SPs UPI Bandung. Tidak diterbitkan
- Yulianti, S. (2009). *Akselerasi Pembelajaran Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar*. Bandung: Skripsi tidak diterbitkan.
- Yogie. (2011). *Kesejahteraan Rakyat: Benarkah Suatu Konsep yang Absurd*. [Online]. Tersedia: <http://politik.kompasiana.com/2011/06/07/kesejahteraan-rakyat-benarkah-suatu-konsep-yang-absurd/>. [8 Februari 2012].
- Vike Margaretna Sunarko Putri. (2010), *Pengaruh tingkat kemampuan keaksaraan, status sosial ekonomi, lingkungan kelaurga terhadap gairah melestarikan kemampuan keaksaraan dalam kehidupan sehari-hari*. Skripsi digital library (on line) Tersedia: <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/36625.html>
- Wikipedia (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (online). Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia. (February 24, 2013).

Jurnal Ilmiah

- Ardiwinata, J. S. (2010). Model Akselerasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Untuk Mencapai Kemandirian Dan Keberlanjutan Belajar Warga Belajar. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6, (3), 86-99.
- Cook, N. (2008). Shifting the focus of development: turning 'helping' into self-reflexive learning. *The Journal Critical Literacy: Theories and Practices* (online). 2 (1) 23-33. Tersedia: <http://criticalliteracyjournal.org/> (February 21, 2013).
- Kusmiadi, A. 2009. Model Pengelolaan Pembelajaran Pasca Keaksaraan Melalui Penguatan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Upaya Keberdayaan Perempuan Pedesaan. *Jurnal Andragogia PNFI*, 1 (1). 14-26.
- Shantini, (2010). Model Pendidikan Keadayaan Orientasi Budaya Lokal untuk Peningkatan Mutu Layanan Belajar. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6 (1). 45-57.
- Widayati T., dan Sihombing, D. (2012). Pengembangan Bahan Belajar Keaksaraan Berbasis Cerita Rakyat Kutai Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah Visi..* 7 (1). 65-78.

Dokumen dan Perundang-Undangan:

- Data Statistik Kantor BPS Kab. Langkat, Tahun 2012
- Data Monografi Kec. Secanggang, Tahun 2012
- Data Monografi Desa Jaring Halus Tahun 2012
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
- Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

RIWAYAT HIDUP



Dr. Agussani, M.AP dilahirkan di Bangkinang pada tanggal 18 Agustus 1954, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Haji Mohd Said (Alm) dan Darisah (Alm). Menikah dengan Siti Hawa dikaruniai 3 orang anak yaitu Nugraha Pratama, Ella Humaira Agustin, Muhammad Iqbal Aldiar. Riwayat Pendidikan, lulus Sekolah Dasar tahun 1968, lulus SMP Muhammadiyah tahun 1977, lulus SMA Muhammadiyah tahun 1980, lulus S1 tahun 1986, lulus S2 tahun 2004, dan lulus S3 tahun 2013.

Riwayat Pekerjaan: (1). Wakil Kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 tahun 1985-1990, (2) Dosen Kopertis Wilayah I DPK UMSU tahun 1989 sampai sekarang, (3) Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial UMSU 1992-1995, (4) Pembantu Dekan III FISIP UMSU 1995-2001, (5) Pembantu Dekan I FISIP UMSU tahun 2001-2005, (6) Wakil Rektor III UMSU 2003-2012, (7) Rektor UMSU 2010 - sampai sekarang.

Pengalaman Organisasi: (1) Bendahara PW Pemuda Muhammadiyah SU 1989-1993. (2) Sekretaris Majelis Kesehatan Masyarakat PW Muhammadiyah SU tahun 1995-2005. (3) Bendahara PD BAPOMI SU 2003-2006, (4) Ketua BAPOMI SU Tahun 2008-Sekarang. (5) Bendahara APTISI Sumatera Utara Tahun 2008-2012. Wakil Ketua APTISI Sumatera Utara Tahun 2012-2016, (6) Manajer Kontingen UMSU pada *IMT-GT Varsity Carnival* tahun 2008. (7) Manager kontingen BAPOMI Sumatera Utara pada POMNAS X di Banjarmasin tahun 2007.

Kegiatan akademik yang pernah diikuti diantaranya: (1) Presenter pada workshop dan pelatihan PKM Penulisan ilmiah UMSU tahun 2005-2007. (2) Pengarah pada pemilihan dosen

berprestasiUMSU tahun 2005 dan 2007, (3) Pengarah pada lomba karya tulis Mahasiswa bidang IPA, IPS UMSU tahun 2007.

Tanda Jasa yang pernah di terima dari: (1) Presiden RI tahun 2007, (2) IJTI Sumatera Utara Tahun 2007 (bersertifikat), (3) Perum LKBM ANTARA tahun 2010 sebagai Motivator Pembangunan Bidang Pendidikan (bersertifikat), (4). Walikota Medan sebagai Tokoh Pendidikan, (5) Gubernur Sumatera Utara pada “HAORNAS ke 28” sebagai Tokoh Olah Raga Sumatera Utara.

Pendidikan keaksaraan di Indonesia telah berkembang melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang. Sejak awal perang kemerdekaan para gerilyawan yang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung secara aktif mengajari rekannya dan masyarakat yang belum dapat membaca dan menulis. Pendidikan ini dikenal dengan istilah pendidikan keaksaraan tradisional yakni pengajaran pengetahuan, kemampuan dasar budaya membaca, menulis dan berhitung segenap warga masyarakat yang masih buta huruf selama perjuangan kemerdekaan.

Pada periode berikutnya pendidikan keaksaraan telah berkembang menjadi kemampuan mencari informasi, secara kritis mengolah, menilai dan mengelolanya (dalam dunia digital) untuk kebermaknaan bagi dirinya secara fungsional dan berbagi dengan orang lain. Sehingga dibedakan antara keaksaraan tradisional dengan keaksaraan fungsional. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, gagasan tentang pendidikan keaksaraan pun berkembang dengan munculnya keaksaraan dasar dan keaksaraan keluarga termasuk keaksaraan usaha mandiri.

Munculnya konsep keaksaraan fungsional sangat mengesankan, tetapi tidak berjalan mulus untuk gerakan keaksaraan di Negara sedang berkembang. Konsep keaksaraan fungsional ini memakan waktu panjang untuk bangkit dari frustrasi dan kegagalan para pekerja keaksaraan yang sering kali menghadapi para sasaran didik orang dewasa yang memimpikan sesuatu kehidupan yang indah, yang terang benderang tetapi tidak terwujud dan mereka tidak ingin menjadi bagian dari mimpi indah tersebut. Mereka tidak lagi secara sukarela untuk belajar membaca dan menulis. Mereka tidak lagi mikir apakah keaksaraan itu hak asasi manusia atau bukan. Bagi mereka yang sudah pernah belajar membaca dan menulis, mereka juga tidak tahu mau melakukan apa dengan kecakapan barunya tersebut atau setelah memperoleh *skill linguistik*, mau apa?. Konsep baru yang disebut keaksaraan fungsional menjanjikan akan memecahkan masalah klasik dan masalah yang sulit yaitu motivasi peserta didik dan secara bersamaan menghubungkan keaksaraan dengan ekonomi, sosial dan aspirasi politik di negara sedang berkembang.



Penerbit
Departemen Pendidikan Masyarakat
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia

ISBN 978-623-91369-6-3

